

**Kepentingan Ekonomi Politik Jepang dan Indonesia dalam *Japan*
– *Indonesia Economic Partnership Agreement (JI-EPA)***

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Master**

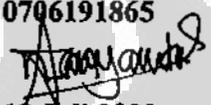
**Agus Haryanto, S.I.P.
0706191865**

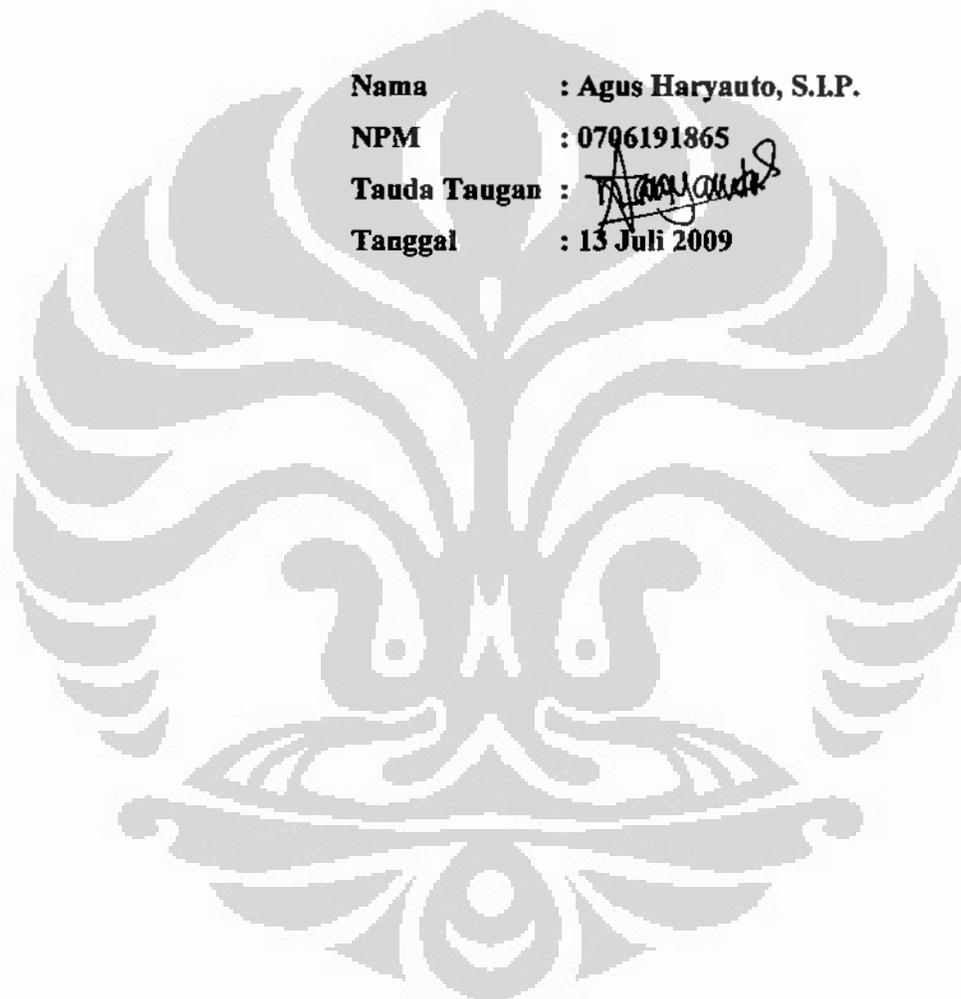


**UNIVERSITAS INDONESIA
Fakultas Pascasarjana
Program Studi Kajian Wilayah Jepang
Depok
April 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Agus Haryauto, S.LP.
NPM : 0706191865
Tanda Tangan : 
Tanggal : 13 Juli 2009

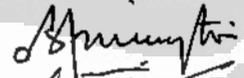
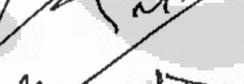


HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Agus Haryanto, S.I.P.
NPM : 0706191865
Program Studi : Kajian Wilayah Jepang
Judul Tesis : Kepentingan Ekonomi Politik Jepang dan Indonesia dalam *Japan – Indonesia Economic Partnership Agreement (JI-EPA)*

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Kajian Wilayah Jepang, Fakultas Pascasarjana, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Sudung Manurung ()
Pembimbing : Syamsul Hadi, Ph.D ()
Penguji : Makmur Keliat, Ph.D ()
Penguji : Prof. Dr. Noerhadi Magetsari ()

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 13 Juli 2009



Kata Ucapan Terimakasih

Saya haturkan puji syukur kepada Alloh Swt atas selesainya tesis ini. Saya sangat berharap tesis ini akan mampu menjadi karya yang berguna bagi bangsa dan menjadi media pembelajaran bagi saya untuk meneliti.

Selanjutnya saya ucapkan terimakasih kepada kedua pembimbing saya, Dr. Sudung Manurung dan Syamsul Hadi, P.hD. Atas bimbingan kedua dosen saya itulah saya bisa menyelesaikan tesis ini tepat waktu. Saya juga tak lupa mengucapkan terimakasih kepada kedua penguji saya, Makmur Keliat, Ph.D dan Prof. Dr. Noerhadi Magetsari. Saya juga mengucapkan terimakasih kepada staff pengajar dan administrasi KWJ Universitas Indonesia atas segala bantuan selama saya kuliah.

Yang terakhir, saya ucapkan terimakasih kepada keluarga saya yang telah mendukung upaya penyelesaian tesis ini. Terlebih lagi kepada istri saya yang selalu mendoakan.

Depok, 13 Juli 2009



Agus Haryanto, S.I.P

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

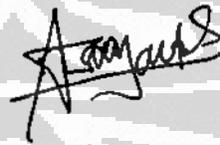
Nama : Agus Haryanto, S.I.P.
NPM/NIP : 0706191865
Program Studi : Kajian Wilayah Jepang
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non- Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : *Kepentingan Ekonomi Politik Jepang dan Indonesia dalam Japan – Indonesia Economic Partnership Agreement (JI-EPA)*

berserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 13 Juli 2009
Yang menyatakan



(Agus Haryanto, S.I.P.)

ABSTRAK

Nama : Agus Haryanto, S.I.P.
Pembimbing : Dr. Sudung Manurung
Program Studi : Kajian Wilayah Jepang
Judul : **Kepentingan Ekonomi Politik Jepang dan Indonesia dalam *Japan – Indonesia Economic Partnership Agreement* (JI-EPA)**

Penelitian ini berfokus pada hubungan Jepang – Indonesia dalam penandatanganan *Japan – Indonesia Economic Partnership Agreement* (JI-EPA). Perjanjian ini ditandatangani bulan Agustus 2007 di Jakarta dan menjadi babak baru kerjasama ekonomi Jepang – Indonesia yang tersusun secara komprehensif. Penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi kepentingan Jepang dan Indonesia dalam penandatanganan perjanjian. Penulis mengidentifikasi apa potensi Indonesia dibandingkan mitra Jepang yang lain. Penulis menemukan tiga hal dalam hal ini, yaitu (1) Jepang ingin menjaga stabilitas perekonomian Jepang dan kawasan; (2) Jepang memandang Indonesia sebagai negara dengan cadangan gas yang cukup besar, padahal selama ini Jepang juga dikenal sebagai importir gas terbesar di dunia; dan (3) Jepang ingin meningkatkan perdagangan dengan Indonesia.

Di sisi yang lain, Indonesia memandang Jepang sebagai mitra terpenting dalam perekonomian. Jepang dan Indonesia menjalin hubungan lebih dari 50 tahun dalam banyak bidang, terutama perekonomian, pendidikan dan budaya. Tetapi hubungan yang erat ini menjadi renggang setelah krisis ekonomi 1997-1998. Penulis mengidentifikasi tiga kepentingan Indonesia dalam penandatanganan JI-EPA, yaitu (1) meningkatkan perdagangan dengan Jepang; (2) mengembalikan Jepang sebagai investor terbesar bagi Indonesia; dan (3) mengharapkan program *capacity building* dari Jepang untuk industri di Indonesia.

Kata kunci:

Kepentingan, perdagangan, investasi, gas, dan *capacity building*

ABSTRACT

Name : Agus Haryanto, S.I.P.
Study Program : Japanese Studies Area
Title : **The Political Economy Interest of Japan and Indonesia on Japan – Indonesia Economic Partnership Agreement (JI-EPA)**

This research focus on Japan – Indonesia relations after signing Japan – Indonesia Economic Partnership Agreement (JI-EPA). The partnership signed on August, 2007 and has become the most complete agreement between two countries. This research try to identify Japan and Indonesia interest on JI-EPA, mainly on political economy interest. We found three Japan interest, (1) Japan try to keep Japan and region stability on economy; (2) Japan look Indonesia as potential partnership for Japan energy source, mainly LNG; and (3) Japan try to enhance trade cooperation with Indonesia.

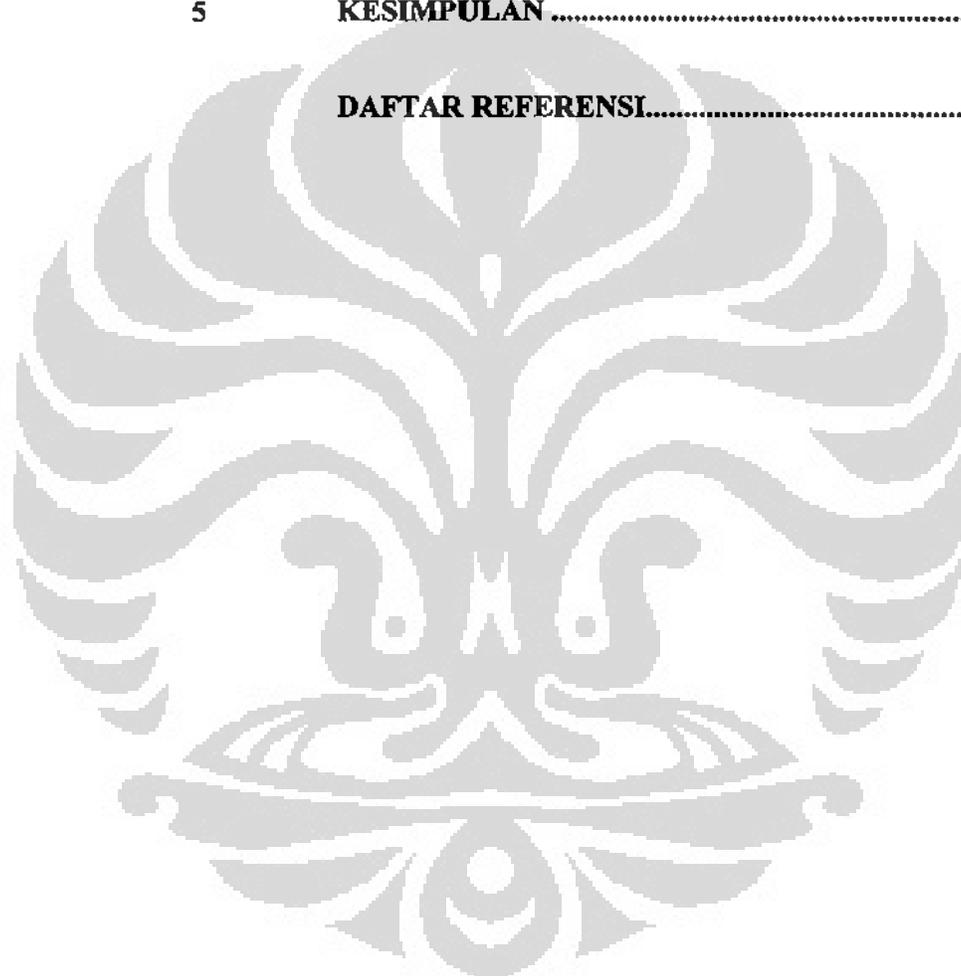
On the other side, Indonesia look Japan as the most important partner in economy. Japan and Indonesia has close relationship for the long time. But, Its broken by 1997/1998 crisis. Indonesia has three interest, (1) Increasing trade between two countries; (2) persuade Japan become investor; and (3) capacity building program for Indonesian industries.

Keywords:
interest, trade, investment, energy, and capacity building

DAFTAR ISI

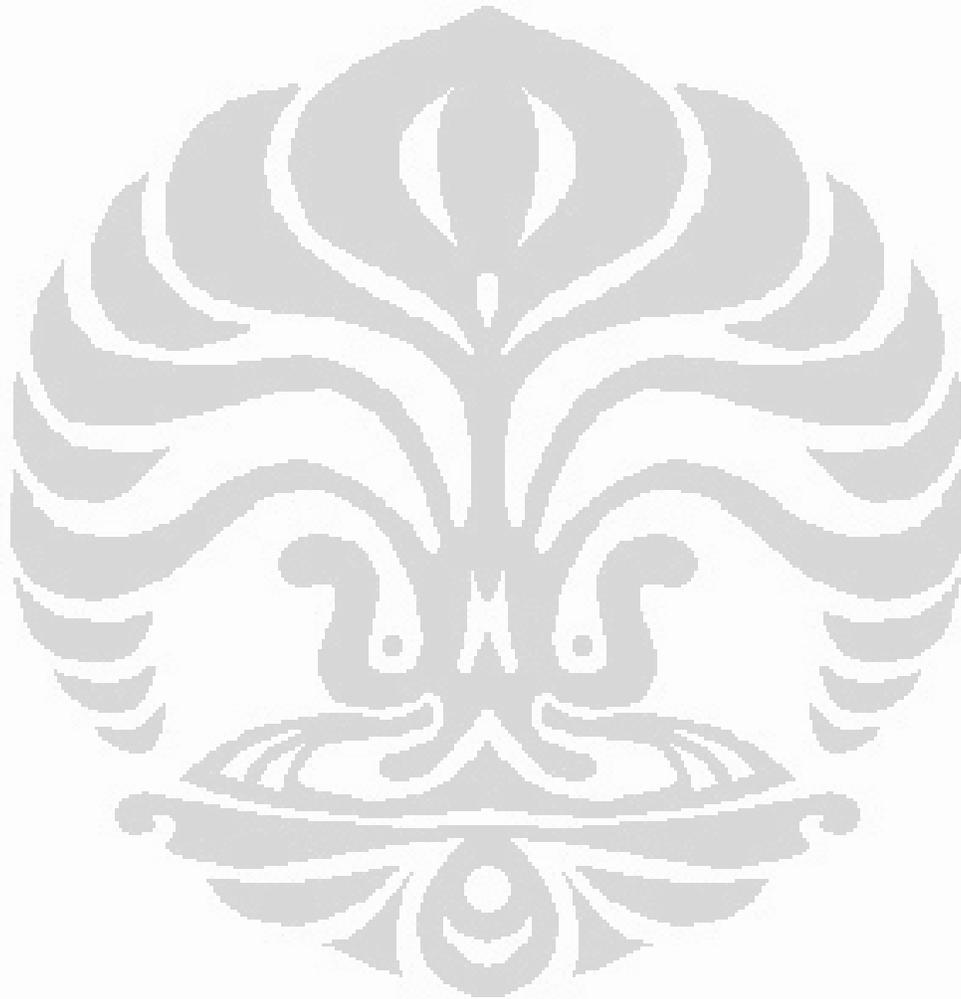
	HALAMAN JUDUL.....	i
	HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	Ii
	LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
	KATA UCAPAN TERIMAKASIH.....	iv
	LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
	ABSTRAK.....	vi
	ABSTRACT.....	vii
	DAFTAR ISI.....	viii
	DAFTAR GAMBAR.....	x
	DAFTAR TABEL.....	xii
1	PENDAHULUAN.....	1
	1.1 Latar Belakang.....	1
	1.2 Rumusan Masalah.....	7
	1.3 Tujuan Penelitian.....	7
	1.4 Signifikansi Penelitian.....	7
	1.5 Landasan Teori.....	7
	1.6 Metode Penelitian.....	11
	1.7 Sistematika Penulisan.....	11
2	LATAR BELAKANG JAPAN - INDONESIA ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (JI-EPA).....	13
	2.1 Peta Ekonomi Politik Internasional.....	13
	2.2 Hubungan Jepang – ASEAN.....	17
	2.2 Hubungan Jepang - Indonesia.....	23
3	KEPENTINGAN JEPANG DALAM JAPAN - INDONESIA ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (JI-EPA).....	30
	3.1 Menjaga Stabilitas Perekonomian Kawasan dan Jepang.....	30
	3.1.1 Asia Timur Sebagai <i>Home Base</i> Perekonomian Jepang.....	30
	3.1.2 Kerjasama Bilateral sebagai pilihan dalam Kerjasama.....	34
	3.2 Pemenuhan Kebutuhan Energi.....	36

3.3	Meningkatkan Volume Perdagangan.....	44
4	KEPENTINGAN INDONESIA DALAM JAPAN - INDONESIA ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (JI-EPA).....	56
4.1	Meningkatkan Perdagangan Internasional.....	56
4.2	Meningkatkan investasi Jepang di Indonesia.....	65
4.3	<i>Capacity Building</i> dan Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia	74
	4.3.1 MIDEK.....	79
	4.3.2 Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia	81
5	KESIMPULAN	83
	DAFTAR REFERENSI.....	84



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2 Contoh Gambar Tarif EPA.....	3
Gambar 1.2 Model Kerjasama EPA di Asia Tenggara.....	10
Gambar 2.1 Skema Pokok Kebijakan Ekonomi Luar Negeri Jepang.....	15
Gambar 2.2 Hubungan antara WTO dan FTA.....	17
Gambar 2.3 Gambaran mengenai CEP dan EPA di Asia Tenggara.....	19
Gambar 2.4 “ASEAN+1” sebagai Upaya Perluasan Kerjasama di Asia Timur...21	
Gambar 2.5 Ringkasan Isi JI-EPA.....	29
Gambar 3.1 Hubungan Ekonomi Jepang dengan Patner.....	31
Gambar 3.2 Total Konsumsi Energi Jepang (2005).....	37
Gambar 3.3 Pemakaian LNG per sector.....	38
Gambar 3.4 Gambar Sumber Impor LNG di Asia Timur.....	39
Gambar 3.5 Impor LNG Jepang per Sumber (2006).....	41
Gambar 3.6 Importir LNG Terbesar Dunia (2006).....	42
Gambar 3.7 Gambaran Jaringan Produksi Global.....	51
Gambar 3.8 Peningkatan Keuntungan di Asia Tenggara dan Dampaknya pada Perekonomian Jepang.....	55
Gambar 4.1 Keterkaitan Antara Perdagangan Luar Negeri dengan Kebijakan lainnya.....	60
Gambar 4.2 Peran FDI dalam Pembangunan : Kepentingan Negara Tujuan Investasi.....	67
Gambar 4.3 Kualitas Infrastruktur Indonesia.....	72
Gambar 4.4 Konsep Daya Saing.....	76



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan FTA dan EPA.....	2
Tabel 1.2 Perbandingan Konsesi Jepang dan Indonesia.....	4
Tabel 3.1 Tabel Negosiasi Mutilateral WTO.....	35
Tabel 3.2 Sumber Impor LNG di Asia Timur (Jepang, Korea dan Taiwan)	40
Tabel 3.3 Tabel Cadangan Energi (tahun 2004).....	41
Tabel 3.4 Nilai Impor Jepang.....	45
Tabel 3.5 Konsumen Baru di Asia Timur.....	46
Tabel 3.6 Data Ekspor – Impor Jepang.....	49
Tabel 3.7 Tabel Operasi Pengembangan Pabrik Otomotif di Cina dan ASEAN.....	54
Tabel 4.1 Kuota Pisang.....	61
Tabel 4.2 Kuota Nanas.....	61
Tabel 4.3 Neraca Perdagangan Indonesia – Jepang.....	63
Tabel 4.4 Ekspor – Impor Indonesia ke Jepang.....	64

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Hubungan diplomatik Indonesia - Jepang yang dimulai tahun 1958 mengalami pasang surut. Sejak penandatanganan perjanjian perdamaian pada bulan April 1958, Jepang dan Indonesia telah menandatangani sekitar 200 pertukaran nota antar kedua negara yang mengatur mengenai kerjasama bidang pertanian, kehutanan, peningkatan produksi pangan dan bantuan keuangan. Kedua negara juga sepakat membentuk "Forum Bersama Pemerintah dan Swasta" di bidang investasi sebagai forum komunikasi dan dialog dengan tujuan antara lain meningkatkan iklim investasi di Indonesia. (Irsan, 2007)

Perkembangan terbaru dari kedua negara adalah ditandatanganinya *Japan - Indonesia Economic Partnership Agreement (JI-EPA)*. Sejak 1 Juli 2008 ini, pemerintah Indonesia dan Jepang sepakat untuk mengimplementasikan *Economic Partnership Agreement (EPA)* antara Indonesia - Jepang. EPA adalah perjanjian bilateral antara Indonesia - Jepang yang ditandatangani pada Agustus 2007 di Jakarta antara Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono dan PM Jepang Shinzo Abe.

Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) sendiri mendefinisikan EPA sebagai berikut;

Bilateral or multilateral agreement among states to eliminate customs and domestic regulations other import/export regulations, to harmonize economic systems, and to facilitate the free movement of natural persons, goods, and capital within a region. (METI,2005, p.2)

JI-EPA merupakan kerjasama perdagangan yang mencakup tidak hanya liberalisasi, namun juga sektor lainnya, antara lain jasa, investasi, energi dan sebagainya, yang tercakup dalam tiga pilar utama yaitu:

- a. Fasilitasi Perdagangan dan investasi :
 - Upaya bersama untuk memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan tingkat kepercayaan bagi investor Jepang;

- Kerjasama di bidang prosedur kepabeanan, pelabuhan dan jasa-jasa perdagangan, HKI, dan sebagainya.
- b. Liberalisasi: menghapuskan atau mengurangi hambatan perdagangan dan investasi (bea masuk, memberi kepastian hukum);
- c. Kerjasama: kesepakatan untuk kerjasama dalam meningkatkan kapasitas Indonesia sehingga lebih mampu bersaing dan memanfaatkan secara optimal peluang pasar dari EPA.

Dalam banyak hal, perjanjian EPA hampir sama dengan skema kerjasama ekonomi seperti *Free Trade Agreement (FTA)* atau *Most Favoured Country (MFN)*, terutama dalam penentuan tarif. Kedua perjanjian ini menyajikan model kerjasama dimana memberikan hak istimewa kepada negara lain yang menjalin kerjasama berupa penurunan tarif. Perbedaannya dengan EPA adalah EPA mencakup kedua hal diatas. EPA menjadi perjanjian kerjasama ekonomi yang komprehensif. Oleh karena itu, banyak pengamat yang menyebutnya WTO plus.

Tabel 1.1
Perbandingan FTA dan EPA

FTA	EPA
Perjanjian bilateral / regional yang menghapuskan atau mengurangi pembebanan biaya impor pada barang atau liberalisasi perdagangan jasa antar kawasan tersebut.	
<ul style="list-style-type: none"> • Penghapusan/ penurunan tarif • penghapusan pembatasan penanaman modal asing dalam perdagangan jasa 	<ul style="list-style-type: none"> • memfasilitasi Bergeraknya SDM • kerjasama berbagai bidang • pembentukan aturan investasi • hak kekayaan intelektual, aturan kebijaksanaan persaingan

Sumber: diolah dari JETRO 2008

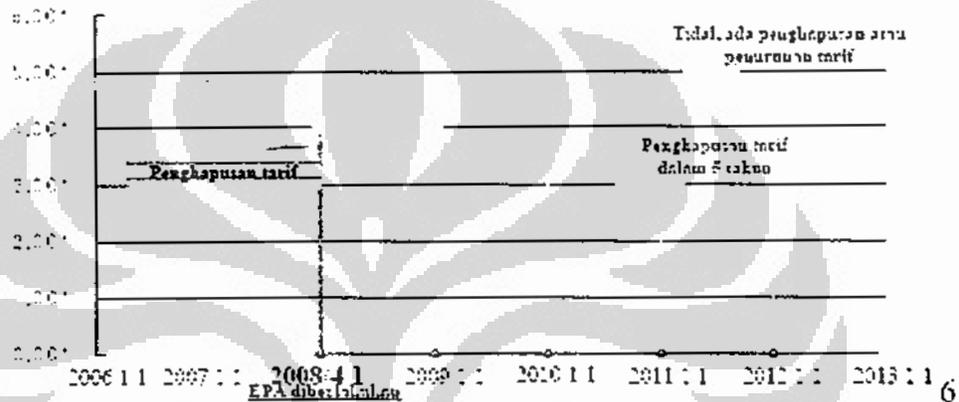
Dalam EPA, penurunan tarif antara Jepang dan Indonesia tidak dilakukan sekaligus, tetapi bertahap. Hal ini tergantung negosiasi kedua negara. Hal ini

memungkinkan kedua negara mengajukan beberapa komoditi yang dianggap belum siap untuk liberalisasi menjadi penurunan tarif bertahap. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dalam Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Contoh Gambar Tarif EPA

Diagram tarif EPA

Konsep EPA dilaksanakan pada April 2008 dan penghapusan tarif secara bertahap akan terjadi dalam 5 tahun.



Sumber: JETRO 2008

Sebagai wujud Implementasi JI-EPA, Departemen Keuangan mengeluarkan tiga peraturan, yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 94/PMK.011/2008 tentang Modalitas Penurunan TBM; No. 95/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk; dan No. 96/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dengan Skema USDFS.

Kendati mendukung penandatanganan EPA, banyak pengamat dan pelaku usaha mengaku skeptis Indonesia bisa memetik manfaat maksimal dari EPA. Jika disimak, sikap skeptis yang muncul sekarang ini memang lebih banyak dilandasi oleh ketidakpercayaan akan kesiapan Indonesia untuk mengambil peluang yang terbuka dari kesepakatan ini. Mereka yang pesimistis bahkan melihat Indonesia ada di pihak yang akan dirugikan. (Hartati, 2007)

Dalam kaitan hubungan Indonesia-Jepang, ingatan mereka yang skeptis sulit dilepaskan dari pengalaman puluhan tahun program ODA yang membuat

Indonesia selama beberapa dekade terus dan semakin tergantung pada utang Jepang. Atau juga investasi Jepang di sektor otomotif yang setelah 30 tahun membuat Indonesia tidak lebih dari sekadar tukang rakit.

Tabel 1.2
Perbandingan Konsesi Jepang dan Indonesia

Konsesi Jepang	Konsesi Indonesia
<ul style="list-style-type: none"> • Lebih 90% dari pos tarif (99% dr nilai ekspor Indonesia ke Jepang) masuk dlm IJ-EPA • Sekitar 80% dr pos tarif, bea masuk akan 0% pd saat berlakunya IJEPA (fast-track) • Sekitar 10% dr pos tarif, bea masuk secara bertahap akan 0% (3-10 thn sejak berlakunya IJEPA) • Sekitar 10% dr pos tarif (886) tdk masuk dalam IJEPA (Exclusion List) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sekitar 93% dari pos tarif (92% dari nilai ekspor Jepang ke Indonesia) masuk dalam IJ-EPA • Sekitar 58% dari pos tarif akan =0 pada saat berlakunya IJ-EPA (fast-track) • Sekitar 35% dari pos tarif secara bertahap akan =0 (3-10 tahun sejak berlakunya IJ-EPA) • Sekitar 7% dari seluruh pos tarif (834) tidak masuk IJ-EPA (Exclusion List)
<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah seluruh pos tarif Jepang 9275. Total Nilai ekspor Indonesia ke Jepang US\$ 21,7 milyar (2006) 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Pos Tariff Indonesia 11163. (HS 2004) Total Nilai impor dari Jepang ke Indonesia US\$ 16,2 milyar (2007)

Sumber: diolah dari data Depdag 2008

Jika kita menyimak sejarah hubungan Jepang – Asia Tenggara, kita bisa mengambil contoh hubungan Jepang – Asia Tenggara dalam konteks ODA pada tahun 1970-an dimana ada ketegangan hubungan antara Jepang dan Asia Tenggara. Jepang pada waktu itu berusaha menjalin hubungan dengan Asia Tenggara dengan konsep “cooperative trinity” yang terdiri dari perdagangan,

investasi, dan kerjasama ekonomi yang diarahkan oleh MITI¹ sebagai model ODA Jepang. (Araki, 2007 p.21-22)

Kerjasama Jepang dengan Asia Tenggara dilakukan sebagai upaya Jepang menjadikan Asia Tenggara sebagai pasar bagi produk Jepang dan sumber bahan baku. Asia Tenggara berperan sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi Jepang yang berkembang sangat pesat pada waktu itu. Namun, negara – negara di Asia Tenggara seperti Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Singapura menganggap mereka hanya menjadi “sapi perah” Jepang. Oleh karena itu, ada istilah sentimen yang dilekatkan pada Jepang, yaitu “economic animal” dimana Jepang dianggap sebagai negara yang hanya mengejar keuntungan ekonomi saja, tanpa memperdulikan sosial (Araki, 2007). Hal ini kemudian memunculkan sentimen anti Jepang di beberapa negara, termasuk di Indonesia dengan adanya peristiwa Malari².

Oleh karena itulah kemudian Jepang mengembangkan kerjasama yang lebih ramah dengan mengedepankan perekonomian jangka panjang. Kemudian dikeluarkanlah Dokrin Fukuda yang berisi empat hal penting yaitu; (1) janji Jepang untuk tidak menjadi negara superpower dalam militer, (2) pembentukan kerjasama saling percaya antara Jepang dan negara Asia Tenggara, (3) kerjasama dengan ASEAN, dan (4) membantu memperkuat rasa percaya diri negara – negara ASEAN. Secara spesifik, memperkuat rasa percaya diri tersebut dengan membentuk komunitas regional. (Araki, 2007, p.22)

Pengalaman EPA Jepang dengan tujuh negara lain sebelumnya, menurut Kementerian Urusan Luar Negeri Jepang, investasi memang meningkat beberapa waktu setelah perjanjian efektif (MOFA, 2007). Di Meksiko, investasi meningkat tiga kali lipat selama periode April-Desember 2006 saja, sedangkan ekspor ke

¹ MITI (*Ministry of International Trade and Industry*) yang sekarang bernama METI (*Ministry of Economy, Trade and Industry*) adalah kementerian yang mengatur perekonomian Jepang. Kementerian ini mengurus masalah perekonomian, perdagangan, dan industri.

² Peristiwa Malari (Malapetaka Lima Belas Januari) adalah peristiwa demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan sosial yang terjadi pada 15 Januari 1974. Peristiwa itu terjadi saat Perdana Menteri (PM) Jepang Kakuei Tanaka sedang berkunjung ke Jakarta (14-17 Januari 1974). Mahasiswa merencanakan menyambut kedatangannya dengan berdemonstrasi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma. Kedatangan Ketua Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI), Jan P. Pronk dijadikan momentum untuk demonstrasi antimodal asing. Klimaksnya, kedatangan PM Jepang, Januari 1974, disertai demonstrasi dan kerusuhan. (Dr. Asvi Warman Adam: 2008)

Jepang meningkat 19,2 persen dari periode sama 2005. Di Malaysia, menurut GITEP, EPA diharapkan akan meningkatkan produk domestik bruto (PDB) sebesar 5,3 persen, sementara untuk Jepang hanya 0,08 persen. Untuk Filipina, berbagai studi memperkirakan dampak ke PDB berkisar 0,09 persen hingga 1,7-3,3 persen (METI, 2007).

Jl-EPA sendiri terdiri dari 15 bab, 154 paragraf, 12 annex, 938 halaman. Perjanjian ini adalah perjanjian komprehensif yang pertama kali bagi Indonesia, sedangkan Jepang telah melakukan beberapa kali dengan negara lain, termasuk dengan Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina yang merupakan tetangga dekat Indonesia. Menurut Sudung Manurung (2008) para perunding Indonesia memang telah berbuat semaksimal mungkin dalam negosiasi. Hal ini dapat kita lihat dari adanya komitmen dari pihak Jepang untuk pengiriman perawat dan komitmen lainnya. Namun, kebanyakan 15 chapter dalam EPA, lebih merupakan kepentingan Jepang dari pada kepentingan Indonesia, seperti: *Energy & Mineral Resources, Investment, Improvement of Business Environment, Intellectual Property*.

Hampir tidak ada bab yang lebih mengakomodasi kepentingan Indonesia, misalnya kewajiban melakukan *technology transfer*, atau kewajiban memberdayakan suplier lokal untuk operasi perusahaan Jepang di Indonesia dan sebagainya. Isi Jl-EPA terlihat tidak berbeda signifikan dengan EPA yang ditandatangani Jepang dengan berbagai negara lainnya. Sebagian besar komitmen yang diperoleh juga diperoleh atau akan diperoleh negara lainnya. Secara umum, diperkirakan Jepang memperoleh keuntungan lebih besar karena dalam posisi yang lebih siap dalam perjanjian maupun implementasi.

Jamaludin (2008) berpendapat Indonesia termasuk negara yang terlambat dalam negosiasi EPA. Ketika negara – negara ASEAN melakukan negosiasi, Indonesia masih belum mempersiapkan diri. Hal ini dikarenakan koordinasi yang lemah antar departemen di dalam pemerintahan (Komunikasi personal 26/11/2008).

Negosiator dalam perjanjian ini yang diketuai Departemen Luar Negeri pun dianggap Jamaludin (2008) menjadi rancu dengan implementasi yang diketuai oleh Departemen Perdagangan. Begitupun berbagai fakta di lapangan

dimana antara departemen kesehatan, Departemen Tenaga Kerja, dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang bersengketa dalam pengiriman tenaga perawat ke Jepang. Fakta ini menunjukkan pemerintah Indonesia tidak mempersiapkan diri semaksimal mungkin (komunikasi personal, 26/11/2008).

Langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat ini adalah terus mengoptimalkan perjanjian tersebut. Hal ini bisa dilakukan dengan membuka peluang ekspor ke Jepang dalam sektor – sektor yang lain.

1.2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan hal diatas, dalam penelitian ini akan menjawab pertanyaan utama, yaitu apakah kepentingan Jepang dan Indonesia dalam JI-EPA.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi konsep EPA yang dikembangkan oleh Jepang,
2. Mengidentifikasi kepentingan Jepang atas Indonesia melalui JI-EPA,
3. Mengidentifikasi kepentingan nasional Indonesia dalam hubungan Indonesia – Jepang,

1.4. Signifikansi Penelitian

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dinamika hubungan Indonesia – Jepang dalam JI-EPA.
2. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi tulisan yang membahas secara komprehensif kepentingan Jepang dan Indonesia dalam EPA.

1.5. Landasan Teori

Kepentingan nasional menurut Daniel R Pap (1997) adalah kepentingan sebuah negara, sedangkan cara untuk mendapatkan kepentingan tersebut adalah kebijakan nasional.

A state's interests are called the national interest, and the methods and actions it employs to attempt to achieve its national interests are called national policy (Daniel R, 2001 p.43)

Kriteria ekonomi biasanya merupakan kepentingan nasional. Hampir semua negara menyandarkan kepentingan ekonomi dalam pembuatan kebijakan nasional. Kebijakan tersebut berupa tuntutan kesetaraan dalam perdagangan, memperkuat industri, menjamin akses negara terhadap minyak (energi), gas, meningkatkan pendapatan nasional dan sebagainya.

Morgenthau (1990) sendiri menyatakan bahwa kepentingan nasional setiap negara adalah kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan *pengendalian* sebuah negara atas negara lain. Oleh karena itu Morgenthau percaya bahwa strategi diplomasi harus didasarkan pada kepentingan nasional, bukan pada alasan – alasan moral, legal dan ideologi yang dianggapnya utopis dan bahkan berbahaya³.

Lalu, bagaimana kepentingan nasional ini diperjuangkan ketika harus berhadapan dengan kepentingan negara lain? Menurut Morgenthau, diplomat yang baik adalah diplomat yang rasional, dan diplomat yang rasional adalah diplomat yang *prudent*. *Prudence* adalah kemampuan menilai kebutuhan dan keinginan sendiri sambil dengan seksama menyeimbangkannya dengan kebutuhan dan keinginan orang lain. Hal ini sesuai dengan asumsi Morgenthau sendiri yang menyatakan bahwa sistem internasional bukanlah sistem yang penuh keselarasan, tetapi juga bukan sistem yang ditakdirkan untuk selalu menimbulkan perang.

Selama ini kita melihat kekuatan dan pengaruh hanyalah interaksi antara dua atau tiga negara untuk memperoleh kepentingan nasionalnya. Kita mengasumsikan aktor (negara) tersebut kurang lebih independen. Padahal dalam segala hal, daya tawar (*bargaining*) ditentukan oleh posisi, otoritas, dan tradisi. Ketika sebuah negara memiliki posisi dan otoritas yang lemah, maka akan mengikuti negara yang lebih kuat tanpa diperintah atau diminta langsung. Inilah yang disebut dengan *structural power*.

Ketika sebuah negara memiliki sumber – sumber *structural power*, maka negara tersebut lebih independen. Menurut Susan Strange (1992), sumber *structural power* tersebut adalah keamanan (militer), finansial (ekonomi), pengetahuan dan produksi. (Strange,1992) Dalam konteks hubungan Jepang –

³ H.J. Morgenthau, *politics Among Nations* yang diambil dari buku Mas' oed, Mohtar, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*(1990) hal 139-142

Indonesia, banyak yang melihat Jepang memiliki sumber – sumber *struktural power* ini. Sedangkan Indonesia berada dalam posisi lebih lemah.

Namun, menurut Coloumbis dan Wolfe dalam Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (1990), *power* tidak bisa dipandang sebagai suatu hubungan yang statik, berlangsung satu kali dan satu arah. *Power* harus dilihat sebagai hubungan yang dinamis, berlangsung terus menerus, dan dua arah. Dalam konteks hubungan Jepang – Indonesia pun demikian. Jika kita menggunakan asumsi Susan Strage di atas, maka seolah – olah Indonesia tidak memiliki sumber – sumber *power*. Padahal, ada faktor yang membuat Indonesia strategis bagi Jepang. Faktor strategis tersebut misalnya adalah kekayaan alam, gas, dan Selat Malaka.

Konsep kepentingan nasional sendiri sering digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan politik luar negeri. Jadi, sebuah negara akan dianggap berhasil menjalankan politik luar negeri manakala berhasil memperjuangkan kepentingan nasional dalam hubungan internasional. JI-EPA juga bagian dari usaha Jepang dan Indonesia untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Dengan perjanjian ini pula sebenarnya kita bisa mengukur keberhasilan kedua negara untuk mencapai kepentingan nasional.

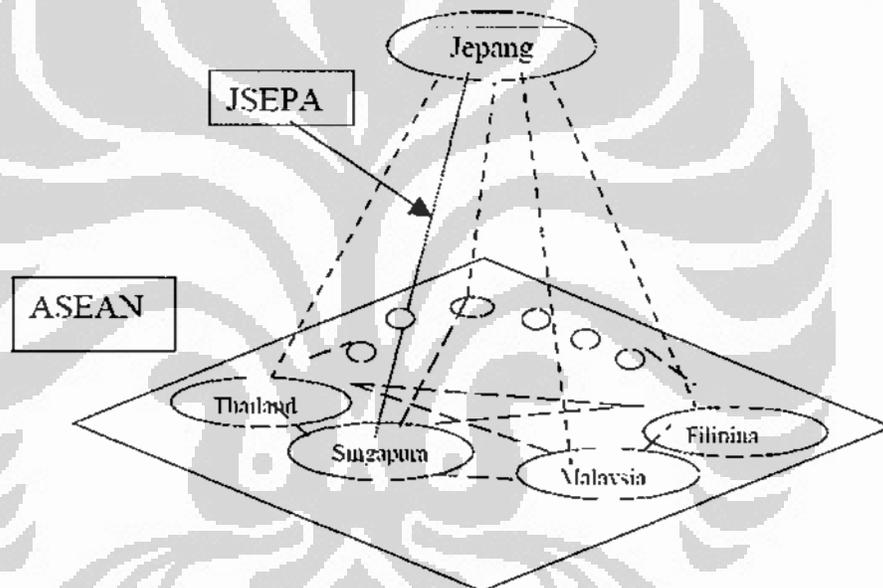
Jepang dan Asia Tenggara sendiri telah menjalin hubungan cukup lama sehingga terjadi hubungan saling membutuhkan. Selama ini ASEAN adalah pasar sekaligus sumber bahan baku bagi Jepang. Sedangkan Jepang merupakan investor terbesar di negara – negara ASEAN.

Interdependensi antara Asia Tenggara dan Jepang, dapat dilihat dari krisis ekonomi 1997 sebagai studi kasus. Krisis tersebut tidak hanya membuat negara Asia Tenggara saja yang mengalami krisis, tetapi juga Jepang sebagai mitra penting negara kawasan Asia Tenggara.

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Filipina ternyata juga berimbas pada perekonomian Jepang karena Jepang memiliki banyak perusahaan di Asia Tenggara. Krisis yang dialami Asia Tenggara tersebut mengakibatkan perusahaan – perusahaan Jepang mengurangi produksi dan karyawan. Perusahaan – perusahaan tersebut pun pada akhirnya akan mengalami stagnasi dan memperlemah posisi dalam persaingan global.

Selain perusahaan, yang juga mendapatkan krisis serius paska krisis 1997 adalah perbankan Jepang. Banyaknya perusahaan Jepang di Asia Tenggara membuat arus modal Jepang sangat besar di Asia Tenggara. Ketika terjadi krisis, perusahaan – perusahaan tersebut mengalami kesulitan untuk membayar hutang kepada bank. Selain itu, negara – negara di kawasan Asia Tenggara pun mengalami kesulitan untuk mengembalikan hutang dari pemerintah Jepang. (CiRes,2005 p.13-14)

Gambar 1.2
Model Kerjasama EPA di Asia Tenggara



Sumber: METI 2005

Oleh karena itulah, pemerintah Jepang berusaha untuk membantu negara – negara di kawasan Asia Tenggara untuk keluar dari krisis. Pemerintah Jepang kemudian memberikan bantuan dengan *Miyazawa Initiative*⁴ dan berbagai kebijakan lainnya, termasuk yang terbaru adalah EPA.

⁴ Miyazawa Initiative adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh PM Miyazawa untuk membantu Negara – Negara Asia untuk keluar dari krisis. Total anggaran dalam Miyazawa initiative adalah 3 milyar dolar US. Kebijakan ini dikeluarkan setelah usulan Jepang untuk membuat Asia Monetary Fund (AMF) tidak disetujui negara – negara yang tergabung dalam G-7

Dalam konteks kerjasama ekonomi dengan Asia Tenggara, Jepang akan mengajukan dua model yaitu bilateral dengan EPA dan regional dengan adanya *Comprehensive Economic Partnership* (CEP).

1.6. Metode Penelitian

Penelitian akan menggunakan dua metode yaitu;

1. Melalui studi pustaka

Dalam hal ini penulis akan mengumpulkan data – data berupa buku, hasil penelitian, jurnal dan beberapa publikasi yang relevan. Data tersebut dapat berupa *hard copy* atau *soft copy*.

2. *Indepth - Interview*

Metode ini digunakan untuk mewawancarai beberapa pihak yang terlibat dalam perjanjian JI-EPA seperti Departemen Luar Negeri, Departemen Perdagangan, Bapenas dan instansi terkait.

1.7. Sistematika Penulisan

Dalam tesis ini, akan dibagi menjadi lima bab yaitu;

Bab 1 pendahuluan; berisi tentang apa itu EPA, rumusan masalah, dan metodologi penelitian dan kerangka pemikiran

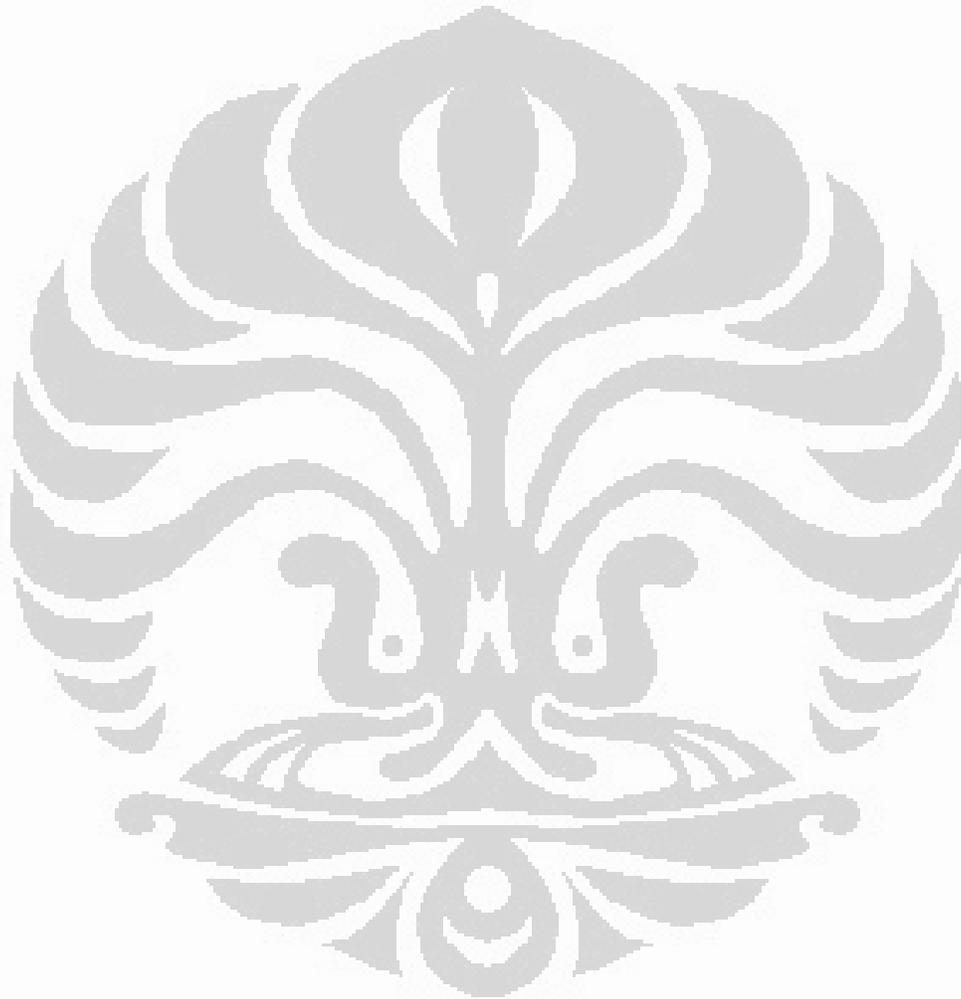
Bab 2 Latar belakang dibuatnya JI-EPA. Penulis akan membahas mengenai latar belakang dibuatnya EPA dalam perspektif multilateral, regional (ASEAN, dan bilateral.

Bab 3 Kepentingan Jepang. Dalam bab ini akan dibahas mengenai apa kepentingan Jepang di Indonesia yang kemudian melahirkan perjanjian EPA.

Bab 4 Kepentingan Indonesia dalam JI-EPA. Dalam bab ini akan dibahas mengenai bagaimana kepentingan Jepang itu terakomodasi dalam perjanjian JI-EPA.

karena menganggap keberadaan IMF sudah cukup sebagai lembaga yang memberikan pinjaman. (sumber: Cires, 2005)

Bab 5 Kesimpulan. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pengalaman apa yang bisa dipetik dari perjanjian JI-EPA ini bagi Indonesia dan Jepang. Selain itu juga saran bagi kedua negara untuk mengoptimalkan perjanjian.



BAB 2

LATAR BELAKANG *JAPAN - INDONESIA ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (JI-EPA)*

Dalam bab ini akan membahas mengenai apa yang menjadi latar belakang dikeluarkannya JI-EPA. Perjanjian ini adalah perjanjian yang baru bagi Indonesia dan merupakan perjanjian bilateral yang dibuat oleh Jepang dengan beberapa negara mitra. Oleh karena itu, dalam bab ini akan membahas JI-EPA dalam kerangka kerjasama multilateral, regional, dan bilateral.

2.1. Peta Ekonomi Politik Internasional

David Lake dalam Inoguchi (1993), *Japan's Foreign Policy in an Era of Global Change* membagi menjadi empat tipe sebuah negara mengenai perannya dalam dunia internasional, yaitu pemimpin (*leader*), pendukung (*supporter*), pengganggu (*spoiler*), dan penumpang gelap (*free rider*). Pemimpin adalah aktor yang membentuk dan menjaga kerangka interaksi ekonomi internasional. Pendukung adalah aktor yang membantu membentuk dan menjaga kerangka tersebut. *Spoiler* adalah aktor yang mendapat keuntungan dari kerangka tersebut tapi memiliki sikap yang seolah dirugikan dengan kerangka tersebut. *Free rider* adalah aktor yang mengambil keuntungan dari kerangka tersebut tetapi tidak berani atau tidak mau berkorban untuk mempertahankan sistem. (Inoguchi, 1993 p.57)

Ada dua pendapat penting mengenai gambaran sikap politik luar negeri Jepang, yaitu *adrift* (terombang – ambing, tidak jelas) atau oportunis atau pragmatis; dan sangat berbasis pada kepentingan nasional. Kedua pendapat ini memiliki posisi yang sama kuatnya dalam melihat kebijakan luar negeri Jepang. Pendapat ini misalnya diungkapkan oleh Takashi Inoguchi⁵ dalam *Japan's Foreign Policy in an Era of Global Change*. Dia memberikan contoh kebijakan pemerintah Jepang untuk memproteksi pasar beras sering dianggap Jepang tidak memiliki kebijakan yang jelas (terombang – ambing) karena dianggap tidak

⁵ Lihat dalam *Japan's Foreign Policy in an Era of Global Change* bagian *introduction*

memiliki posisi jelas dalam perdagangan internasional. Jepang dianggap tidak mendukung kebijakan rezim *Uruguay Round* dari GATT. Padahal Jepang adalah bagian dari negara – negara pendukung liberalisasi perdagangan dan merupakan sekutu dekat Amerika.

Namun, kebijakan proteksi pasar beras juga bisa dilihat dari lain sisi. Kebijakan ini bisa dilihat sebagai kebijakan Jepang yang sangat mengutamakan kepentingan dalam negeri. Jepang ingin melindungi petani dalam negeri, sekaligus tidak menginginkan komoditas beras tergantung kepada impor.

Inoguchi kemudian menjelaskan mengapa kedua gambaran tersebut bisa bersama – sama kuat. Yang pertama, Jepang tidak bisa menyampaikan dengan jelas bagaimana kepentingan nasionalnya sendiri. Sebagaimana kita ketahui, dalam pembuatan kebijakan di Jepang, selalu ada upaya untuk mencari konsesus. Hal ini membuat Jepang membutuhkan waktu yang lama untuk mendefinisikan kepentingan nasionalnya. Selain itu, kebijakan liberalisasi juga membutuhkan koordinasi dengan banyak instansi.

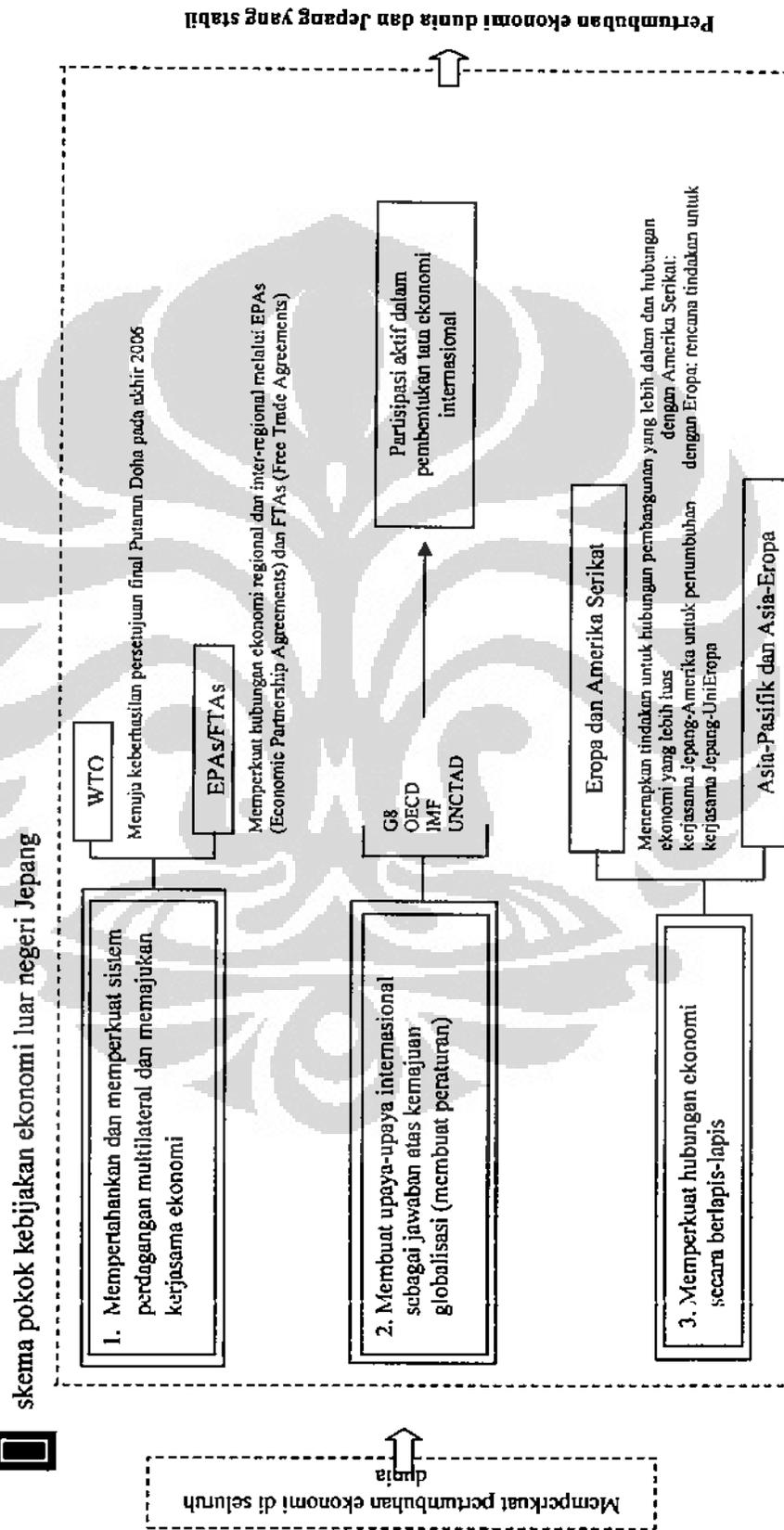
Yang kedua, Jepang tidak bisa mempertunjukkan “visi dunia” untuk direalisasikan. Hal ini karena Jepang bukanlah negara yang membawa arus liberalisasi. Dalam bab lain, Inoguchi memasukkan Jepang sebagai *supporter* dalam peran di dunia internasional⁶ (Inoguchi, 1993 p.57-58). Jepang dianggap mendukung kerangka yang dibawa oleh pemimpin dunia, yaitu Amerika.

Dalam perekonomian dunia, Jepang, Amerika, dan Uni Eropa menjadi kekuatan yang memimpin pertumbuhan perekonomian. Negara – negara ini memiliki agenda sebagai respon atas kondisi dunia seperti hadirnya China menjadi kekuatan baru, kondisi negara berkembang, pertumbuhan ekonomi, dan sebagainya.

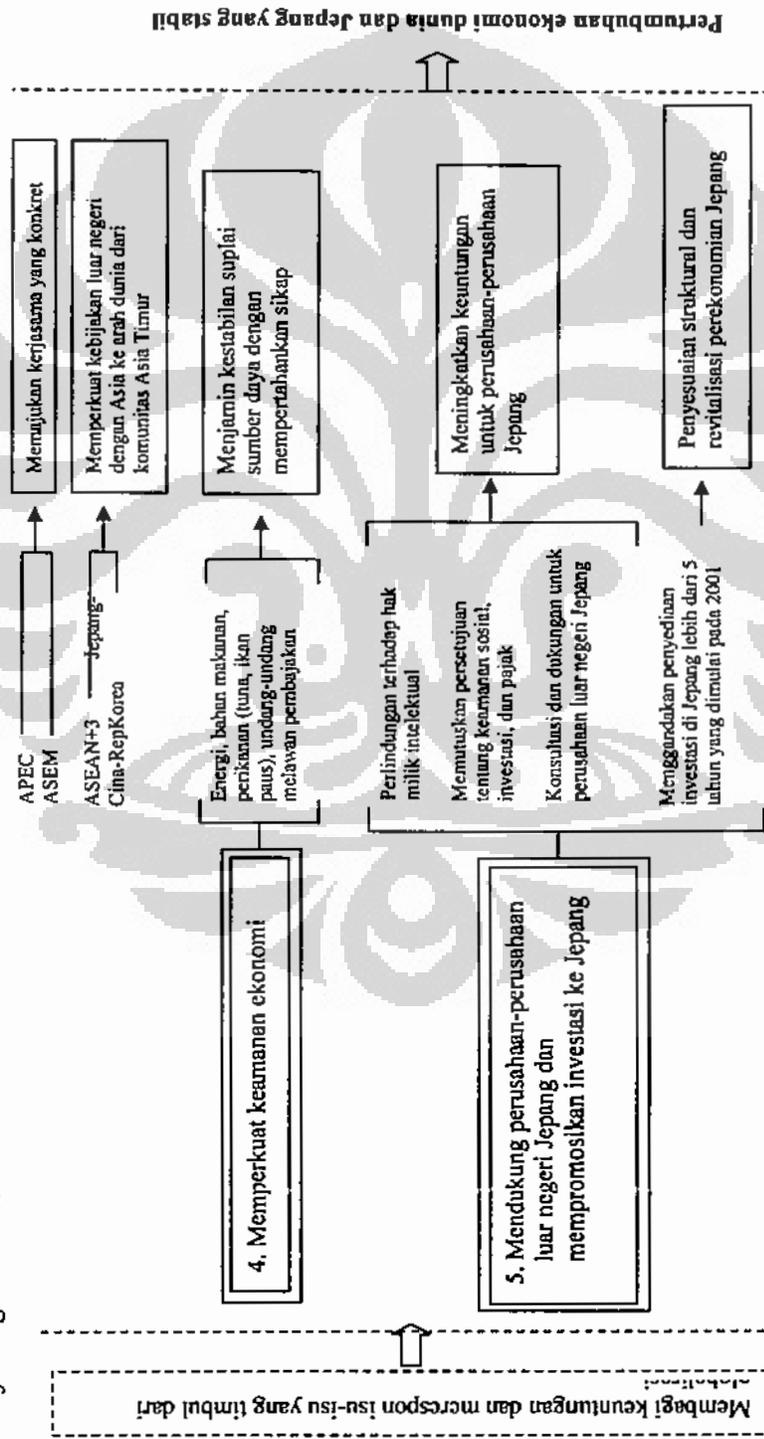
Dalam bagan 2.1 terlihat bagaimana kebijakan ekonomi luar negeri Jepang disusun dengan lima tujuan pokok yaitu menjaga dan memperkuat sistem perdagangan multilateral dan memproposikan kerangka kerjasama ekonomi; mengusahakan dunia internasional merespon perkembangan globalisasi;

⁶ Lihat dalam halaman 57-58. Inoguchi mengutip tipologi yang diajukan oleh David Lake mengenai peran negara dalam dunia internasional, yaitu pemimpin, pendukung-pengganggu dan penumpang gelap. Inoguchi kemudian memasukkan Jepang dalam golongan pendukung (*supporter*). Dia menulis, “A supporters is an actor who helps to support and sustain such framework”.

Gambar 2.1
Agenda Kebijakan Luar Negeri dalam bidang Ekonomi



Lanjutan gambar 2.1



Sumber: MOFA 2006, diambil dari Blue Book tahun 2006

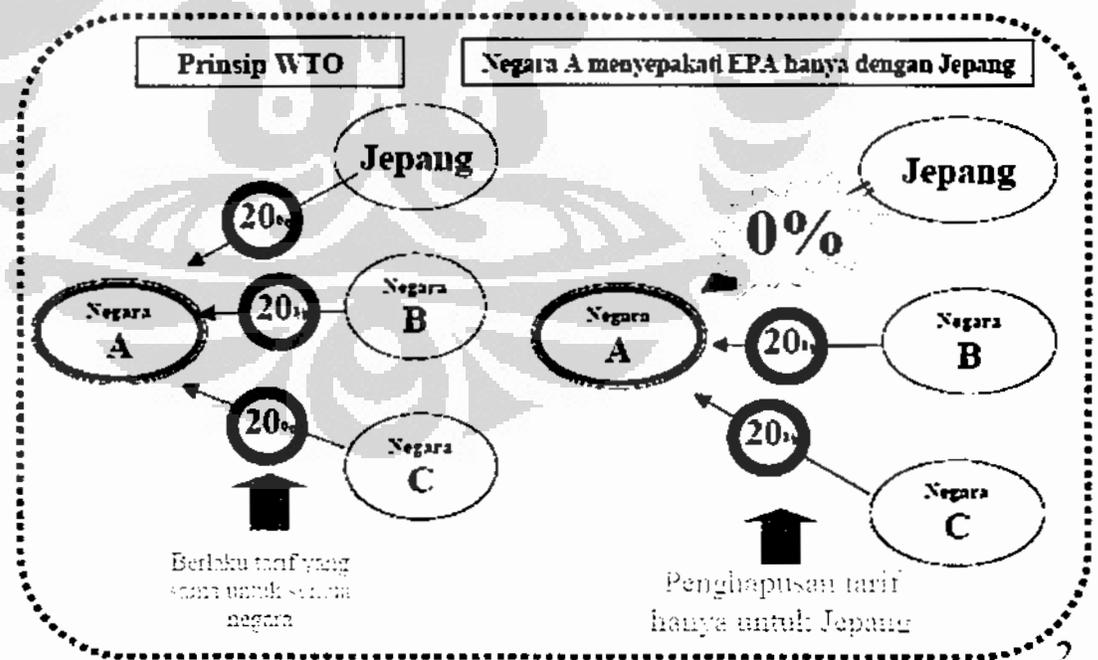
memperkuat aneka lapisan hubungan ekonomi; memperkuat keamanan ekonomi; dan mendukung perusahaan Jepang di luar negeri dan promosi investasi ke Jepang.

2.2. Perkembangan Hubungan Jepang – ASEAN

Gambar 2.1 diatas memperlihatkan bagaimana kebijakan *Economic Partnership Agreement* (EPA) merupakan bagian dari formula kebijakan pemerintah Jepang untuk menjaga kestabilan ekonomi dunia dan ekonomi Jepang. Jadi, tujuan besar dari konsep EPA adalah mendukung liberalisasi dengan cara memperkuat hubungan ekonomi regional dan bilateral.

Di Eropa, Asia, dan Amerika juga terjadi peningkatan kerjasama FTA yang memberi ruang khusus bagi negara patner. Model ini menjadi menarik bagi banyak negara karena dapat mendorong kerjasama ekonomi daripada kerangka perdagangan dalam konteks WTO. FTA memfasilitasi kerjasama antar dua pihak yang bernegosiasi langsung sehingga dianggap lebih efektif daripada kerjasama multilateral dalam WTO.

Gambar 2.2
Hubungan antara WTO dan FTA



Sumber: JETRO 2008, diambil dari publikasi JETRO mengenai EPA

Dalam konteks ASEAN, kerjasama ekonomi dilakukan dengan dua lapis, yaitu perjanjian yang dilakukan dengan ASEAN sebagai lembaga regional yaitu *ASEAN – Japan Comprehensive Economic Agreement (AJ-CEP)* dan masing – masing anggota ASEAN dengan EPA. AJ-CEP adalah kerjasama yang didesain Jepang dengan menganggap ASEAN sebagai satu kesatuan. Jadi, perjanjian ini tidak bernegosiasi dengan satu persatu anggota ASEAN, tetapi dengan ASEAN sebagai organisasi regional. Desain kerjasamanya sendiri sdapat dilihat dalam gambar 2.3.

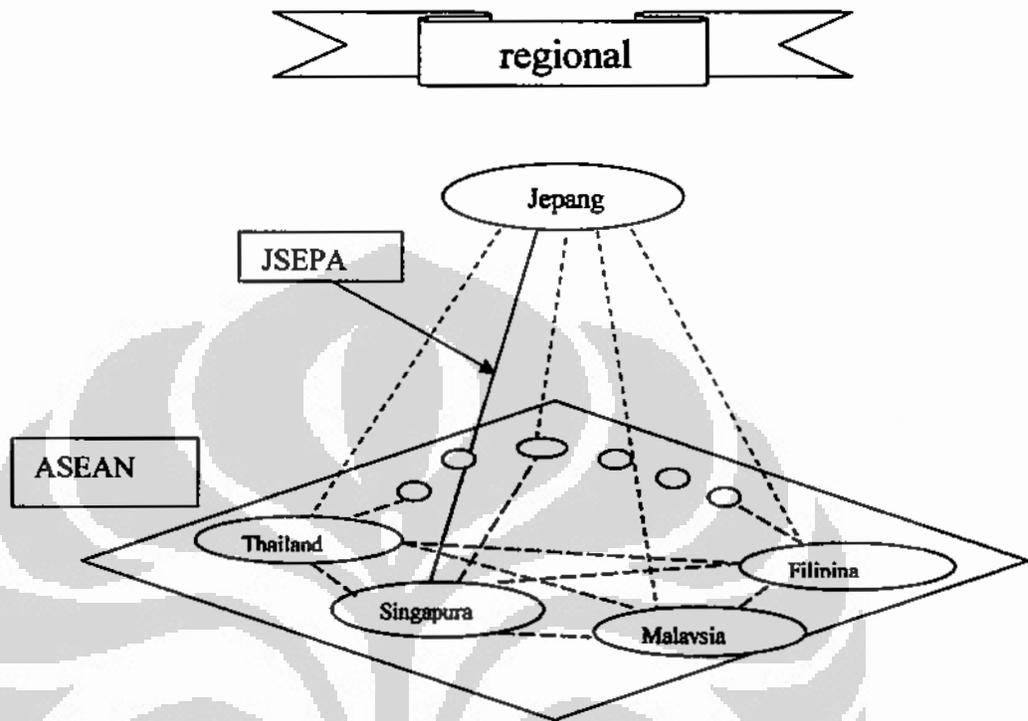
Model kerjasama yang dikembangkan Jepang di atas disusun untuk menjaga dominasi Jepang di Asia Tenggara. Hal ini terkait dengan munculnya China dan India menjadi mitra penting bagi ASEAN. Fakta ini membuat Jepang, India, dan China saling berlomba membuat model kerjasama untuk menarik simpati negara – negara ASEAN.

Sejak sekitar tahun 2000, China sebagai salah satu mitra penting bagi Asia Tenggara bermaksud untuk memperdalam hubungan ekonomi dengan Asia Tenggara. China dengan intensif memperdalam hubungannya dengan ASEAN.

Salah satu upaya yang dilakukan China melalui Perdana Menteri Zhu Rongji adalah mengusulkan dibentuknya *ASEAN - China Expert Group*. Pada tahun 2001 *ASEAN – China Epert Group* menghasilkan laporan yang berisi usulan pendirian perdagangan bebas yang akan dilakukan dalam sepuluh tahun; memperbanyak volume perdagangan dan investasi; pemberian bantuan teknis dan *capacity building*; memperluas kerjasama dalam beberapa bidang seperti *finance*, pariwisata, pertanian dan perkebunan, pengembangan sumberdaya manusia, pengembangan UKM, kerjasama industri, perlindungan lingkungan termasuk di dalamnya energi dan pengembangan subregional.

Kemudian diadakanlah *ASEAN – China Summit* pada bulan November 2001. Penandatanganan kerjasama komprehensif antara ASEAN – China baru ditandatangani pada tahun 2002. Keunggulan perjanjian kerjasama ini adalah merupakan paket yang menyatakan liberalisasi dalam bidang pertanian. Implementasi perjanjian ini akan dilakukan pada tahun 2004 (Akrasanee et al. 2003, p.91).

Gambar 2.3
Gambaran mengenai CEP di Asia Tenggara



Keterangan:

- Persetujuan Jepang-ASEAN CEP akan berisi perjanjian bilateral yang memasukkan Jepang menjadi salah satu bagian dari negara-negara ASEAN, akan menjelaskan tahapan-tahapan AFTA, dan akan meningkatkan item yang ditargetkan untuk liberalisasi.
- The Japan-ASEAN Cumulative Rules of Origin akan memungkinkan perusahaan yang berlokasi di wilayah Jepang-ASEAN untuk melakukan bisnis tanpa tarif bea cukai.

Sumber: METI 2005, diambil dari laporan METI dengan judul FTA/EPAs Policy

Sebagaimana kita ketahui, pertanian adalah komoditas utama sebagian anggota ASEAN. Pertanian menyumbang 15% GDP Filipina dan Indonesia, serta lebih dari 45 % untuk Kamboja, Laos dan Myanmar. Sektor ini juga merupakan komoditas ekspor utama yang mencapai lebih dari 10% untuk Thailand, Indonesia dan Kamboja, serta lebih dari 25 % untuk Myanmar, Laos dan Vietnam. Diantara negara anggota ASEAN, Thailand dan Vietnam adalah eksportir besar untuk komoditas padi, Thailand juga eksportir utama karet dan *seafood*, sedangkan Vietnam eksportir utama kopi (Akrasaneet al, 2003).

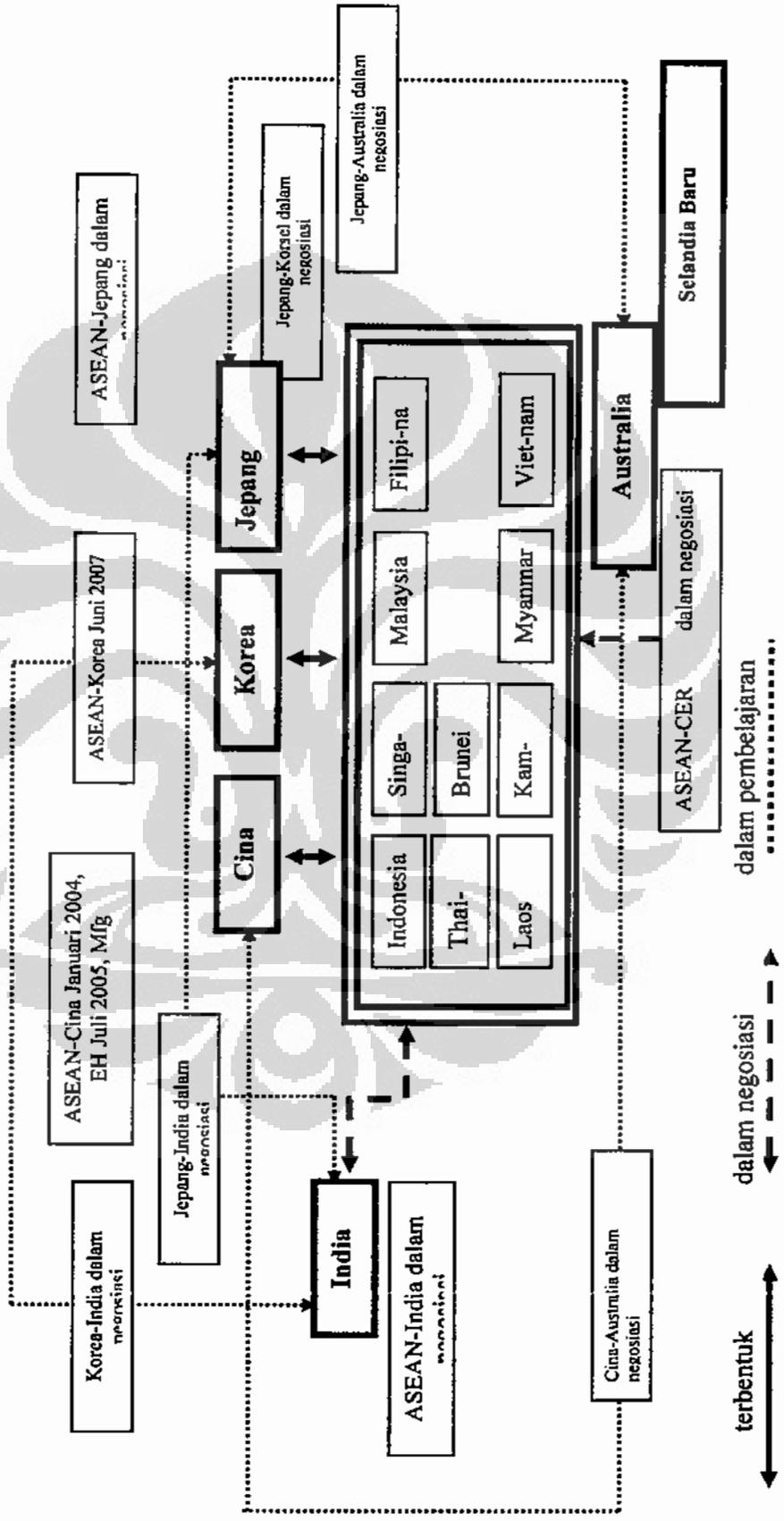
Upaya China tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Jepang yang selama ini menjadi mitra utama ASEAN. Setelah penandatanganan *Japan – Singapore EPA (JSEPA)*⁷ pada Januari 2002, PM Koizumi menyatakan bahwa *ASEAN - Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement (AJCEP)* sedang disusun. Pada saat *ASEAN – Japan Summit* di Phnom Pehn pada November 2002, Koizumi menyatakan bahwa Jepang akan menawarkan dua jalur pendekatan dalam kerjasama ekonomi di ASEAN, yaitu melalui ASEAN sebagai lembaga regional dan dengan perjanjian bilateral dengan anggota ASEAN dalam EPA. EPA dipilih sebagai bentuk untuk memfasilitasi keberagaman potensi yang dimiliki oleh anggota ASEAN sehingga diharapkan dengan EPA kerjasama antara Jepang – ASEAN akan memiliki implikasi yang besar terhadap sektor ekonomi anggota ASEAN. Selain itu, perjanjian ini juga diharapkan lebih menarik bagi anggota ASEAN daripada paket yang ditawarkan China.

Negosiasi AJCEP dalam tarif dan liberalisasi perdagangan akan dimulai pada tahun 2004 dengan fokus pada prinsip dasar mengenai asal barang, klasifikasi *custom*, dan koleksi serta analisis perdagangan dan *custom data*. Secara substansial, negosiasi diharapkan akan mengeleminasi hambatan tarif dan non tarif dalam perdagangan. Dalam perdagangan jasa, negosiasi diharapkan akan mengeleminasi segala bentuk diskriminasi dan atau upaya diskriminasi baru, ekspansi luas dan jenis liberalisasi jasa, fasilitasi pergerakan pebisnis, dan kerjasama untuk meningkatkan kerjasama dalam efisiensi dan kemampuan berkompetisi.

Kerangka kerjasama AJCEP menyediakan usaha - usaha untuk implemmentasi, termasuk di dalamnya adalah pemberian bantuan teknis untuk membangun *capacity building* bagi anggota ASEAN, perdagangan dan promosi investasi serta memfasilitasi langkah tersebut; dialog kebijakan perdagangan dan investasi dan sektor bisnis; langkah - langkah untuk memfasilitasi mobilitas pengusaha; dan pertukaran dan kompilasi bea tarif dan statistik perdagangan

⁷ Singapura menjadi negara pertama di ASEAN yang menandatangani EPA karena Singapura tidak memiliki produk pertanian sehingga tidak menimbulkan instabilitas politik di dalam negeri Jepang. Sebagaimana kita ketahui, pemerintah Jepang memberikan proteksi dalam sektor pertanian. Hal ini dikarenakan basis pendukung LDP (Partai terbesar di Jepang) adalah petani. Jadi, dengan memberikan proteksi pada petani, diharapkan LDP akan tetap menjadi partai mayoritas di Jepang. (Hadi, 2008)

Gambar 2.4
 "ASEAN+1" sebagai Upaya perluasan Kerjasama di Asia Timur



Sumber: JETRO 2007 dalam White Paper tahun 2007

bilateral. Termasuk di dalamnya program fasilitasi dan kerjasama, termasuk prosedur yang berkaitan dengan perdagangan, lingkungan bisnis, hak kekayaan intelektual, energi, teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan SDM, UKM, pariwisata, transportasi dan logistik, standar dan persesuaian, dan *mutual recogniton arrangements.* (Akrasanee et al, 2003 p.86)

Selain China, faktor India juga mendorong Jepang mempererat hubungan dengan ASEAN. India juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup menjanjikan. Pertumbuhan perekonomian di India lebih bisa diamati daripada China karena kebijakan politik yang lebih terbuka daripada China (Swee - Hock et al, 2005). Oleh karena itu, India menjadi salah satu negara yang hubungan perekonomiannya berkembang secara global dan regional. Pertumbuhan ini juga mendatangkan investor asing yang mendukung reformasi ekonomi di India.

Dalam percaturan politik di Asia Timur, India menjadi negara yang diperhitungkan. Bahkan, ada yang menyejajarkan India dengan China. ASEAN pun melihat India sebagai mitra masa depan. Hal ini dapat dilihat dari semakin eratnya hubungan ASEAN - India yang ditandai dengan *ASEAN - India Summit* pada November 2002. Kemudian dilanjutkan dengan *ASEAN - India Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation* yang ditandatangani pada Oktober 2003. Kerangka kerjasama ini diharapkan akan memperkuat dan meningkatkan kerjasama dalam perdagangan, investasi, dan lain - lain.

Kerangka kerjasama di atas juga melahirkan *Regional Trade and Investmen Area* (RTIA) yang dibentuk sebagai perjanjian perdagangan bebas dalam barang, jasa, investasi; *an early harvest program*; dan kekhususan dan perbedaan untuk *treatment* untuk CLMV (Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam). India juga mengajukan perdagangan bebas dalam bidang pertanian, bioteknologi, pengembangan SDM, dan *agro processing* (Akrasanee, 2003, p.81).

China dan India aktif dalam kerjasama ekonomi dengan Asia Tenggara, terutama setelah China masuk WTO. Ketika konsep ASEAN+3 gagal dan *ASEAN Economic Minister Meeting* (AEM) mengusulkan agar ASEAN menjalin FTA dengan masing – masing negara, China mengambil peran sangat aktif dengan segera menyusun kerangka FTA China – ASEAN. Sedangkan Jepang dibawah

Takeo Hiranuma (menteri METI), mendukung usulan AEM tersebut tetapi tidak mengambil peran aktif. (Munakata, 2006 p.117)

Untuk menghadapi persaingan diatas, pemerintah Jepang pun meluncurkan kebijakan EPA/FTA. EPA didefinisikan sebagai "*Bilateral or multilateral agreement among states to eliminate customs and domestic regulations other import/export regulations, to harmonize economic systems, and to facilitate the free movement of natural persons, goods, and capital within a region.*" Sedangkan FTA didefinisikan sebagai "*An agreement, within a region or states, to reduce or to eliminate tariffs on goods and other barriers on trade in services; a major component of an EPA*". (METI,2005)

Jepang pun kemudian menyegarkan hubungan ekonomi dengan ASEAN dalam kerangka AJCEP dan EPA. EPA yang disusun oleh Jepang dimulai dengan penandatanganan *Japan – Singapore Economic Partnership Agreement* (JS-EPA). Kemudian menyusul penandatanganan EPA dengan Malaysia, Thailand, Filipina, dan Brunei.

2.3 Dinamika Hubungan Jepang – Indonesia

Menurut teori konvensional oleh Walter Samuel (1988), proses pertumbuhan dan pembangunan di negara sedang berkembang terhambat karena rendahnya angka produktivitas dan tingginya tingkat keborosan dan persoalan efisiensi. Jadi, penganut teori ini menganggap bahwa negara – negara maju lebih produktif daripada negara berkembang karena mereka memiliki pekerja – pekerja yang berteknologi tinggi. Selain itu, negara berkembang tidak mampu menandingi negara – negara maju tersebut karena memiliki persoalan kekurangan modal.

Menurut penganut teori ini, ada lima macam pemborosan yang amat menghambat pertumbuhan yaitu pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali; ledakan urbanisasi; pengeluaran militer yang berlebihan; konsumsi barang – barang mewah yang tidak perlu; korupsi para pejabat; dan inefisiensi manajemen.

Untuk mengatasi hal di atas, diperlukan produktivitas yang tinggi. Dan untuk mencapai hal itu, diperlukanlah modal yang besar. Karena negara

berkembang umumnya adalah masyarakat agraris berpendapatan rendah, maka dilakukanlah peminjaman modal dengan cara bantuan ekonomi luar negeri. Bantuan ekonomi menjadi pilihan karena modal yang ada di negara – negara kaya itu diharapkan dapat mengalir ke negara berkembang untuk kemudian menggerakkan perekonomian dan produktifitas.

Penganut teori konvensional mengklasifikasi bantuan luar negeri dalam empat bentuk yaitu bantuan (utang) luar negeri; perdagangan luar negeri; investasi langsung luar negeri; dan bantuan teknis (Samuel, 1992 p.220).

Hubungan Jepang - Indonesia sebenarnya adalah hubungan komplementer dimana Jepang memiliki SDM yang handal dan modal yang besar, tetapi tidak memiliki cukup pasar, tenaga kerja murah, dan bahan mentah. Kebutuhan Jepang tersebut ada di Indonesia. Bahkan Indonesia memiliki kekayaan sumber energi (gas) yang juga sangat diperlukan bagi kehidupan masyarakat dan industri dalam negeri Jepang.

Hubungan yang kentara antara Jepang – Indonesia dapat kita lihat dari kebijakan Jepang dalam pemberian ODA. Sejak tahun 1970-an, Jepang telah menggantikan Amerika sebagai pendonor terbesar di ASEAN. Jepang pun menjadikan Indonesia sebagai target utama ODA.

Pada tahun 1997, ODA untuk Indonesia mencapai 790 juta US\$. Pada tahun tersebut, Jepang mengeluarkan ODA sebesar 497 juta US\$ atau setara dengan 62,8% dari total ODA yang diterima Indonesia. Indonesia adalah negara terbesar kedua yang menerima ODA setelah China. Pada tahun 1998, Jepang di bawah kebijakan Miyazawa Initiative menyediakan 900 juta US\$. (Swee – Hock et al, 2005 p.119)

Tabel 2.1

Data ODA yang diterima Indonesia sejak 1996-2000

Tipe	Jumlah (milyar US\$)
Pinjaman pemerintah	137
Hubah	12
Kerjasama teknis	230

Sumber: MOFA 2006, diolah dari data website MOFA (www.mofa.go.jp)

Kehadiran China juga menjadi faktor penting hubungan Jepang - Indonesia. China yang dianggap sebagai calon negara superpower membuat Indonesia tertarik untuk menjalin kerjasama dengannya. Meskipun ada beberapa kekhawatiran negara – negara di Asia Tenggara dengan kekuatan militer China.

Kehadiran China di Asia Tenggara diharapkan akan membuat kebijakan luar negeri negara – negara ASEAN lebih bebas. Selama ini, dominasi Amerika dan sekutunya (Jepang dan Australia) sangat mempengaruhi konstelasi politik regional. Oleh karena itulah kehadiran China diharapkan akan menjadi penyeimbang.

Di saat yang sama, ASEAN pun kemudian meminta Jepang untuk tidak hanya berperan dalam perekonomian, tetapi juga dalam isu keamanan. Ide ini muncul untuk mengimbangi China yang dominan dalam isu keamanan. Ide ini dilontarkan oleh sekjen departemen luar negeri Filipina, Domingo Siazon. Selain itu, ide ini juga didukung oleh mantan Menteri Luar Negeri Singapura, Wong Kan Seng. Bhuppidar Singh, peneliti *Institute of Defense and Strategic Studies* (IDSS) pun menyatakan, “*recently, more and more ASEAN countries have begun to accept that ASEAN should enhance its cooperation with Japan on politics and security...*”. (Swee – Hock et al, 2005 p.120)

Tetapi, pandangan Mahattir Mohammad mengenai kehadiran China di Asia Tenggara menjadi referensi bagi kebijakan anggota ASEAN dimana Mahattir menganggap bahwa China akan menjadi tantangan bagi perekonomian ASEAN. Hal ini dikarenakan China memiliki produk yang murah yang akan membanjiri pasar ASEAN. Dampak terburuknya adalah ambruknya pabrik – pabrik lokal. Oleh karena itu, beberapa negara justru menganggap Jepang yang layak menjadi pemimpin ekonomi bagi Asia, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bhubhinder Singh, peneliti IDSS;

Despite ASEAN’s severe criticisms of Japan’s role during the economic crisis, ASEAN countries perceive Japan as an important economic partner. ASEAN countries realize the need for economic presence of Japan in the region, not only to help revive their ailing economies, but also to help restore their previously dynamic growth rates. (Swee – Hock et al, 2005 p.120)

Bagi Indonesia sendiri, kehadiran China belumlah banyak memberikan implikasi perekonomian. Pada tahun 2003, ekspor Indonesia ke Jepang sebesar 21%, dengan impor sebesar 14%. Pada tahun yang sama, ekspor Indonesia ke China hanya 5,1%. Hal ini menunjukkan hubungan perdagangan dengan China tidaklah seerat hubungan ekonomi dengan Jepang. (Munakata, 2006)

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melihat Jepang sebagai mitra yang penting karena didasari oleh kondisi saat ini (fakta hubungan ekonomi), pengalaman hubungan Indonesia – Jepang di masa lalu, dan peran Jepang dalam perekonomian Asia Tenggara. Mempererat hubungan perekonomian dengan Jepang menjadi pilihan penting bagi pemerintah Indonesia untuk mengembangkan perekonomian.

Kerangka pembangunan Indonesia mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), terdapat 3 (tiga) Agenda Pembangunan Nasional tahun 2004–2009, yakni (1) menciptakan Indonesia yang aman dan damai; (2) mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis; dan (3) meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia memiliki 5 (lima) sasaran pokok, meliputi menurunnya penduduk miskin melalui penciptaan lapangan kerja secara memadai yang mampu mengurangi pengangguran terbuka; berkurangnya kesenjangan pendapatan terutama di daerah pedesaan dan daerah-daerah terbelakang; meningkatnya kualitas manusia; membaiknya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam; serta meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang pembangunan. (Renstra Depdag, 2004)

Departemen Perdagangan juga menyatakan bahwa perdagangan internasional Indonesia menurun dikarenakan daya saing yang rendah, minimnya investasi dan infrastruktur yang kurang memadai. Jalan keluar yang tepat adalah meningkatkan daya saing produk, diversifikasi pasar, penyederhanaan prosedur, dan meningkatkan sistem distribusi yang efektif dan efisien. (Renstra Depdag, 2004 p.30)

JI-EPA menjadi pilihan rasional bagi pemerintah Indonesia karena selama ini Jepang telah memainkan peranan penting bagi pembangunan di Indonesia. Setelah krisis 1997-1998, pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar Jepang

kembali menjadi investor sebagaimana sebelum krisis. Hal ini dilakukan dengan berbagai kunjungan presiden Megawati maupun SBY ke Jepang untuk mengundang para pengusaha Jepang ke Indonesia. Kepercayaan pemerintah Indonesia ini juga ditandai dengan fasilitasi oleh pemerintah Indonesia berupa UU Penanaman Modal Asing, UU Perburuhan dan UU Pajak dan Bea Cukai.

JI-EPA juga dilihat sebagai upaya pemerintah Indonesia untuk memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pasar Jepang. Ekspor Indonesia ke Jepang mencapai 21 %. Sedangkan di saat yang sama, pesaing Indonesia di Asia Tenggara seperti Thailand, Malaysia, Filipina, Singapura dan Brunei telah menandatangani EPA. Kalau kemudian Indonesia tidak menandatangani EPA, maka Indonesia tidak akan mendapatkan keuntungan dari turunnya tarif impor. Dengan demikian, maka produk Indonesia akan menjadi sangat mahal dan kalah bersaing dengan produk negara lain.

2. 4 Ringkasan isi JI-EPA

JI-EPA adalah perjanjian yang ditandatangani oleh Jepang dan Indonesia pada Agustus 2007 di Jakarta. Perjanjian ini merupakan kerangka kerjasama ekonomi yang paling lengkap antara kedua negara.

Dalam EPA, terdapat 13 cakupan, yaitu:

1. *Trade in Goods* (Perdagangan Barang)
2. *Trade in Services* (Perdagangan Jasa)
3. *Customs* (Kepabeanan)
4. *Rules of Origin* (Aturan Asal Barang)
5. *Investment* (Investasi)
6. *Improvement of Business Confidence* (Peningkatan Kepercayaan Bisnis)
7. *Movement of Natural Persons* (Ketenaga-kerjaan)
8. *Energy and Mineral Resources* (Energi & Sumber Daya Mineral)
9. *Intellectual Property Rights* (Hak Kekayaan Intellektual)
10. *Competition Policy* (Kebijakan Persaingan Usaha)
11. *Technical Cooperation and Capacity Building* (Kerjasama Tehnis & Peningkatan Kapasitas)

12. *General provisions* (Ketentuan Umum)

13. *Government Procurement* (Pembelian Pemerintah)

Secara ringkas, JI-EPA merupakan kerjasama perdagangan yang mencakup tidak hanya liberalisasi, namun juga sektor lainnya, antara lain jasa, investasi, energi dan sebagainya, yang tercakup dalam tiga pilar utama yaitu:

b. Fasilitasi Perdagangan dan investasi :

- Upaya bersama untuk memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan tingkat kepercayaan bagi investor Jepang;
- Kerjasama di bidang prosedur kepabeanan, pelabuhan dan jasa-jasa perdagangan, HKI, dan sebagainya.

b. Liberalisasi: menghapuskan atau mengurangi hambatan perdagangan dan investasi (bea masuk, memberi kepastian hukum);

c. Kerjasama: kesepakatan untuk kerjasama dalam meningkatkan kapasitas Indonesia sehingga lebih mampu bersaing dan memanfaatkan secara optimal peluang pasar dari EPA.

JI-EPA didesain oleh Jepang untuk tetap mempertahankan Jepang sebagai negara yang paling berpengaruh di Asia Tenggara. Kebijakan Jepang dalam EPA juga dipengaruhi oleh kebijakan China yang menjalin hubungan lebih erat dengan ASEAN dengan adanya perjanjian perdagangan bebas.

Format EPA yang menjalin kerjasama dengan masing- masing anggota ASEAN diharapkan akan menjadi model kerjasama yang lebih menarik daripada yang ditawarkan oleh China. Jepang ingin menjalin kerjasama dengan Indonesia sesuai dengan potensi Indonesia dan Jepang. Jadi, dalam model EPA, kedua negara dapat negosiasi mengenai kebutuhan kedua belah pihak.

Indonesia pun menandatangani EPA sebagai bagian dari mengembalikan Jepang sebagai investor utama bagi Indonesia. Sejak krisis 1997/1998, Jepang yang semula merupakan investor utama bagi Indonesia, mulai mengurangi investasinya. Hal ini menimbulkan banyak kondisi yang kurang menguntungkan bagi Indonesia seperti pengangguran, menurunnya pendapatan masyarakat, dan sebagainya.

Gambar 2.5
Ringkasan Isi JI-EPA



Sumber: Diolah dari berbagai sumber

BAB 3

KEPENTINGAN EKONOMI POLITIK JEPANG DALAM JAPAN - INDONESIA ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (JI-EPA)

Dalam bab ini akan dibahas mengenai alasan Jepang menandatangani JI-EPA. Penulis mencoba mengidentifikasi kepentingan dalam perjanjian ini. Bab ini sangat penting bagi pembaca untuk mengetahui isi dari JI-EPA itu sendiri. Jadi, pembaca bisa menarik benang merah mengapa pasal – pasal mengenai energi, penurunan tarif dan sebagainya masuk dalam isi perjanjian.

3.1 Menjaga stabilitas perekonomian Kawasan dan Jepang

Salah satu agenda kebijakan perekonomian luar negeri Jepang adalah menjaga stabilitas perekonomian dunia yang diwujudkan dalam stabilitas perekonomian kawasan. Kalau kemudian perekonomian stabil, maka perekonomian Jepang pun akan menjadi stabil pula. Stabilitas regional yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian Jepang adalah stabilitas Asia Timur.

Ketika terjadi krisis ekonomi tahun 1997-1998, Jepang berperan sangat aktif untuk memberikan bantuan kepada negara – negara Asia Tenggara. Setidaknya ada tiga alasan mengenai tindakan Jepang ini, yaitu (1) adanya ketakutan krisis di Asia ini dapat menyebar, (2) kalau banyak negara mengalami krisis, maka IMF tidak akan memiliki cukup dana untuk membantu negara – negara di Asia, dan (3) negara – negara Asia yang terkena krisis lebih berfokus pada politik dan ekonomi domestik, padahal Jepang memiliki kepentingan besar terhadap stabilitas perekonomian kawasan. (Hadi & Darmastuti, 2005)

3.1.1 Asia Timur Sebagai *Home Base* Perekonomian Jepang

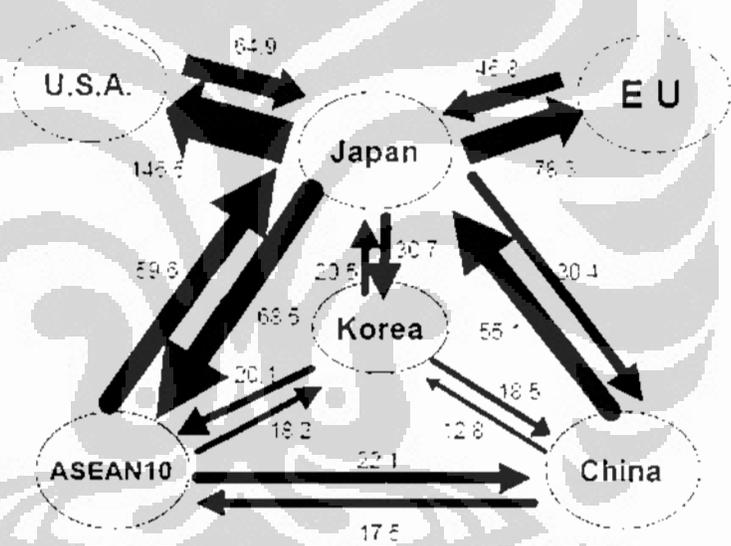
Menurut Ryokichi (2003) Asia Timur⁸ merupakan kawasan yang merupakan *home base* bagi perekonomian Jepang sejak tahun 1980-an. Hal ini

⁸ Secara geografik, apa yang disebut sebagai kawasan Asia Timur adalah negara yang pernah termasuk dalam lingkungan Asia Timur Jauh. Namun dalam perkembangannya, batas negara mana saja yang termasuk Asia Timur menjadi kabur. Hal ini terutama setelah muncul gagasan untuk membentuk East Asia Community (EAC) atau "Masyarakat Asia Timur".

Dalam perspektif Jepang, yang termasuk dalam EAC adalah negara – negara yang dianggap memiliki kepentingan politik dan ekonomi dan berperan aktif secara terus menerus di

ditandai dengan berkembangnya jaringan bisnis dan industri di kawasan Asia Timur. Sebagai contoh kehadiran Jepang di Asia Tenggara juga menjadi salahsatu faktor tumbuhnya perdagangan diantara negara – negara ASEAN. Pertumbuhan perdagangan antar negara ASEAN dikarenakan *Multi National Corporations* (MNC) Jepang mengembangkan kebijakan produksi yang berbasis potensi tiap negara. Jadi, antar MNC Jepang membuat jaringan perdagangan sesuai dengan kebutuhan produksi MNC Jepang. Hasilnya selama periode 1981 - 1992, negara - negara Asia Timur mengalami kenaikan ekspor dari 35,7% menjadi 46,8%. (Akrasanee et al, 2003 p.129)

Gambar 3.1
Hubungan Ekonomi Jepang dengan Patner



Ket: Angka menunjukkan nilai perdagangan (dalam juta USD)

Sumber: METI 2002, dalam White Paper

kawasan tersebut. Jadi,perpektif ini bukan semata - mata karena pertimbangan geografik,tetapi juga pertimbangan strategik. Oleh karena itu,Jepang selalu berusaha untuk memasukkan AS dalam EAC.

Perpektif Jepang tersebut berbeda dengan negara - negara ASEAN yang memandang bahwa AS tidak masuk dalam EAC. Negara - negara ASEAN justru melihat Rusia sebagai bagian dari EAC karena secara geografik, Rusia memiliki wilayah yang luas di Asia Timur. Bahkan, Rusia masih menduduki beberapa pulau di sebelah utara Jepang. Namun secara umum, pengertian Asia Timur saat ini diartikan sebagai wilayah yang meliputi seluruh Asia Tenggara, Asia Timur, Australia, Selandia Baru yang tercakup dalam wilayah yang merupakan bagian dari Asia - Pasifik. (Abdul Irsan : 2007)

Ketika Jepang mendorong integrasi perekonomian di Asia Tenggara, perusahaan – perusahaan Jepang telah menanamkan investasinya di negara – negara ASEAN. Integrasi ekonomi ASEAN diharapkan akan mendorong volume ekspor antar negara ASEAN sehingga menghasilkan keuntungan yang besar bagi perusahaan – perusahaan Jepang (Munakata, 2006, p.146).

Asia Tenggara adalah wilayah yang strategis bagi Jepang. Sebagai sebuah kawasan yang memiliki keamanan relatif stabil, SDA melimpah, dan jumlah penduduk yang besar, Asia Tenggara merupakan mitra yang penting bagi perekonomian Jepang.

Fase awal hubungan Jepang dengan Asia Tenggara dimulai dengan perbaikan hubungan yang dimulai dengan hubungan ekonomi. Hubungan ini dilakukan dengan pemulihan pasca perang dan hubungan perdagangan dimana Jepang menggunakan uang pemulihan hubungan untuk memproduksi barang dan mencari bahan mentah, termasuk minyak, di Asia Tenggara. Pada akhir 1960-an sampai awal 1970-an setelah Asia Tenggara menjadi pasar untuk produk Jepang dan menjadi penyuplai bahan mentah, Jepang kemudian mulai berinvestasi di Asia Tenggara dengan memproduksi barang – barang tersebut di level lokal.

Perang Vietnam telah membuat AS dituntut untuk memberikan perhatian lebih kepada Asia Tenggara. Apalagi, pada saat itu penyuaran mengenai teori domino sedang nyaring. Oleh karena itulah, AS kemudian menuntut Jepang untuk mengambil peran yang lebih besar di Asia Tenggara. Jepang kemudian mengadakan Konferensi untuk Pengembangan Ekonomi di Asia Tenggara (*Conference for Development of Southeast Asia*) di Tokyo pada tahun 1966 dengan tujuan untuk mengusulkan rencana pembangunan Asia yang diajukan oleh Presiden AS Lyndon Johnson. Pada akhir tahun 1960-an, Jepang juga menjadi tuan rumah untuk *Consultative Group of Indonesia* (CGI) dengan tujuan untuk mengubah pemerintahan yang pro Komunis yang dipimpin Soekarno kepada pemerintahan Soeharto.

Pada akhir tahun 1970-an, PM Ohira mengusulkan dibentuknya *Pacific Economic Community* (PEC). Usulan ini seiring dengan sedang bergaungnya isu pembentukan masyarakat ekonomi eropa atau *European Economic Community*

(EEC). Usulan ini juga sebagai ambisi Jepang untuk memimpin perekonomian di Asia, sebagaimana yang terdapat dalam teori *flying- geese*. Semua negara di Asia Timur, termasuk Negara Industri Baru (NIEs) seperti Korea Utara, dan anggota ASEAN diharapkan untuk mengikuti langkah yang diambil Jepang sebagai strategi nasionalnya seperti memulai untuk ekspansi industri ringan dan ekspor, sebelum menjadi negara yang merelokasi industri tingkat tinggi.

Berkaitan dengan PEC ini, ASEAN terbagi menjadi dua. Singapura dan Thailand menyambut baik usulan ini dan mendukung, sedangkan Indonesia, Malaysia dan Filipina menentang dengan alasan kekhawatiran perekonomian akan didominasi oleh Jepang dan Amerika. Indonesia dan Malaysia berfokus pada *non-aligned policy* mungkin dapat diterima pada saat itu, tetapi kenyataannya ide ini kemudian terwujud secara tidak langsung dengan makin terintegrasinya ekonomi dan saling ketergantungan di negara – negara Asia Timur, terutama dalam perdagangan dan industri yang saling melengkapi yang kemudian membuat *Foreign Direct Investment* (FDI) Jepang makin bertambah di wilayah ASEAN maupun di Asia secara umum. (Akranee et al, 2003 p.8)

Selama era 1960-1970, Jepang juga mulai merumuskan kebijakan ODA bagi ASEAN, sekaligus berkomitmen untuk menjadikan ASEAN sebagai fokus dari ODA Jepang. Jepang memberikan bantuan kepada negara – negara di Asia Tenggara karena takut efek domino dari komunis. Jepang juga didorong oleh Amerika untuk berperan lebih besar di Asia Tenggara karena pada waktu itu Amerika masih mencurahkan perhatiannya kepada Korea.

Jepang berusaha menjalin hubungan dengan Asia Tenggara dengan konsep “cooperative trinity” yang terdiri dari perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi yang diarahkan oleh METI sebagai model ODA Jepang.

Kerjasama Jepang dengan Asia Tenggara oleh sebagian pengamat dianggap sebagai upaya Jepang menjadikan Asia Tenggara sebagai pasar bagi produk Jepang dan sumber bahan baku. Awal tahun 1970-an ada istilah “resources nationalism” yang bertumbuh di Amerika Latin, dan Asia Timur sebagai reaksi dari cepatnya pertumbuhan industri Jepang, Eropa Barat, dan anggota OECD yang lain sehingga menimbulkan adanya kenaikan yang cepat pula terhadap sumberdaya alam. Selain itu, kondisi perekonomian dunia juga diguncang dengan

dua kali krisis minyak yaitu pada tahun 1973-1974 dan 1979-1980. Kondisi ini disikapi industri Jepang dengan adanya inovasi tenaga kerja, memperbaiki teknologi dan mengalirkan modal ke ASEAN dan Asia Timur dimana tenaga buruh murah, efisien dan meluasnya pasar. (Araki, 2007)

Asia Tenggara yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi Jepang yang berkembang sangat pesat pada waktu itu merasa dimanfaatkan oleh perkembangan perekonomian dalam negeri Jepang. Kerjasama negara – negara Asia Tenggara dengan Jepang dipandang sebagai upaya Jepang untuk memperbaiki perekonomian Jepang, dan mengabaikan perekonomian negara – negara Asia Tenggara. Oleh karena itu, ada istilah sentimen yang dilekatkan pada Jepang, yaitu “economic animal” dimana Jepang dianggap sebagai negara yang hanya mengejar keuntungan ekonomi saja, tanpa memperdulikan sosial (Araki, 2007)

Maka keluarlah Fukuda Doctrine, yang isinya sebagai berikut;

First, Japan, a nation committed to peace, rejects the role of military power and on that basis is resolved to contribute to the peace and prosperity of southeast Asia and of the world community.

Second, Japan, as a true friend of the countries of Southeast Asia, will do its best for consolidating the relationship of mutual confidence and trust based on "heart - to - heart" understanding with these countries—in wide-ranging fields covering not only political and economic areas but also social and cultural areas.

Third, Japan will be an equal partner of ASEAN and its member countries and cooperate positively with them in their efforts to strengthen their solidarity and resilience, together with other nations of the like mind outside the region, while aiming at fostering a relationship based on mutual understanding with the nations of indochina, and will thus contribute to the building of peace and prosperity throughout Southeast Asia (Akrasanee, Narongchai et al, 2003 p.22).

Kemudian dibuatlah konsep ODA Jepang. Hal ini dilakukan agar negara penerima ODA tidak merasa sebagai pihak yang dimanfaatkan untuk pengembangan perekonomian Jepang, tetapi juga aktor yang turut berperan dalam pemanfaatan ODA untuk kemakmuran bangsanya.

3.1.2. Kerjasama Bilateral sebagai Pilihan

Ji-EPA adalah bagian dari usaha Jepang untuk menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara, terutama setelah China menjadi pemain yang begitu aktif dalam kerjasama regional. Stabilitas kawasan menjadi penting bagi Jepang untuk tetap mempertahankan jaringan bisnis dan industrinya di Asia Tenggara. Untuk menjaga kondisi ini, maka perlu adanya integrasi kawasan Asia Timur yang diwujudkan dengan liberalisasi perdagangan dan investasi, meningkatkan kompetisi pasar dan kerjasama ekonomi. Salahsatu kerjasama yang harus dibentuk adalah FTA untuk menghadapi globalisasi ekonomi. (Hadi & Darmastuti, 2005)

Kerjasama bilateral dipilih karena kerjasama multilateral seperti WTO membutuhkan waktu yang cukup panjang. Permasalahan terbesar WTO adalah bagaimana WTO bisa mengikuti pergerakan globalisasi dan perkembangan teknologi yang berjalan begitu cepat dalam mempromosikan liberalisasi perdagangan dan menanggapi isu – isu yang muncul. Anggota WTO sekarang 148 negara sehingga sulit sekali mencapai kesepakatan. Oleh karena itulah kemudian bermunculan kerjasama multilateral baru seperti NAFTA dan AFTA atau kerjasama FTA seperti yang dilakukan Singapura dengan Jepang dan Singapura dengan Amerika (Munakata, 2006 p.16-7).

Tabel 3.1

Tabel Negosiasi Multilateral WTO

Tahun	Negosiasi	tahun ke-	jumlah negara partisipan
1947	Putaran I	1	23
1949	Putaran II	1	13
1951	Putaran III	1	38
1956	Putaran IV	1	26
1960-1961	Putaran Dillon	2	26
1964-1967	Putaran Kennedy	4	62
1973-1979	Putaran Tokyo	7	102
1986-1994	Putaran Uruguay	9	123
2001-sekarang	Doha Development Agenda	7+	150

Keterangan:

Dalam tabel menunjukkan semakin banyak negara, semakin lama perundingan

Sumber: White Paper JETRO 2007

Ji-EPA adalah kerangka kerjasama yang membuat Indonesia dan Jepang membicarakan isu secara bilateral. Kerangka ini dianggap lebih menarik daripada kerangka kerjasama yang ditawarkan oleh China. Setelah penandatanganan JS-EPA, Menteri Industri dan Perdagangan Singapura, Geo Yeo menyatakan bahwa kerjasama Asia Tenggara dengan Jepang lebih menguntungkan daripada kerjasama Asia Tenggara dengan China. Hubungan Jepang dengan negara – negara ASEAN dianggap lebih komplementer (Munakata, 2006 p.122).

Sebelumnya, skema ASEAN+3 gagal karena ASEAN hanya akan menjadi ajang eksploitasi bagi negara Jepang, Korea dan China. Menurut Yeo Geo, jika ASEAN+3 diwujudkan, maka yang terjadi sebenarnya adalah 3+10, bukan 10+3 karena perekonomian Jepang, China dan Korea lebih besar daripada perekonomian anggota ASEAN. Kalau kemudian dilakukan kerjasam FTA dengan masing – masing negara (Jepang, China, dan Korea), maka anggota ASEAN akan lebih bisa mengambil manfaat karena bisa membandingkan kerjasama mana yang lebih menguntungkan (Munakata, 2006 p.122).

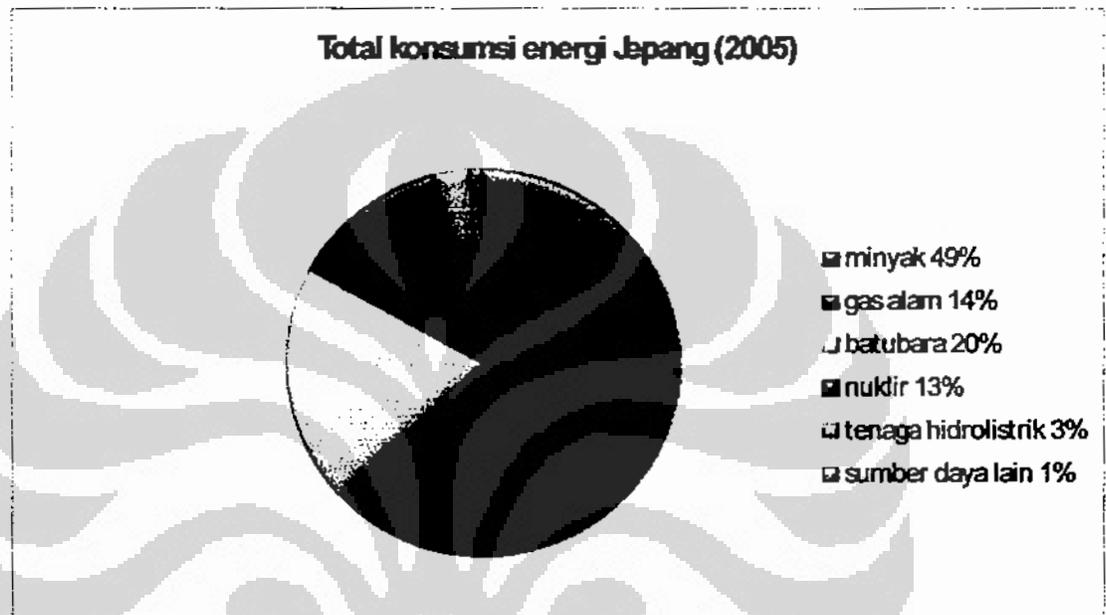
Fakta di atas juga dapat menimbulkan pertanyaan baru, apakah ASEAN ingin adanya kompetisi antara Jepang, China, dan Korea. Selama ini ASEAN adalah organisasi regional yang stabil dan memiliki pasar potensial yang cukup besar. Pertumbuhan GDP negara – negara ASEAN pun terus meningkat dari tahun 2004. Pada tahun 2007, ASEAN memberikan kontribusi 5% pada perekonomian dunia dengan pertumbuhan 6,4 % ketika rata – rata pertumbuhan dunia 4,9%. Ini menunjukkan ASEAN sebagai kawasan yang potensial dan memiliki pengaruh yang besar dalam perekonomian (JETRO,2008 p.17).

III.2. Pemenuhan Kebutuhan Energi

Jepang adalah negara industri yang membutuhkan sumber energi sangat besar. Sebagian besar energi tersebut didapatkan dengan impor. Sebagai negara yang tidak memiliki cadangan minyak mentah dan sedikit memproduksi gas, Jepang menjadi negara pengimpor terbesar kedua dalam minyak dan menjadi pengimpor gas terbesar. Meskipun sumber energi nuklir dimasukkan, Jepang pun sebenarnya masih hanya mampu memenuhi 16% dari total kebutuhan energinya.

Padahal, Jepang adalah salah satu negara eksportir peralatan di sektor energi dan perusahaan Jepang memiliki keahlian teknik, konstruksi dan manajemen untuk proyek – proyek besar di bidang energi.

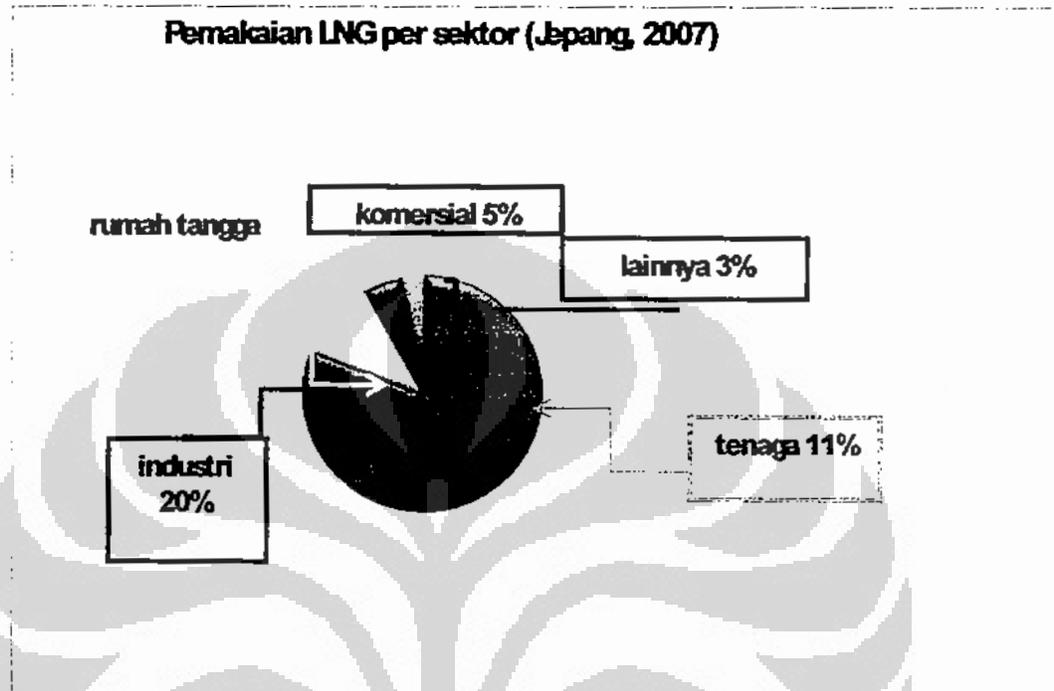
Gambar 3.2



Sumber : EIA Internasional Energi 2005

Jepang adalah negara pengimpor gas terbesar di dunia. Jumlah impor gas Jepang pada tahun 2006 mencapai 3135 trilyun kaki kubik. Jumlah ini jauh di atas negara industri yang lain seperti Korea Selatan yang hanya 1162 trilyun kaki kubik, atau Amerika yang hanya 584 trilyun kaki kubik. Gas yang diimpor oleh Jepang digunakan untuk kepentingan industri (20%), sumber tenaga (61%), rumah tangga (11%), komersial (5%) dan lain – lain (3%).

Gambar 3.3



Cadangan gas Jepang sendiri terus menurun sebagaimana yang ditulis dalam *Oil and Gas Journal (OIG)* yang menyatakan bahwa cadangan gas Jepang hanya 738 trilyun kaki kubik. Produksinya pun turun dari 174 pada tahun 2006 menjadi 132 pada tahun 2007. Padahal, kebutuhan gas diprediksi akan terus meningkat seiring dengan kepedulian Jepang pada isu lingkungan sehingga Jepang membutuhkan lebih banyak negara patner untuk memenuhi kebutuhan energi. Minyak sendiri sudah mulai menurun sejak tahun 1970an dan bisa digantikan dengan batubara. Jepang pun mengembangkan energi nuklir untuk mengurangi ketergantungannya pada minyak.

Jepang adalah importir LNG terbesar pada tahun 2006 yaitu 3,1 Trilyun kaki kubik, atau naik dari 2,8 pada tahun 2004 dan 2005. Jepang telah mengoperasikan 24 terminal impor. Terminal biasanya terletak di dekat populasi penduduk karena Jepang tidak memiliki pipa yang menghubungkan antar wilayah dengan alasan geografis.

Untuk pemenuhan kebutuhan energi gas, Jepang memiliki perusahaan Inpex yang dulunya adalah perusahaan minyak di Jepang. Selain itu, ada

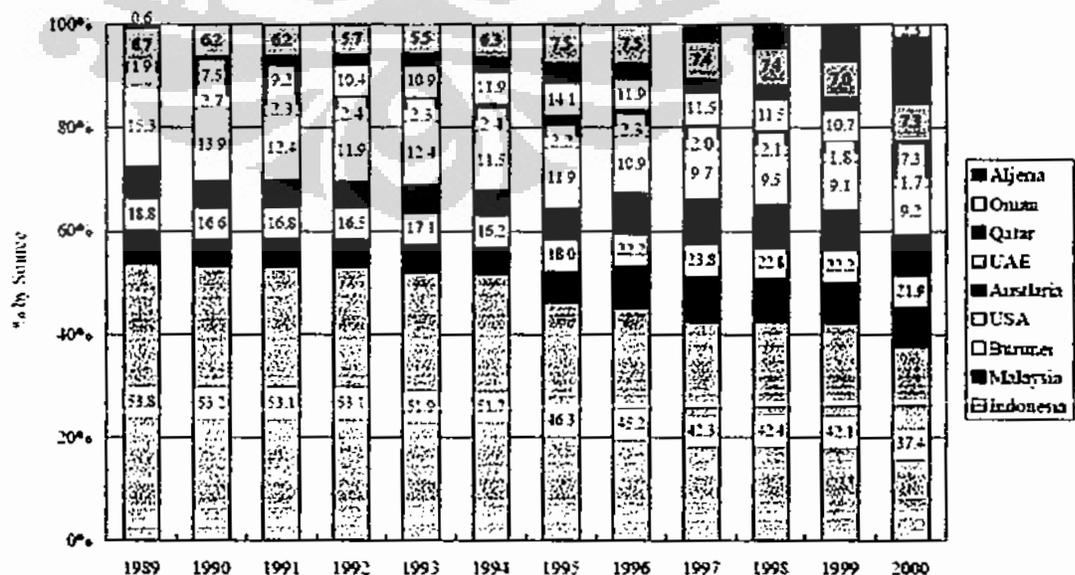
Mitsubishi dan Mitsui yang secara aktif mengeksplorasi dan memproduksi gas, terutama dari luar negeri. Sedangkan perusahaan ritel gas terbesar adalah Osaka Gas, TokyoGas, dan Toho Gas.

Untuk pemenuhan kebutuhan gas, Jepang memiliki sumber impor yang jauh lebih luas daripada dalam persoalan minyak yang hanya bertumpu pada negara – negara Timur Tengah. Yang terbesar adalah Indonesia, Australia, dan Malaysia. Sedangkan sumber yang lain relatif lebih kecil. (US Energy Information Administration, 2007).

Yang sering menjadi persoalan bagi Jepang adalah persaingan dengan China, Taiwan dan Korea untuk mendapatkan gas dari negara pengekspor. Dalam tabel 3.1 dan Gambar 3.3 terlihat bagaimana peran Indonesia yang sangat besar dalam suplai kebutuhan energi, terutama gas di Asia Timur.

Pemerintah Jepang telah mempersiapkan skema pemenuhan kebutuhan gas dengan mendorong perusahaan Jepang aktif menanamkan investasinya di negara – negara produsen. Sebagai contoh Inpex yang beroperasi di Australia, Mitsubishi dan Mitsui yang beroperasi di Rusia, dan sebagainya. Perusahaan – perusahaan ini dibantu oleh pemerintah Jepang untuk mendapatkan kontrak kerjasama dengan pemerintah lokal sehingga memiliki kontrak jangka panjang.

Gambar 3.4
Gambar Sumber Impor LNG di Asia Timur



Sumber: IIEJ 2002

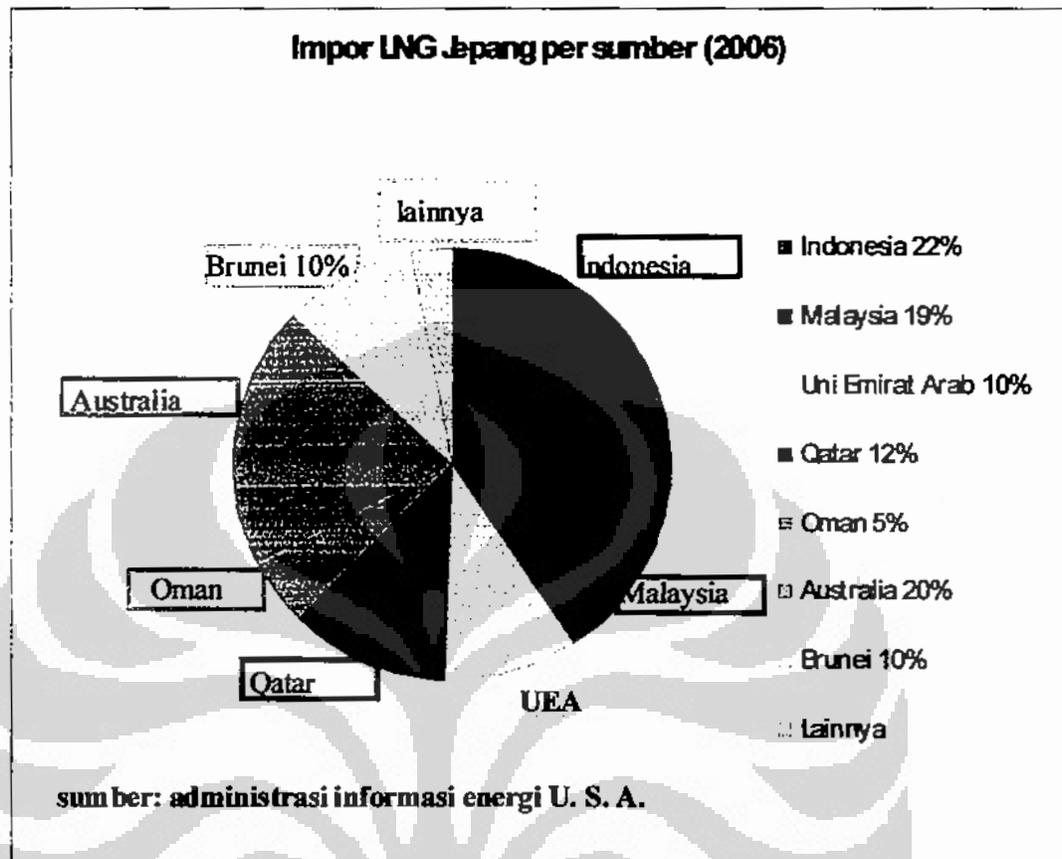
Tabel 3.2
Sumber Impor LNG di Asia Timur (Jepang, Korea, dan Taiwan)

Tahun	Indonesia	Malaysia	Brunei	USA	Australia	UEA	Qatar	Oman	Algeria	Total
1989	24.9	8.7	71	1.3	0.9	3.1			0.3	45.3
1990	27.6	8.6	72	1.4	3.9	3.2				51.9
1991	30	9.5	7	1.3	5.2	3.5				56.5
1992	31.6	9.9	7.1	1.4	6.2	3.4				59.5
1993	31.9	10.5	76	1.4	6.7	3.4				61.5
1994	35.1	11	78	1.6	9.1	4.3				67.9
1995	33.2	12.9	85	1.6	10.1	5.4				71.7
1996	36	17.7	87	1.8	9.5	6				79.7
1997	35.7	20.1	82	1.7	9.7	6.2	2.7			84.3
1998	36.1	19.4	81	1.9	9.78	6.3	3.7			85.16
1999	38.81	20.47	8.41	1.65	9.88	6.48	6.57			92.27
2000	35.7	20.88	8.79	1.65	6.93	6.93	12.28	2.23		95.39

Ket: Satuan dalam juta kubik meter

Sumber: IIEJ 2002

Gambar 3.5



Selama ini, Indonesia merupakan produsen gas terbesar di Asia Pasifik. Indonesia memiliki cadangan gas alam 90 triliun kubik dan menjadi negara ke-13 terbesar di dunia. Potensi ini sesuai dengan kondisi Jepang yang memang membutuhkan energi cukup besar. Jepang adalah negara pengimpor LNG terbesar

Tabel 3.3

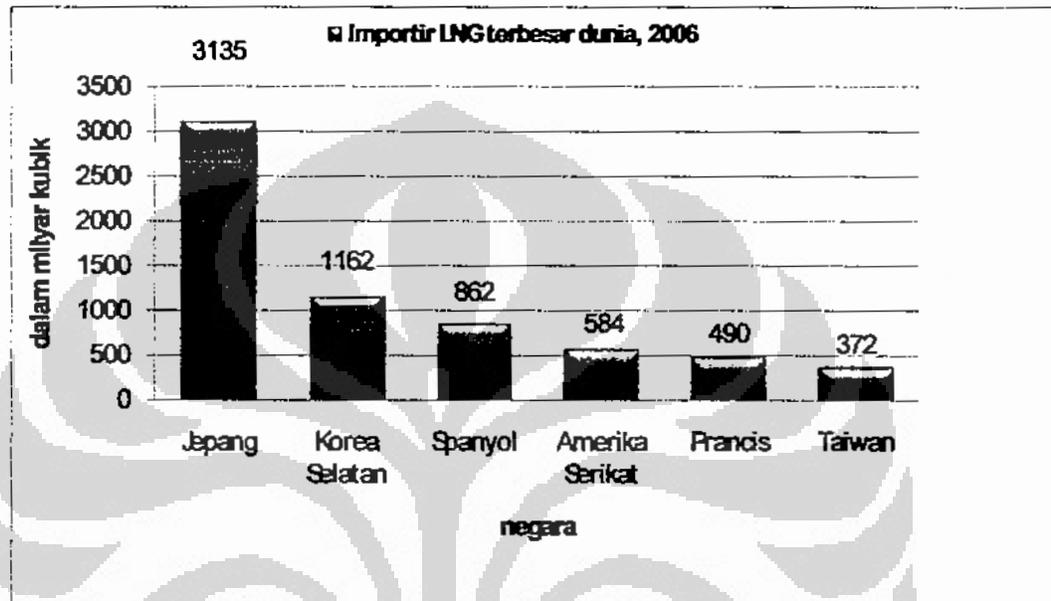
**Tabel Cadangan Energi
(Tahun 2004)**

Jenis Energi	Unit	Jumlah	Cadangan/ Rasio Cadangan
Minyak	Milyar Barel	4.72	11.5
Gas	Trilyun kaki kubik	94.70	34.9
Batubara	Juta ton	4.968.00	38.0
Antrasit	Juta ton	4.228.00	

Sumber: Data Statistik BP 2005, Migas

di dunia. Dari tabel dapat kita lihat, Jepang menjadi pengiimpor terbesar pada tahun 2006 dengan 3135 juta kubik kaki. Nilai ini cukup tinggi karena Jepang hanya bisa memproduksi tidak lebih dari 500 juta kubik kaki. (ADB, 2008)

Gambar 3.6



Sumber: US Energy Information tahun 2007

Dalam JI-EPA, Jepang menginginkan agar Indonesia memberikan akses penanaman investasi Jepang dalam bidang energi, terutama gas. Sebenarnya perusahaan – perusahaan Jepang (Inpex dan Mitsubishi) telah lama beroperasi di Indonesia. Sebagai contoh di Blok Masela, Ladang Abadi, Laut Timor, Inpex telah beroperasi dengan penguasaan total 100%. Ladang abadi memiliki cadangan gas 10 trilyun kaki kubik dan diharapkan dapat memproduksi 150-250 juta kaki kubik pertahun yang diutamakan memenuhi kebutuhan Jepang mulai tahun 2014 – 2016.

Mitsubishi juga mendapatkan kontrak dengan Pertamina pada tahun 2007 dengan memegang saham 51% di blok Senoro, Sulawesi yang memiliki cadangan gas 1,53 trilyun kaki kubik. Blok Mahakam dan Unit Ataka, di Kalimantan juga sedang diproses oleh Inpex.

Dengan kebutuhan gas yang demikian besar, Jepang berlomba dengan negara besar yang lain untuk mendapatkan sumber energi ini. Selain itu, Indonesia

juga mulai menyadari potensi gas yang dimiliki dengan kondisi kebutuhan gas di dalam negeri Indonesia juga terus meningkat. Hal ini membuat pemerintah Jepang membutuhkan kepastian pasokan gas dari Indonesia. Jepang harus bersaing dengan China dan Korea Selatan untuk mendapatkan gas dari Indonesia.

Dalam kunjungan presiden SBY tahun 2006, PM Abe meminta kepastian pasokan gas dari Indonesia. Kepastian itu diminta karena Indonesia merupakan eksportir gas terbesar untuk keperluan industri Jepang. Tahun 2005, Indonesia memasok 24 persen kebutuhan gas bagi Jepang disusul kemudian di urutan kedua Malaysia dengan pasokan 23 persen. Enam perusahaan Jepang saat ini tengah dalam upaya negosiasi untuk memperbarui kontrak perdagangan dengan PT Pertamina yang mengindikasikan akan mengurangi jumlah ekspor gas ke luar negeri karena kebutuhan industri di Indonesia yang meningkat. (Kompas, 27/11/2006)

Dalam kunjungan ke Jepang menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro mengemukakan, Indonesia ingin memetik keuntungan jika memutuskan untuk melanjutkan penjualan gas ke Jepang. Keuntungan yang diharapkan dapat ditukar dengan gas adalah masuknya investasi langsung Jepang ke Indonesia. Untuk kelanjutan penjualan gas ke Jepang setelah kontraknya berakhir 2010-2011, Direktur Pertamina Ari Sumarno mengemukakan ada enam perusahaan Jepang yang tengah melakukan negosiasi dengan Pertamina. Lima dari enam perusahaan itu adalah Tokyo Gas, Osaka Gas, Tohoku Gas, Kenzai Gas, dan Kyoso Power Electric (Kompas, 28/11/2008).

Selama ini pasokan LNG ke Jepang berasal dari kilang Arun (Aceh) dan Bontang (Kalimantan Timur). Indonesia-Jepang saat ini memiliki kontrak jangka panjang dalam jangka waktu sepuluh tahun sebanyak 25 juta ton. Terdiri dari tiga juta ton per tahun untuk waktu lima tahun pertama dan dua juta ton per tahun selama lima tahun berikutnya. Setiap tahunnya diperlukan juga negosiasi ulang mengenai harga sesuai dengan perkembangan situasi harga LNG di pasaran dunia.

Tarik ulur mengenai pasokan gas Indonesia ke Jepang telah berlangsung lama, mengingat kontrak pasokan gas Indonesia ke Jepang akan berakhir pada

tahun 2010. Dalam penandatanganan JI-EPA⁹, Jepang meminta Indonesia memasok gas sebanyak 12 juta ton, tetapi Indonesia menyanggupi 3 juta ton. Selain itu, pemerintah Indonesia akan memasok gas jika Jepang menanamkan investasinya di Indonesia (Kompas, 20/08/2007).

3.3 Meningkatkan Volume Perdagangan

Salah satu kepentingan Jepang atas Indonesia adalah memperluas pasar bagi produk – produk Jepang. Selama ini, Indonesia menjadi salah satu tujuan ekspor bagi produk – produk Jepang.

Sebagai negara industri, Jepang membutuhkan pasar yang luas untuk produk – produknya. Kalau kita bandingkan, volume perdagangan Jepang dan Indonesia masih di bawah Jepang dengan negara lain di Asia Tenggara seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia. Total ekspor Jepang ke Indonesia masih dibawah Singapura, Thailand, Malaysia dan Filipina. Impor dari Indonesia pun berjumlah besar karena faktor minyak dan gas. Sedangkan kerjasama dalam sektor lain masih belum dikembangkan dengan baik. Padahal, Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara. Jumlah kelas menengah di Indonesia pun nomer dua di Asia Tenggara.

Dari tabel terlihat yang diambil dari JETRO tahun 2003 terlihat jumlah kelas menengah ke atas di Indonesia mencapai 5 juta orang, dibawah Malaysia yang mencapai 5,7 juta jiwa. Tapi, kerjasama perekonomian Indonesia dengan Jepang masih di bawah Malaysia dan Thailand. Indonesia belum mengoptimalkan kerjasama dalam bidang pertanian, automobil dan lain – lain. Padahal Thailand telah mengoptimalkan kerjasama ini. Kerjasama perdagangan Indonesia masih bertumpu pada sektor minyak dan gas.

Pada tahun 2005 dan 2006, Thailand termasuk dalam daftar 10 improtir produk makanan bagi Jepang. Jepang mengimpor 5,3% komoditas makanan dari Thailand. Jumlah ini setara dengan 2.362 juta US\$. Sedangkan Jepang

⁹ Salahsatu kesepakatan dalam JI-EPA ada di bidang energi yaitu akan ada strategi energi dan sumber daya mineral untuk menjaga daya tahan pertumbuhan ekonomi di kawasan. Kedua negara akan berkerja sama dengan erat untuk memfasilitasi investasi dan untuk berkontribusi pada keamanan pasokan energi dan sumber daya mineral.

mengekspor 5,2% dari total ekspor komoditas makanan atau setara dengan 93 juta US\$¹⁰. Padahal, potensi Indonesia dan Thailand tidaklah banyak berbeda. Selain itu, faktor pasar Indonesia yang besar juga menjadi potensi kerjasama perekonomian Jepang dan Indonesia semakin besar.

Tabel 3.4
Nilai Impor Jepang
(Dalam Milyar USD)

Negara	2005	2006	Pangsa 2006 (%)	Pertumbuhan 2005-2006 (%)
China	108,6	118,3	20,5	9,0
Amerika Serikat	64,2	68,0	11,8	5,9
Saudi Arabia	28,6	37,2	6,4	30,0
Emirat Arab	25,2	31,5	5,5	25,0
Australia	24,5	27,7	4,8	13,1
Korea Selatan	24,4	27,3	4,7	11,7
Indonesia	20,8	24,0	4,3	15,1
Taiwan	18,1	20,3	3,5	12,2
Jerman	17,9	18,4	3,2	3,1
Thailand	15,6	16,9	2,9	8,2
Malaysia	14,7	15,5	2,7	5,2

Sumber : Depdag 2008 dalam presentasi Sondang Anggraini di UI pada Agustus 2008

Jepang selama ini berupaya untuk mengembangkan perusahaan Jepang yang beroperasi di luar negeri. Dari survey yang dilakukan JETRO, selama ini perusahaan Jepang di luar negeri mendapatkan berbagai persoalan diantaranya adalah lemahnya informasi tentang pasar, lemahnya informasi mengenai importir lokal dan distributor, lemahnya informasi mengenai manajemen resiko, lemahnya informasi mengenai pajak dan investasi, lemahnya pegawai yang menguasai baha-

¹⁰ JETRO 2007

Tabel 3.5
Konsumen Baru di Asia Timur

Negara (wilayah)	jumlah kelas atas dan menengah		Pendapatan rata-rata konsumen atas	
	Jumlah KK	Perbandingan dari total KK	Pendapatan per kapita bulanan warga vann hekeria ²	Nominal(¥)
Cina (wilayah urban)	15.5 juta KK	10%	40.9 juta	¥ 173.000
Thailand	1.3 juta KK	8%	4.8 juta	¥ 186.000
Malaysia	1.3 juta KK	25%	5.7 juta	¥ 166.000
Indonesia	1.3 juta KK	2%	5.0 juta	¥ 125.000
Filipina	0.5 juta KK	3%	2.5 juta	¥ 327.000

Sumber: JETRO 2003

sa asing, lemahnya pengetahuan perusahaan untuk menyetting perusahaan di pasar lokal, dan tidak adanya FTA dengan negara lokal¹¹. Persoalan ini kemudian direspon pemerintah dengan fasilitasi terhadap perusahaan Jepang dengan pelatihan dan pendampingan terhadap perusahaan yang dilakukan oleh METI. Sedangkan untuk menjaga pasar di luar negeri, pemerintah membuat FTA/EPA dengan negara partner. (JETRO, 2003)

Japan has sought by means of EPAs to secure overseas markets for Japanese companies and to reduce their costs of doing business overseas. It has therefore given top priority to concluding EPAs primarily with the East Asia region, which has recorded significant growth and which is a manufacturing center for Japanese companies, and particularly with the ASEAN countries. Not only do the ASEAN countries generally have high tariffs on mining and manufacturing products, but they also still have numerous barriers to investment and services. Japan consequently seeks to improve the environment for trade and investment by concluding EPAs with these countries..... (JETRO, 2007 p.110)

Ketika memiliki kerjasama dengan Indonesia, Jepang akan memiliki berbagai kemudahan dalam berinvestasi dan mengembangkan perusahaan Jepang di Indonesia. Sebelum EPA ditandatangani pun, pemerintah Jepang telah melakukan kajian dengan pengusaha Jepang untuk membahas *item* apa saja yang akan dibawa dalam meja perundingan sehingga mendapatkan keuntungan dari EPA. Salah satu yang menjadi perhatian pemerintah Jepang adalah mengenai ekspansi pasar.

Dengan adanya JI-EPA, Jepang akan dapat berkompetisi dengan produk dari negara lain yang mendapatkan kemudahan karena FTA yang ditandatangani Indonesia. Dalam kasus EPA dengan Meksiko, Jepang menandatangani EPA sebagai upaya agar produk – produk Jepang dapat bersaing dengan produk dari Amerika dan Eropa yang telah menandatangani FTA terlebih dahulu dengan Meksiko. Berkaitan dengan Indonesia, Jepang mengusahakan agar produk Jepang dapat bersaing dengan produk dari Cina.

FTA sebagai kerangka kerjasama yang baru, mendapatkan respon yang positif dari negara – negara di dunia. FTA menjadi sarana bagi negara untuk menegosiasikan kepentingan nasionalnya, yaitu meningkatkan perdagangan luar

¹¹ Survey JETRO 2002, diambil dari White Paper JETRO 2003

negeri. Ketika sebuah negara tidak mengikuti skema FTA, maka negara tersebut akan kehilangan momentum berupa kemudahan akses pasar yang biasanya disertakan dalam FTA. Selama tahun 2005 saja, telah ada 19 FTA yang ditandatangani.

Penandatanganan JI-EPA diharapkan akan meningkatkan volume perdagangan Jepang dengan Indonesia. Bagi Jepang, baik ekspor maupun impor tetap akan banyak menguntungkan perusahaan – perusahaan Jepang. Selama ini Asia Tenggara terbukti menjadi faktor penting bagi pertumbuhan perekonomian Jepang, tetapi ada berbagai permasalahan berkaitan dengan peraturan perundangan dan ganjalan – ganjalan lain dalam perdagangan internasional di kawasan ini. Penandatanganan EPA akan menjadi kesempatan bagi Jepang untuk mendapatkan kemudahan akses pasar sekaligus memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Selama ini perusahaan Jepang telah banyak beroperasi di Indonesia dalam berbagai bidang seperti elektronika, manufaktur, tambang dan lain – lain. Perusahaan – perusahaan ini menjadi lokomotif perekonomian Indonesia, tetapi juga memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan Jepang. Sebagai contoh, kita dapat melihat bagaimana Jepang memenuhi kebutuhan gas dan batubara dengan mengupayakan kemudahan bagi perusahaan Jepang seperti Inpex dan Mitsubishi untuk beroperasi di Indonesia. Perusahaan – perusahaan tersebut kemudian akan mengekspor produknya ke Jepang.

Kondisi di atas memberikan dua keuntungan sekaligus bagi Jepang, yaitu mendapatkan keuntungan karena perusahaan Jepang berkembang dan memenuhi kebutuhan energi nasional. Langkah inilah yang diambil pemerintah Jepang untuk menjaga pertumbuhan perekonomian.

Jadi, kalau kita cermati lebih mendalam, pertumbuhan perdagangan Indonesia dan Jepang memberikan keuntungan yang besar bagi Jepang. Meskipun kalau kita lihat dari tabel yang disajikan, seolah – olah Jepang tidak mendapatkan keuntungan karena defisit perdagangan dengan Indonesia.

Penandatanganan FTA telah membuat perusahaan – perusahaan Jepang mendapatkan keuntungan yang sangat besar, terutama dalam ekspansi pasar. Sebagaimana yang dinyatakan oleh JETRO;

The reduction of NTMs has great significance for recent business expansion by Japanese enterprises. Enterprises have been undergoing fragmentation as their bases become geographically dispersed. This is progressing in two dimensions, one being dispersal of an enterprise's in-house production processes to different sites and the other being international outsourcing.(6) In this context, the international division of labor furthered by FTAs lowers service link costs. (JETRO, 2007 p.121)

Tabel 3.6

Data Ekspor – Impor Jepang

Negara	2007			Perubahan	
	Ekspor	Impor	Kesetimbangan	Ekspor	Impor
Total	712,734,968	621,084,093	91,650,874	10.11	7.21
Asia	343,112,974	267,926,047	75,186,928	11.48	6.11
Asia Timur	327,726,841	253,975,990	73,750,851	10.83	5.95
ASEAN	86,990,360	86,897,877	92,484	13.94	8.64
Asian NIEs	159,581,334	55,540,852	104,040,482	6.17	-2.04
ASEAN4	59,085,198	70,791,492	-11,706,294	12.46	9.76
Singapur	21,784,283	7,031,379	14,752,904	12.52	-6.06
Thailand	25,552,540	18,274,817	7,277,723	11.47	8.16
Malaysia	15,027,439	17,368,036	-2,340,596	13.64	12.14
Indonesia	9,046,843	26,444,815	-17,397,972	22.62	9.51
Philippin	9,458,375	8,703,824	754,551	4.92	9.3

Sumber: diolah dari JETRO 2008

Yang selama ini dikeluhkan pengusaha mengenai Indonesia adalah kepastian hukum. Oleh karena itulah pemerintah Jepang mendesak Indonesia untuk membuat peraturan yang memudahkan investasi Jepang masuk. Selain itu, pembangunan infrastruktur untuk memperlancar distribusi barang dan jasa juga menjadi perhatian penting bagi pemerintah Jepang.

Pemerintah Indonesia pun melihat perdagangan internasional sebagai aspek penting pembangunan. Perdagangan luar negeri memiliki peranan yang sangat besar karena disamping penghasil devisa juga merupakan penyedia lapangan kerja. Perdagangan luar negeri juga mempunyai efek ganda (*multiplier effect*) pada sektor lain seperti pertanian, pertambangan serta industri. Oleh karena

itu, perdagangan luar negeri menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional.

Pertumbuhan perdagangan luar negeri dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi perekonomian global antara lain meningkatnya hambatan non-tarif seperti *ecolabelling*, *cargo inspection security*, *automatic detention* dan faktor internal seperti iklim usaha antara lain ekonomi biaya tinggi, menurunnya kualitas infrastruktur, lemahnya sistem jaringan koleksi dan distribusi nasional yang kurang mendukung daya saing ekspor dan belum optimalnya sistem insentif.

Asumsi yang dibangun pemerintah Indonesia itu pun sebenarnya lebih banyak menguntungkan perusahaan – perusahaan Jepang. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, perusahaan – perusahaan Jepang telah lama beroperasi di negara Indonesia dan mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari perdagangan internasional. Untuk lebih detailnya, kita dapat melihat bagaimana jaringan perusahaan automobil Jepang beroperasi di Asia Tenggara.

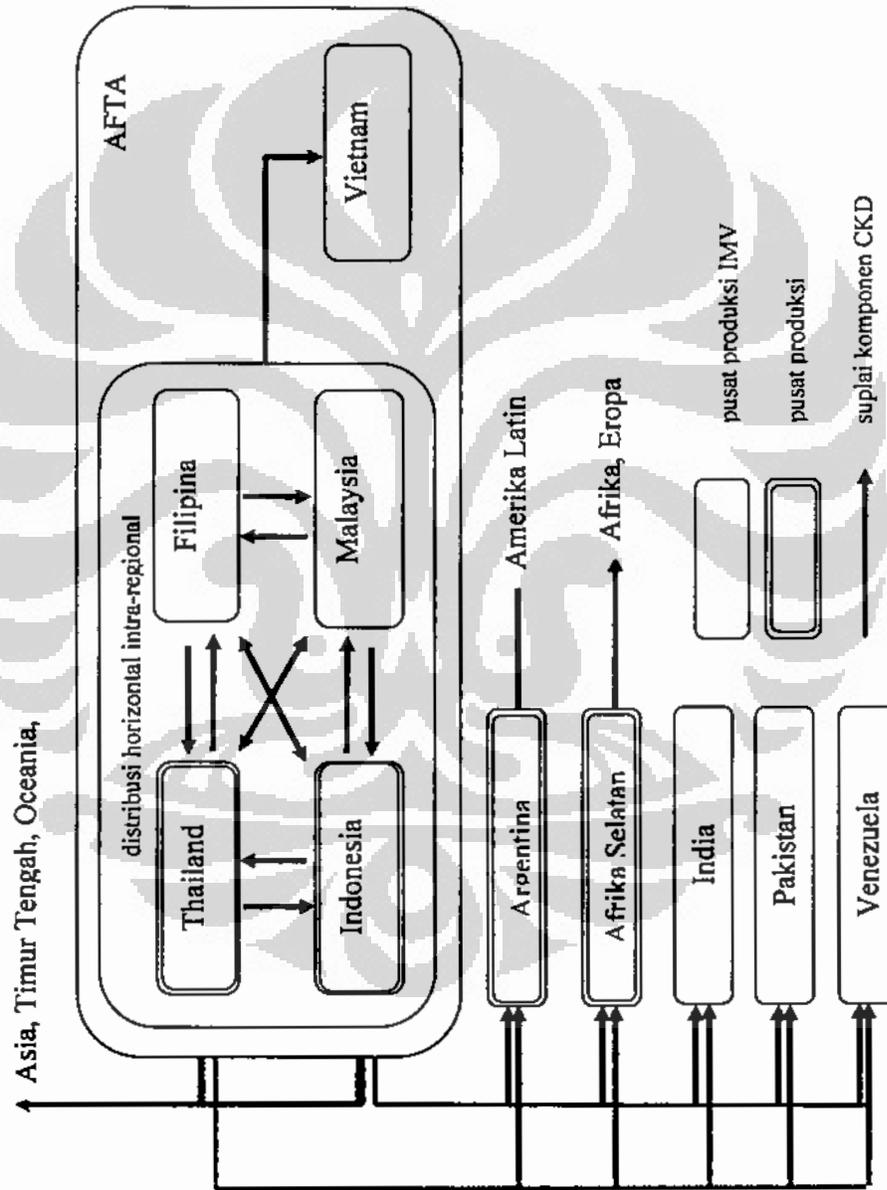
Dalam bagan di atas 3.8 terlihat bagaimana Toyota menggunakan negara Malaysia, Indonesia, Filipina, dan Thailand sebagai jaringan kerja perusahaan – perusahaan Jepang. Asia Tenggara dibagi oleh Jepang berdasarkan potensi alam dan tenaga kerja untuk memproduksi mobil. Kerjasama antar negara di ASEAN ini secara langsung meningkatkan volume perdagangan antar negara ASEAN. Tetapi, perlu dicatat bahwa pertumbuhan perdagangan itu dikarenakan adanya jaringan perusahaan Jepang di Asia Tenggara.

Japanese automakers have benefited from the ASEAN Free Trade Area (AFTA), and are using their production bases as pivots to step up intra-regional procurement of parts and nurture local manufacturing operations while enhancing local ability to build low-cost production systems. Their primary aims in local development are to 1) shorten the lead times of development, production and sales, 2) cut costs through localization and 3) cope with the shortage of engineers in Japan. (JETRO, 2005, p.22)

Kita juga bisa melihat bagaimana peran Thailand yang sebenarnya menjadi fokus bagi pemerintah Jepang, sedangkan Indonesia hanya salah satu penyedia komponen saja.

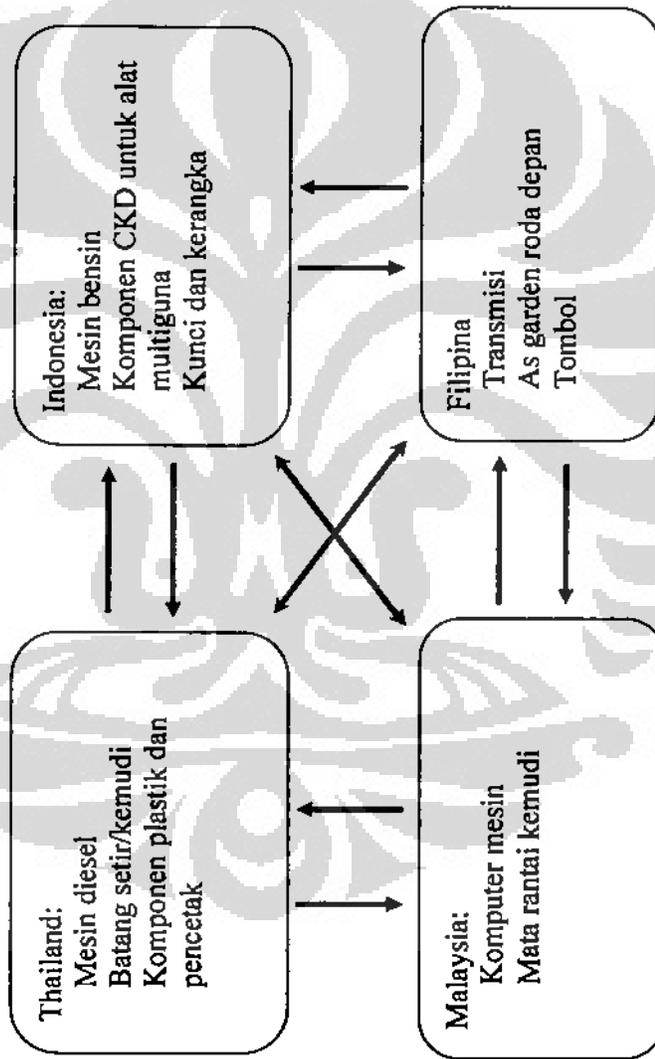
Perusahaan – perusahaan Jepang yang ada di Asia Tenggara memang ada sebagian yang kepemilikannya kerjasama, tetapi sebagian besar dimiliki oleh pengusaha Jepang.

Gambar 3.7
Gambaran Jaringan Produksi Global



Lanjutan gambar 3.7

struktur horizontal intra-regional



sumber: disusun oleh JETRO 2006

Kita dapat melihat bagaimana perusahaan – perusahaan automobil Jepang bersaing dengan perusahaan dari Korea dan negara lain. Terlihat disini bagaimana ASEAN sebenarnya memiliki potensi alam yang luar biasa. Oleh karena itulah, ASEAN memiliki posisi yang sangat penting bagi pertumbuhan perekonomian Jepang.

Dalam pandangan Jepang, pasar Asia Tenggara juga akan menjadi dua kali lebih besar dalam satu dekade. Potensi pasar ini dimanfaatkan oleh Jepang untuk mendorong hubungan baik dengan Asia Tenggara dalam kerangka EPA dan CEP. Selain itu, Jepang juga mendorong perusahaan – perusahaan Jepang untuk menanamkan investasi di Asia Tenggara. Dalam setiap penandatanganan EPA, pemerintah Jepang selalu menyertakan pengusaha untuk hadir. Para pengusaha Jepang pun menjanjikan akan menanamkan investasi di negara tersebut, termasuk Indonesia.

Hasil dari apa yang dilakukan oleh Jepang tersebut mungkin tidak menghasilkan keuntungan dalam beberapa tahun, tetapi akan menghasilkan pertumbuhan perekonomian yang besar bagi Jepang di masa yang akan datang. Pertumbuhan ini dikarenakan keuntungan yang di dapatkan perusahaan dengan perkembangan pasar yang ada di Asia Tenggara, terutama Indonesia. Selain itu, ekspansi pasar juga dilakukan dengan mendorong AFTA. Dengan AFTA, intra perdagangan ASEAN akan meningkat. Sedangkan di saat yang sama, perusahaan – perusahaan Jepang telah membuat jaringan produksi di Asia Tenggara.

Tabel 3.7
Tabel Operasi Pengembangan Pabrik Otomotif di Cina dan ASEAN

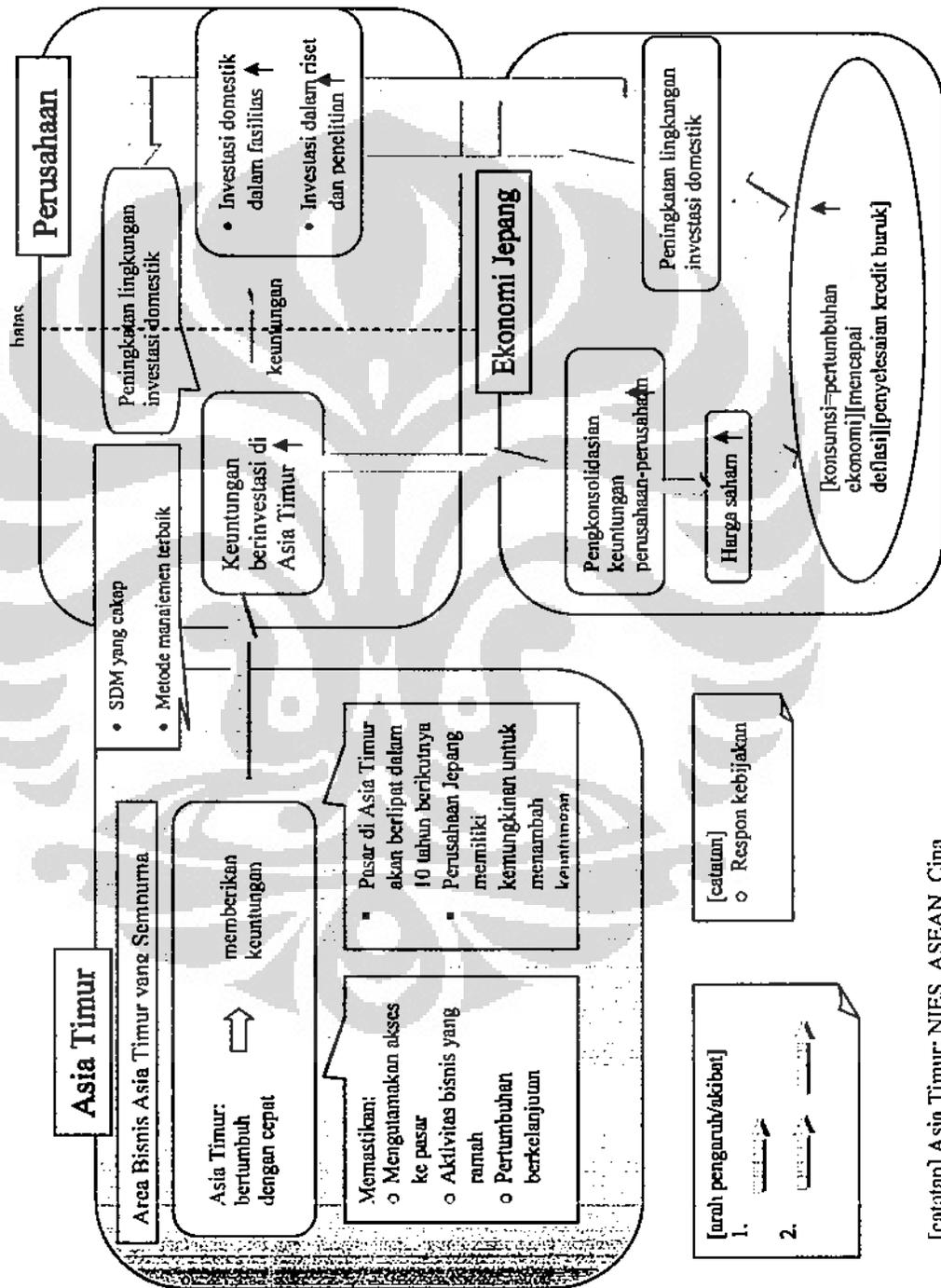
	Thailand	Malaysia	Indonesia	Filipina	Cina
Grup Toyota	☀	●	☀	○	▲○○○
Hino	●	▲	☀	○	○
Daihatsu	☀	☀ (negara)	☀	▲▲	▲▲
Honda	☀	☀	○	☀	○○☀
Grup General Motors	●	●	●▲	○	○○○○
Isuzu	☀	○▲▲	○▲	☀	○○○○
Suzuki	▲	▲▲	☀	▲▲	○○▲
Industri berat Fuji	▲(GM)	▲			
Fiat	▲(GM)			▲	○
Ford	☀	○	▲	●	○○
Mazda		▲▲	▲	▲	▲▲
Volvo	☀	N.A.		▲	
Renault		○			
Grup Renault/Nissan	☀	○	☀	○▲	○○▲
Nissan		○	○	☀	○
Nissan Diesel	▲	▲▲		▲▲	○○
Grup DaimlerChrysler	▲▲	▲▲	☀	▲▲	○○
Mitsubishi	●(99,99%)	▲	☀	●	▲▲
Mitsubishi Fuso					▲
Volkswagen-Audi	▲	▲		▲	○○
PSA(Peugeot Citroen)	▲	▲▲▲	▲		○
BMW	●▲	▲	▲	▲	○
Total	21	23	19	21	39

catatan: perusahaan otomotif dan perusahaan perdagangan, dll keseluruhan untuk perusahaan-perusahaan dari negara yang sama
 ● 100% kepemilikan ☀ 50% kepemilikan ○ lebih dari 50% kepemilikan
 ▲ kerja sama teknis dan kontrak produksi
 Sumber: data Institut Penelitian Jepang, diperbarui oleh JETRO menggunakan data dari Fourin dan website perusahaan.

Sumber: JETRO, 2006

Gambar 3.8

Pertambahan Keuntungan di Asia Timur dan dampaknya bagi Perekonomian Jepang



[catatan] Asia Timur: NIES, ASEAN, Cina

BAB 4
KEPENTINGAN INDONESIA DALAM JAPAN - INDONESIA
ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (JI-EPA)

Bab 4 akan membahas mengenai kepentingan Indonesia dalam penandatanganan JI-EPA. JI-EPA adalah perjanjian komprehensif pertama yang ditandatangani Indonesia dengan negara lain. Oleh karena itu, bab 4 ini sangat penting untuk mendapatkan informasi mengenai apa yang dibutuhkan Indonesia atas Jepang.

4.1 Meningkatkan perdagangan internasional

Krugman dan Obstfeld (2004) menjelaskan bahwa setiap negara melakukan perdagangan internasional karena dua alasan utama, yang masing-masing menjadi sumber bagi adanya keuntungan perdagangan (*gains from trade*) bagi mereka. Alasan pertama negara-negara berdagang adalah karena mereka berbeda satu sama lain. Bangsa-bangsa di dunia ini, sebagaimana halnya individu-individu, selalu berpeluang memperoleh keuntungan dari perbedaan-perbedaan di antara mereka melalui suatu pengaturan sedemikian rupa sehingga setiap pihak dapat melakukan sesuatu secara relatif lebih baik.

Yang kedua, negara-negara berdagang satu-sama lain dengan tujuan untuk mencapai apa yang lazim disebut sebagai skala ekonomis (*economics of scale*) dalam produksi. Maksudnya, seandainya setiap negara bisa membatasi kegiatan produksinya untuk menghasilkan sejumlah barang tertentu saja, maka mereka berpeluang memusatkan perhatian dan segala macam sumber dayanya sehingga ia dapat menghasilkan barang-barang tersebut dalam skala yang lebih besar dan karenanya lebih efisien dibandingkan dengan jika negara tersebut mencoba untuk memproduksi berbagai jenis barang secara sekaligus. Dalam dunia nyata, pola-pola perdagangan internasional mencerminkan adanya interaksi yang terus-menerus dari kedua motif dasar di atas.

Dalam konteks perekonomian suatu negara, salah satu wacana yang menonjol adalah mengenai pertumbuhan ekonomi. Meskipun ada juga wacana

lain mengenai pengangguran, inflasi atau kenaikan harga barang-barang secara bersamaan, kemiskinan, pemerataan pendapatan dan lain sebagainya. Pertumbuhan ekonomi menjadi penting dalam konteks perekonomian suatu negara karena dapat menjadi salah satu ukuran dari pertumbuhan atau pencapaian perekonomian bangsa tersebut, meskipun tidak bisa dinafikan ukuran-ukuran yang lain. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator kemajuan pembangunan.

Bagi sebuah bangsa atau negara, pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi seperti yang direncanakan atau diperkirakan, keberhasilan mengurangi angka pengangguran dan menciptakan stabilisasi inflasi merupakan suatu ukuran keberhasilan kebijakan dalam perekonomian negara tersebut. Oleh karena hal tersebut, maka negara-negara berusaha untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimal dengan cara melakukan berbagai kebijakan dalam perekonomian. Dalam rangka pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang diinginkan tentunya akan ada sektor-sektor yang akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi.

Ada beberapa hal atau komponen pembentuk *Gross Domestic Product* (GDP) yang dapat menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi atau peningkatan GDP. Oleh karena itu kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara tentunya diupayakan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang mampu membuat beberapa hal atau komponen, yang diyakini dapat menjadi motor penggerak bagi peningkatan GDP, mencapai kondisi optimal sehingga pertumbuhan ekonomi yang diinginkan dapat dicapai.

Salah satu hal yang dapat dijadikan motor penggerak bagi pertumbuhan adalah perdagangan internasional. Salvatore (2004) menyatakan bahwa perdagangan dapat menjadi mesin bagi pertumbuhan. Jika aktifitas perdagangan internasional adalah ekspor dan impor, maka salah satu dari komponen tersebut atau kedua-duanya dapat menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan. Pada awal tahun 1980-an Indonesia menetapkan kebijakan yang berupa *export promotion*. Dengan demikian, kebijakan tersebut menjadikan ekspor sebagai motor penggerak bagi pertumbuhan.

Ketika terjadi perdagangan internasional yang berupa ekspor dan impor, akan memunculkan kemungkinan untuk memindahkan tempat produksi. Peningkatan ukuran pasar yang semakin besar yang ditandai dengan peningkatan impor suatu jenis barang pada suatu negara, akan memunculkan kemungkinan untuk memproduksi barang tersebut di negara importir. Kemungkinan itu didasarkan dengan melihat perbandingan antara biaya produksi di negara eksportir ditambah dengan biaya transportasi dengan biaya yang muncul jika barang tersebut diproduksi di negara importir. Jika biaya produksi di negara eksportir ditambah biaya transportasi lebih besar dari biaya produksi di negara importir, maka investor akan memindahkan lokasi produksinya di negara importir. Perpindahan lokasi produksi ini akan berkaitan dengan *foreign direct investment* yang terjadi di negara importir.

Pertumbuhan perdagangan luar negeri dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi perekonomian global antara lain meningkatnya hambatan non-tarif : *ecolabelling, cargo inspection security, automatic detention* dan faktor internal seperti iklim usaha antara lain ekonomi biaya tinggi, menurunnya kualitas infrastruktur, lemahnya sistem jaringan koleksi dan distribusi nasional yang kurang mendukung daya saing ekspor dan belum optimalnya sistem insentif (Depdag, 2004).

Yang perlu disadari oleh pemerintah Indonesia adalah kebijakan perdagangan tidak hanya berdiri sendiri, tetapi terkait dengan banyak kebijakan yang lain seperti investasi, kebijakan pertanian, dan sebagainya. Jadi, peningkatan perdagangan luar negeri (internasional) menjadi penting untuk diperhatikan jika Indonesia ingin mengoptimalkan penandatanganan JI-EPA.

Kebijakan pemerintah Indonesia adalah kebijakan yang pro terhadap penambahan volume perdagangan. Dalam analisis strategik Departemen perdagangan, dinyatakan bahwa posisi Indonesia dalam perdagangan internasional masih di bawah Malaysia dan Thailand. Sebagai negara pengeksport, posisi Indonesia berada pada peringkat ke 26 atau berada satu tingkat di atas India. Dampak krisis ekonomi telah menyebabkan menurunnya pangsa ekspor Indonesia terhadap total ekspor dunia dimana pada tahun 1996 sebesar 0,93 persen kemudian menurun menjadi 0,90 persen pada tahun 1998. Sedangkan pada tahun

2001 pangsaanya kembali meningkat menjadi 0,92 persen, dan pada tahun 2003 ternyata turun kembali menjadi 0,84 persen. Sementara itu Malaysia berada pada peringkat ke 17 dengan pangsa sebesar 1,33 persen pada tahun 2003 dan Thailand pada peringkat ke 21 dengan pangsa sebesar 1,08 persen (Renstra Depdag, 2004 p.5-6).

Pada tahun 1996 pangsa impor Indonesia mencapai 0,79 persen dari total Dunia kemudian turun menjadi 0,49 persen pada tahun 1998. Penurunan ini disebabkan mahalnya bahan baku sebagai akibat melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat. Namun demikian, sejalan dengan membaiknya perekonomian nasional, pangsa impor Indonesia terhadap total impor dunia menunjukkan peningkatan menjadi 0,54 persen pada tahun 2003. Posisi Neraca Perdagangan Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara lainnya masih relatif baik, dimana selama periode 1996-2003 selalu menunjukkan surplus. Pada tahun 1996 (sebelum krisis) surplus Neraca Perdagangan mencapai US\$ 6,9 milyar kemudian meningkat menjadi US\$ 21,5 milyar pada tahun 1998. Selanjutnya pada tahun 2003 menurun menjadi US\$ 20,9 milyar. Sementara itu, Neraca Perdagangan Malaysia dan Thailand pada tahun 2003 menunjukkan surplus masing-masing sebesar US\$ 17,4 milyar dan US\$ 4,7 milyar. Dari sisi Neraca Perdagangan, Indonesia lebih baik dari pada Malaysia (Depdag, 2004).

Gambar 4.1
Keterkaitan Antara Perdagangan Luar Negeri dengan Kebijakan Lainnya



Sumber : Tambunan, 2008

EPA adalah salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan perdagangan luar negeri. Dengan skema pemberian kuota pada produk tertentu dan fasilitasi *capacity building*, EPA diharapkan akan mampu mendorong perdagangan antara Indonesia dan Jepang.

Tabel 4.1
Kuota Pisang

No	Tahun	Volume (metrik ton)
1.	2008	1000
2.	2009	1000
3.	2010	1000
4.	2011	1000
5.	2012	1000

Sumber: Diolah dari Depdag, 2008

Tabel 4.2
Kuota nanas

No	Tahun	Volume (metric ton)
1.	2008	100
2.	2009	150
3.	2010	200
4.	2011	250
5.	2012	300

Sumber: diolah dari Depdag, 2008

Ji-EPA antara lain berisi tentang liberalisasi perdagangan dan investasi, fasilitasi perdagangan dan investasi serta pengembangan kapasitas untuk meningkatkan daya saing industri Indonesia.

Pada bagian liberalisasi perdagangan, 80 persen dari seluruh pos tarif Jepang menjadi nol persen bagi produk ekspor Indonesia setelah EPA berlaku pada 2008. Sementara 58 persen pos tarif Indonesia turun menjadi nol persen bagi

Jepang saat EPA berlaku. Selama ini, Jepang merupakan tujuan ekspor utama Indonesia dengan nilai ekspor Indonesia ke Jepang pada 2006 sebesar 21,7 miliar dolar AS, sementara nilai ekspor Jepang ke Indonesia pada tahun yang sama 5,5 miliar dolar. Produk unggulan RI di pasar Jepang pada 2006 antara lain pertanian, perikanan dan perkebunan senilai 919 juta dolar AS, alas kaki 118 juta dolar AS, kayu dan produk olahannya 1,17 miliar dolar AS, karet 971 dolar AS, plastik 380 juta dolar AS, nikel dan produknya 1,30 miliar dolar AS, alumunium dan produknya 449 juta dolar AS dan furnitur 5,5 miliar dolar AS (Antara, 20/08/2007).

Akan tetapi, EPA ini akan lebih menguntungkan apabila Indonesia dan Jepang dalam kondisi seimbang, baik di bidang ekonomi, industri dan SDM. Dari laporan BPS, terlihat sampai September 2006 (sebelum penandatanganan) Indonesia masih surplus 4,9 miliar dolar AS dari Jepang dengan total ekspor 8,073 miliar dolar AS dan impor 3,98 miliar dolar AS. Akan tetapi perlu dicatat, bahwa ekspor non-migas ke Jepang bulan September 2006 hanya sebesar 1,24 miliar dolar AS. Sementara nilai impor dari Jepang sebesar 3,98 miliar dolar AS (12,76 persen) didominasi oleh impor mesin dan pesawat mekanik.

Produk unggulan RI di pasar Jepang pada 2006 antara lain pertanian, perikanan dan perkebunan senilai 919 juta dolar AS, alas kaki 118 juta dolar AS, kayu dan produk olahannya 1,17 miliar dolar AS, karet 971 dolar AS, plastik 380 juta dolar AS, nikel dan produknya 1,30 miliar dolar AS, alumunium dan produknya 449 juta dolar AS dan furnitur 5,5 miliar dolar AS. Sedangkan lima investasi utama Jepang di RI pada 1998-2006 adalah mesin listrik dan elektronik senilai 2,83 miliar dolar AS, kendaraan dan peralatan transportasi 1,64 miliar dolar AS, industri mineral dan nonmetalik 862 juta dolar AS, kimia dan obat-obatan 780 juta dolar AS serta perdagangan dan reparasi 661 juta dolar AS (Antara, 20/08/2007).

Angka tersebut memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara Jepang dan Indonesia. Indonesia hanya mampu mengekspor produk non-migas sebesar 15.4% saja. Kondisi ini dianggap merugikan karena kecilnya ekspor non-migas sebagai sektor padat karya berpengaruh pada kecilnya daya serap tenaga kerja nasional. Sebaliknya, besarnya impor mesin dan produk mekanik justru

kontraproduktif karena menjadikan perkembangan inovasi industri nasional sekarat.

Tabel 4.3
Neraca Perdagangan Indonesia – Jepang
(Dalam USD)

Gambaran	2003	2004	2005	2006	2007	Tren (%) 2003-2007	Jan-Feb		Perubahan (%) 2008/2007
							2007	2008	
Total	17.831.7	22.043.7	24.955.3	27.247.8	30.159.4	13,46	4.141.5	6.613.7	59,69
Minyak & Gas	6.792.5	7.606.6	8.501.2	9.561.3	10.593.9	11,82	1.308.9	2.152.2	64,43
Non Minyak & Gas	11.039.2	14.437.0	16.454.1	17.686.5	19.565.5	14,43	2.832.6	4.461.5	57,50
Eksport	13.603.4	15.962.1	18.049.1	21.732.1	23.632.7	15,18	3.203.6	4.389.6	37,02
Minyak & Gas	6.773.1	7.578.5	8.487.3	9.533.5	10.539.9	11,78	1.304.1	2.144.3	64,42
Non Minyak & gas	6.830.3	8.383.5	9.561.7	12.198.5	13.092.8	18,25	1.899.4	2.245.3	18,21
Impor	4.228.2	6.081.6	6.906.2	5.515.7	6.526.6	8,01	937.9	2.224.0	137,11
Minyak & Gas	19.3	28.1	13.8	27.7	54	22,66	4.7	7.9	66,39
Non Minyak & Gas	4.208.9	6.053.5	6.892.3	5.487.9	6.472.6	7,93	933.2	2.216.1	137,47
Balance of Trade	9.375.2	9.880.5	11.142.8	16.216.3	17.106.1	18,51	2.265.6	2.165.6	-4,41
Minyak & Gas	6.753.8	7.550.5	8.473.4	9.505.7	10.485.9	11,74	1.299.4	2.136.4	64,41
Non & Gas	2.621.4	2.330.0	2.669.4	6.710.6	6.620.2	33,78	966.2	29.2	-96,98

Sumber: diolah dari data Depdag tahun 2008

Indonesia menandatangani EPA sebagai upaya untuk meningkatkan surplus perdagangan ke Jepang. EPA merupakan strategi meningkatkan volume perdagangan ke Jepang sebagai strategi bilateral. Adapun Indonesia juga mengambil strategi multilateral dan regional dengan bergabung dalam WTO dan penandatanganan AFTA.

Catatan penting lain yang harus diperhatikan adalah dunia usaha belum tentu memiliki kesiapan dalam JI-EPA. Di Asia Tenggara yang menjadi ujung tombak globalisasi bukanlah dunia usahanya. Tetapi, pemrakarsa dan promotor globalisasi ekonomi adalah pemerintahnya. Adalah pemerintah di negara-negara

ini yang menerapkan kebijakan untuk mengintegrasikan ekonominya ke dalam ekonomu dunia, semula melalui kebijakan pembangunan yang berorientasi ekspor yang didukung oleh kebijakan untuk menarik masuk PMA. Secara bertahap mereka juga membuka pasar dalam negerinya. Yang seringkali dilupakan adalah bahwa kebijakan globalisasi ini dijalankan seiring dengan kebijakan untuk menggalang kerjasama ekonomi regional. Kebijaksanaan ini didasarkan pada keyakinan bahwa setiap negara akan mendapatkan hasil yang lebih baik apabila melakukan integrasi ekonomi ini secara bersama-sama daripada melakukannya secara sendiri-sendiri. Itulah sebabnya regionalisme ekonomi di Asia Tenggara berorientasi ke luar. Oleh karena pola perdagangan negara-negara Asia Tenggara lebih bersifat ekstra-regional dan hanya seperlimanya merupakan perdagangan intra-regional, maka tidak mengherankan mengapa mereka menganut konsep "regionalisme terbuka" atau *open regionalism* (Soesastro, 2004).

Tabel 4.4
Ekspor – Impor Jepang ke Indonesia
(dalam Juta USD)

Gambaran	2003	2007	TREN (%) 2003-2007	Jan-April		Perubahan (%) 2008/2007
				2007	2008	
Total	21.396.5	35.545,2	66.13	10.715.7	14.528.1	35.58
Minyak & Gas	7.530.8	10.628.4	41.13	2.886.0	5.272.8	82.7
Non Minyak & Gas	13.865.7	24.916.8	79.70	7.829.7	9.255.3	18.21
Ekspor	7.177.7	9.064.8	26.29	2.700.0	3.905.7	44.65
Minyak & Gas	37.6	64.8	72.48	12.4	65.6	430.20
Non Minyak & gas	7.140.1	9.000.0	26.05	2.687.6	3.840.0	42.88
Impor	14.218.8	26.480.3	86.23	8.015.7	10.622.4	32.52
Minyak & Gas	7.493.2	10.563.5	40.97	2.873.6	5.207.1	81.20
Non Minyak & Gas	6.725.6	15.916.8	136.66	5.142.0	5.415.3	5.31
Balance of Trade	-7.041.2	-17.415.5	147.34	-5.315.7	-6.716.7	26.36
Minyak & Gas	-7.455.6	-10.498.7	40.82	-2.861.2	-5.141.5	79.69
Non Minyak & Gas	414.4	-6.916.8	-1.768.97	-2.454.4	-1.575.2	-35.82

Sumber: diolah dari data Depdag tahun 2008

Negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, telah melaksanakan globalisasi ekonomi dengan melakukan liberalisasi ekonomi, masing-masing menurut kecepatan yang berbeda dengan memperhitungkan komitmen mereka dalam WTO, APEC, AFTA dan FTA. Sebagai pemrakarsa dan promotor kebijakan globalisasi, pemerintah di kebanyakan negara Asia Tenggara memberikan perhatian pada penyesuaian tahap pertama saja. Penyesuaian tahap pertama ini menyangkut proses dan upaya membuka ekonomi melalui suatu pentahapan dari liberalisasi dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing internasionalnya. Penyesuaian ini melibatkan kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan daya tarik ekonomi yang bersangkutan sebagai tempat produksi bagi pasar global.

Bagi pemerintah Indonesia, pertumbuhan perdagangan dianggap sebagai kesuksesan pemerintah dalam membangun industri dalam negeri. Oleh karena itu, berbagai upaya pun dilakukan untuk meningkatkan volume perdagangan dengan penurunan tarif ekspor dan impor, membangun infrastruktur untuk mempermudah distribusi barang, dan penerbitan berbagai peraturan yang mempermudah investasi asing di Indonesia.

4.2. Meningkatkan investasi Jepang di Indonesia

Investasi berperan sangat besar dalam perekonomian sebuah negara. Investasi menjadi instrumen yang mendorong kondusifnya bisnis internasional. Bagi negara berkembang seperti Indonesia investasi berperan untuk pembukaan lapangan pekerjaan, pertumbuhan industri lokal, dan transfer teknologi. Oleh karena itu, Indonesia bersaing dengan negara berkembang yang lain untuk menarik investor.

Investasi sendiri ada dua jenis, yaitu ;

Yang pertama, investasi asing langsung *Foreign Direct Investment (FDI)*. FDI atau investasi di sektor riil adalah investasi yang langsung ditanamkan di industri atau bidang usaha tertentu seperti pertambangan, properti, pertanian, dan lain sebagainya. Investasi di sektor riil sangat penting karena dapat memberi manfaat ekonomi yang besar bagi Indonesia melalui penyerapan tenaga kerja,

pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, pertumbuhan industri, dan penggarapan berbagai sumber daya ekonomi.

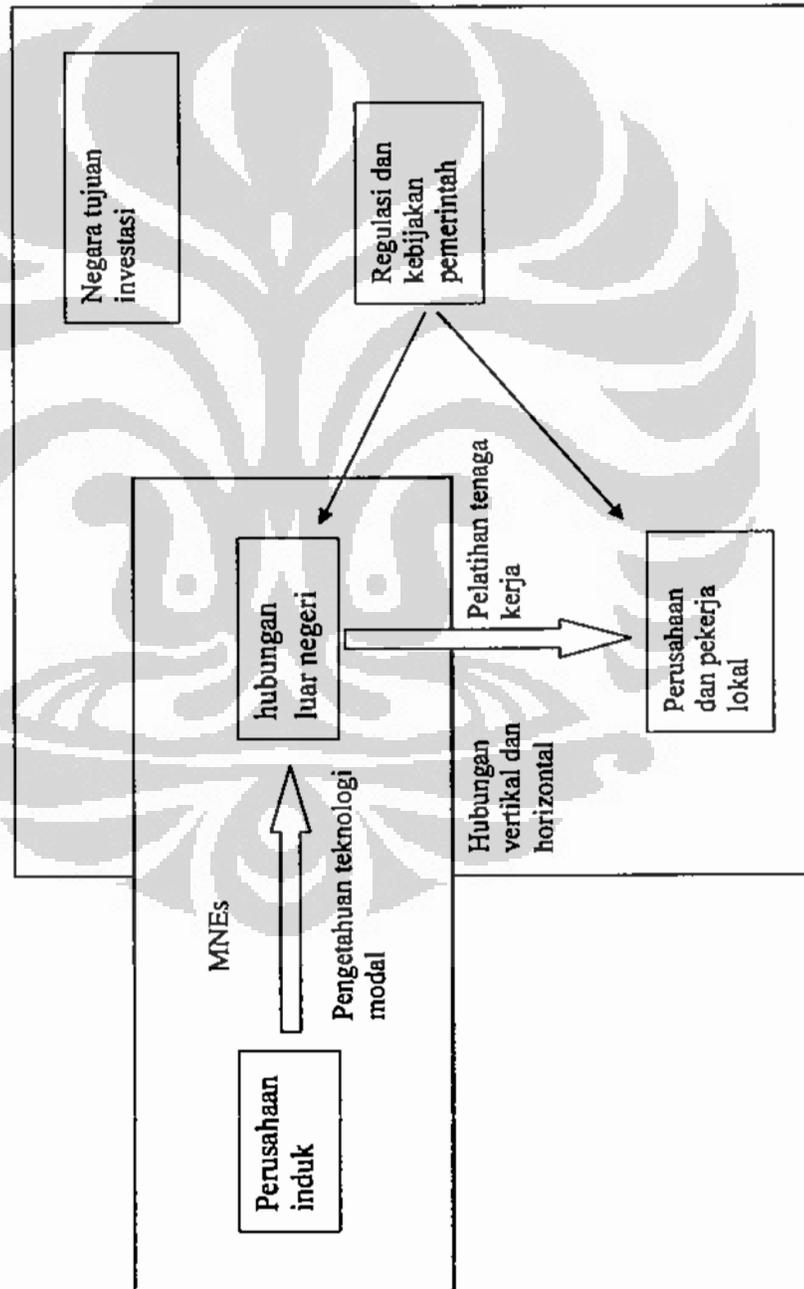
Sayangnya, jumlah FDI di Indonesia masih sangat kecil apabila dibandingkan dengan investasi tidak langsung (portofolio). Padahal investasi di sektor riil inilah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan finansial yang strategis bagi Indonesia. Seperti yang telah dibahas dibagian sebelumnya, pemerintah masih menghadapi banyak tantangan dan kendala dalam memberdayakan FDI.

Yang kedua, Investasi asing tidak langsung. Investasi tidak langsung banyak dilakukan dalam bentuk saham korporasi, surat obligasi, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan Surat Utang Negara (SUN). Data Bank Indonesia menyebutkan hingga 10 Mei 2007, jumlah dana asing di SBI mencapai Rp 45,3 triliun. Sedangkan yang ditempatkan di SUN sebesar Rp 77,2 triliun. Banyaknya dana asing dari investasi ini memang telah menguatkan nilai rupiah, namun penguatan tersebut tidak ada artinya apabila tidak membawa dampak positif bagi sektor riil dan rakyat.

Dana dari investasi portofolio umumnya bersifat jangka pendek (*hot money*) dan dapat ditarik kembali oleh investor (*arus balik*) setiap saat apabila ada negara lain yang menawarkan keuntungan lebih besar. Oleh karena itu, ada kemungkinan pemerintah akan mengalami guncangan ekonomi apabila suatu waktu dana tersebut ditarik kembali oleh investor dalam jumlah besar. Selain itu, investasi portofolio juga sulit menjangkau kesejahteraan rakyat. Jadi, meskipun mampu mendorong nilai rupiah, tidak ada peningkatan yang berarti di sektor riil.

Foreign Direct Investment (FDI) yang dilakukan negara maju, telah mengalami kemajuan baik dalam jumlah maupun peraturan. Sekarang ini ada puluhan ribu perusahaan multinasional yang beroperasi lintas negara. Peraturan mengenai FDI ini pun dibuat oleh negara dalam bentuk peraturan pemerintah ataupun Undang - Undang. Setiap negara memiliki peraturan sendiri sebagai upaya untuk menarik investor asing ke negaranya. Sebagai contoh di Indonesia diatur dengan UU Penanaman Modal Asing. Peraturan tersebut dibuat agar investor asing tertarik menanamkan investasi di Indonesia dengan adanya kemudahan prosedur dan luasnya lahan investasi.

Gambar 4.2
Peran FDI dalam Pandangan Negara Tujuan Investasi



Sumber: diolah dari data JBIC Institute tahun 2002

Lee and Houde (2000), mengikuti pendekatan *John Dunning's eclectic* menyatakan ada enam factor yang mempengaruhi FDI sebuah negara, yaitu;

- Market yang besar dan prospek pertumbuhan. FDI biasanya tertarik dengan yang disebut “market oriented”
- SDM dan SDA yang melimpah, termasuk di dalamnya produktivitas tenaga kerja. FDI juga bertumpu pada keuntungan, jadi ketika bahan mentah dan SDM murah akan menjadi perhatian tersendiri. Biasanya FDI berorientasi ekspor, baik kembali ke negaranya sendiri atau ke negara ketiga.
- Infrastruktur fisik, teknologi, dan finansial. Perbedaan kualitas infrastuktur seperti transportasi dan telekomunikasi mempengaruhi keputusan pengusaha untuk menanamkan investasinya.
- Keterbukaan terhadap perdagangan internasional dan akses ke pasar internasional. Posisi geografik sebuah negara mempengaruhi keputusan untuk menanamkan FDI. Tapi yang lebih penting lagi adalah kebijakan untuk mengakses pasar dan dunia internasional. Sebagai contoh China mereformasi ekonominya dengan *open door policy* yang menarik bagi investor karena memperbesar peluang untuk ekspor.
- Peraturan dan kerangka kebijakan dan hubungan dengan kebijakan yang lain. Kondisi ekonomi secara umum, stabilitas ekonomi dan politik juga menjadi pertimbangan investor.
- Proteksi terhadap investasi dan promosi. Proteksi terhadap investasi dipertimbangkan sebagai persyaratan minimum untuk menarik FDI. Promosi terhadap investasi juga menjadi daya tarik tersendiri. Sebagai contoh China menawarkan paket promosi untuk menarik FDI dengan paket kebijakan pajak, insentif financial yang berdampak pada keuntungan bagi investor. (JBICI, 2006 p.26)

Paul Sukagawa, *Chairman of the Jakarta Japan Club Foundation*, mengakui, Pemerintah Indonesia telah melangkah maju dalam perbaikan iklim investasi, antara lain melalui percepatan proses kepabeanan di Pelabuhan Tanjung

Priok dan Batam. Pengesahan Undang-Undang Penanaman Modal juga disambut positif. Sedangkan *Chairman and CEO of Japan External Trade Organization (Jetro)* Yasuo Hayashi berpendapat, sebagai negara terbesar di ASEAN, Indonesia justru belum sepenuhnya menyadari dan memanfaatkan potensinya. Indonesia justru tertinggal dalam jaringan produksi regional dibandingkan dengan Malaysia, Thailand, dan negara-negara tetangga lainnya.

Dengan adanya EPA, maka Indonesia telah melakukan langkah maju dalam penguatan industri dan perbaikan iklim investasi. Hayashi meyakini, investasi Jepang akan mengalir ke Indonesia. Selain itu, faktor ketidakpastian bisnis di negara lain di Vietnam dan China menjadi pendukung. Di China terjadi kenaikan biaya buruh dan penguatan nilai tukar. Sedangkan di Vietnam, rendahnya tingkat pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi cepat juga menjadi masalah.

Salah satu komponen Persetujuan Kemitraan Ekonomi (EPA) Jepang-Indonesia ialah komitmen untuk memajukan investasi Jepang di Indonesia. Untuk itu, kedua negara sepakat untuk memperbaiki keyakinan usaha (*improvement of business confidence*) dan menghilangkan segala hambatan investasi. Hal itu di antaranya dengan memperlancar impor bahan baku yang dibutuhkan pabrik-pabrik Jepang di Indonesia, kemudahan dan harmonisasi prosedur kepabeanan, serta kemudahan masuknya tenaga-tenaga Jepang.

Dengan langkah-langkah di atas, Indonesia diharapkan bisa kembali tertangkap radar investor asing dengan perusahaan-perusahaan Jepang sebagai pembuka jalan. Selanjutnya Indonesia bakal dimasukkan ke dalam jaringan produksi global sehingga bisa menjadi energi baru dalam menggerakkan dan menganekaragamkan ekspor (Basri, 2008).

Berkaitan dengan kunjungan Perdana Menteri (PM) Abe pada bulan Agustus 2007, telah diresmikan empat proyek sektor energi dengan nilai investasi 3,97 miliar dollar AS. Berbagai proyek itu akan memenuhi kebutuhan dan ketersediaan energi.

Investasi langsung Jepang ke Indonesia paling tinggi pada tahun 2004 yang berjumlah 1,683 juta USD. Dan nilai ini menurun di tahun 2005 dan 2006

dengan jumlah 1,117 USD dan 443 USD. Menurunnya investasi ini berdampak pada meningkatnya pengangguran di Indonesia.

Jepang yang pernah menduduki peringkat satu dalam penanaman modal asing di Indonesia pada tahun 2006 hanya bernilai 443,6 juta dolar AS atau di bawah Malaysia, Singapura, Inggris, Korea Selatan dan Swiss (Antara, 18/12/2007). Dalam forum bisnis Indonesia-Jepang, *Chairman of Nippon Keidanren* Fujio Mitarai mengatakan, dengan EPA diperhitungkan investasi Jepang di Indonesia akan bertambah lebih dari 800 miliar yen atau 7 miliar dollar AS, khususnya di sektor energi, permesinan, dan otomotif dalam lima tahun mendatang (Kompas, 21/08/2007).

Indonesia selama ini berusaha untuk mengembalikan Jepang sebagai investor utama di Indonesia. Hal ini terlihat dari berbagai upaya yang dilakukan Indonesia untuk memenuhi kepentingan investor Jepang yang menginginkan kepastian usaha, diantaranya dengan pengesahan UU Penanaman Modal Asing dan UU Perburuhan, serta UU Perpajakan dan bea cukai.

Jepang yang memiliki banyak perusahaan di Indonesia merasa harus membantu pemerintah Indonesia keluar dari krisis 1997. Oleh karena itulah kebijakan luar negeri Jepang paska krisis 1997 bertumpu pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Ketika perekonomian Indonesia membaik, maka perusahaan Jepang pun akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Namun, apakah kepentingan Indonesia ini bisa tercapai atau tidak, kita masih harus menunggu beberapa waktu. Selama ini pengusaha dan pemerintah Jepang juga telah banyak menjanjikan berbagai skema untuk meningkatkan investasi di Indonesia, tetapi semua itu tidak berjalan dengan mulus. Seringkali terkendala dengan situasi yang muncul.

Kita bisa melihat fakta ini ketika Indonesia dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Jepang Junichiro Koizumi, pada bulan Juni 2005, menandatangani nota kesepahaman tentang keinginan kedua negara membentuk kemitraan ekonomi yang komprehensif dalam persetujuan kerja sama ekonomi. Dengan kesepakatan

itu, kedua negara akan mengarahkan berbagai kebijakan untuk mengusahakan liberalisasi ekonomi, termasuk perdagangan bebas barang dan jasa.

Kedua kepala pemerintahan sepakat menyiapkan langkah- langkah konkret untuk memacu investasi asing. Selain itu, memacu pertumbuhan ekonomi yang saling menguntungkan kedua negara dengan merumuskan kebijakan yang kondusif di bidang pajak dan bea masuk. Disepakati juga pembenahan aturan ketenagakerjaan, infrastruktur, dan peningkatan daya saing industri. Semua itu dituangkan dalam *Strategic Investment Action Plans* (SIAP) (Kompas, 3/06/2005).

Presiden SBY juga melakukan pertemuan satu per satu dengan para pemimpin tujuh kelompok usaha besar di Jepang. Presiden SBY mengumpulkan beberapa komitmen untuk investasi yang mencapai 10 miliar dollar AS di hampir semua sektor. Ketujuh kelompok usaha itu adalah Mitsubishi Corporation, Itochu Corporation, Sumitomo Corporation, Mitsui & Co, Seiko-Epson Corporation, Teijin Ltd, dan Matsuhita Electric Company Ltd. Dari ketujuh kelompok usaha itu, beberapa sudah secara jelas menyebut besarnya investasi yang akan masuk ke Indonesia. Sumitomo Corporation, misalnya, merencanakan 2,5 miliar dollar AS untuk pembangkit listrik, 250 juta dollar AS untuk jalan, dan sekitar 700 juta dollar AS untuk jaringan kereta api. Sedangkan Mitsui & Co menawarkan investasi 1,3 miliar dollar AS untuk pembangkit listrik, 1,6 miliar dollar AS untuk pertambangan, tekstil, otomotif, industri kimia, dan finansial (Kompas, 3/06/2005).

Ketika itu, pemerintah Indonesia sudah optimis menunggu investasi dari pengusaha Indonesia, tetapi kemudian terganjal lagi. Jepang menilai Indonesia belum mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup untuk menciptakan kesempatan kerja akibat pengangguran yang semakin bertambah setiap tahunnya. Kunci untuk menciptakan peluang kerja adalah melalui investasi. Sementara itu, dalam enam tahun terakhir, investasi yang masuk ke Indonesia cukup minim. Hal ini dikarenakan terjadinya kondisi sosial ekonomi yang tidak diduga sebelumnya, terutama diakibatkan sistem peradilan yang lemah, meluasnya korupsi dan memburuknya keadaan infrastruktur.

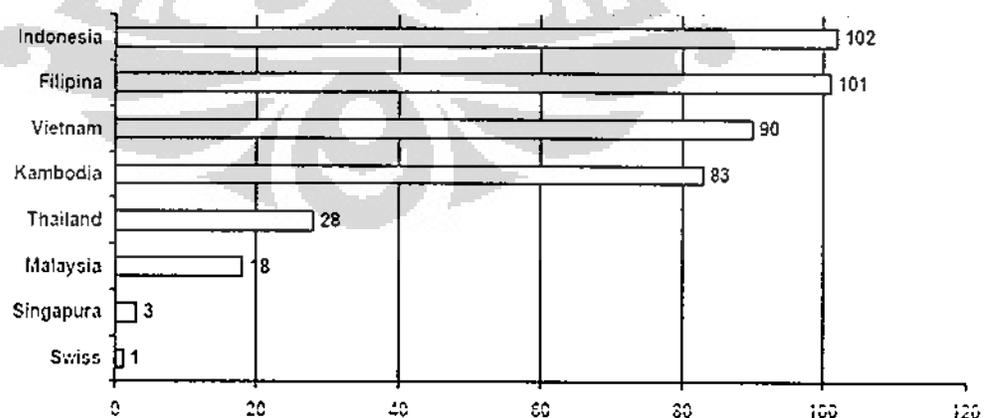
Menurut Jepang, pengurusan surat – surat di Indonesia yang seharusnya membutuhkan waktu hanya tiga hari, tetapi pada kenyataannya membutuhkan waktu 14 hari. Biaya transportasi di Indonesia pun dikenal cukup mahal karena infrastruktur yang kurang bagus. JETRO mencontohkan pantura sebagai penghubung daerah industri di Jawa dengan Tanjung Priuk merupakan salahsatu jalan yang tidak terawat (JETRO, 2008).

Tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini dalam infrastruktur adalah antara lain (a) memperbaiki semua infrastruktur yang rusak, seperti jalan-jalan raya yang belobang dan bergelombang dan yang sebagian hancur karena tanah longsor dalam waktu singkat; (b) membangun jalan tol atau jalan kereta api ke pelabuhan, dan memperluas kapasitas pelabuhan seperti Tanjung Priok dan lainnya yang selama ini menjadi pintu keluar masuk barang dalam beberapa tahun ke depan; (c) meningkatkan akselerasi listrik dalam dua tahun ke depan, dan banyak lagi. (Tambunan, 2008 p.17)

Dalam waktu jangka pendek, pemerintah Jepang berencana untuk membantu pembangunan infrastruktur ekonomi, membantu perkembangan industri dan UKM, dan membuat sistem ekonomi yang menjamin kepastian. Langkah ini ditempuh setelah infrastruktur ekonomi yang dibangun Indonesia pada saat orde baru terbukti rapuh. Pelajaran yang lain dari krisis adalah bertahannya UKM. Fakta ini kemudian menjadi acuan pembangunan ekonomi Indonesia paska krisis 1997.

Gambar 4.3

Kualitas Infrastruktur Indonesia



Sumber: Tambunan, 2008

Jepang juga menginginkan Indonesia memberikan kepastian iklim investasi. Pihak pengusaha Jepang menunggu berlakunya UU Penanaman Modal Asing di Indonesia (investasi) dan UU perburuhan yang dianggap terlampau melindungi kepentingan buruh. Selain itu, pengusaha Jepang juga mendorong kepastian UU Perpajakan di daerah dan pusat. Berlakunya UU tersebut dianggap penting sebagai dasar Jepang untuk membuat perencanaan kegiatan usahanya (Irsan, 2007 p.250).

Pemerintah telah banyak berupaya meningkatkan investasi riil di Indonesia. Terakhir adalah dengan mengeluarkan paket kebijakan ekonomi 2008-2009 yang tertuang dalam Inpres Nomor 5 tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008-2009. Paket ini memuat berbagai kebijakan ekonomi yang dapat dikelompokkan ke dalam 8 bidang, yakni kebijakan perbaikan iklim investasi, kebijakan ekonomi makro dan keuangan, kebijakan ketahanan energi, dan kebijakan sumber daya alam, lingkungan dan pertanian.

Sebelumnya, pada akhir Februari 2006, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan investasi dalam bentuk Inpres No. 3 Tahun 2006. Paket kebijakan Perbaikan Iklim Investasi itu mencakup lima aspek yaitu: (1) bidang umum termasuk memperkuat kelembagaan pelayanan investasi, sinkronisasi peraturan daerah dan pusat, dan kejelasan ketentuan mengenai kewajiban AMDAL; (2) bidang kepabean dan cukai, termasuk percepatan arus barang, pengembangan peranan kawasan berikat, pemberantasan penyelundupan, dan debirokratisasi di bidang cukai; (3) perpajakan termasuk insentif perpajakan untuk investasi, melaksanakan system "melakukan pengkajian sendiri" secara konsisten, revisi pajak pertambahan nilai untuk mempromosikan ekspor, melindungi hak wajib pajak, dan mempromosikan transparansi dan "disclosure"; (4) ketenagakerjaan yang mencakup penciptaan iklim hubungan industrial yang mendukung perluasan lapangan tenaga kerja, perlindungan dan penempatan TKI di luar negeri, penyelesaian berbagai perselisihan hubungan industrial secara cepat, murah, dan berkeadilan, mempercepat proses penerbitan perizinan ketenagakerjaan, penciptaan pasar tenaga kerja fleksibel dan produktif, dan terobosan paradigma pembangunan transmigrasi dalam rangka perluasan lapangan kerja; dan (5) bidang usaha kecil, menengah, dan koperasi (Tambunan, 2008 p.24-5).

4.3 *Capacity Building* dan Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia

Kebijakan liberalisasi perdagangan (dan investasi) juga dilihat sebagai cara untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Peningkatan daya saing suatu ekonomi bisa dilakukan melalui berbagai cara. Ada pemikiran yang mengatakan bahwa sebenarnya peningkatan daya saing terutama merupakan tantangan bagi masing-masing perusahaan dan upaya yang dilakukan haruslah pada tingkat perusahaan. Kerjasama internasional, misalnya dengan membentuk suatu aliansi strategis (*strategic alliance*), merupakan salah satu cara yang kini banyak dilakukan, terutama antara perusahaan-perusahaan dari negara-negara maju. Tetapi berbagai bentuk kerjasama internasional juga dilakukan pada tingkat negara (ekonomi) untuk meningkatkan daya saing, artinya meningkatkan kemampuan penetrasi pasar. Pembentukan kawasan perdagangan bebas seringkali dilihat sebagai upaya untuk saling meningkatkan akses pasar di antara pesertanya. Kini terdapat kecenderungan pembentukan kesepakatan perdagangan bebas secara bilateral, tetapi kesepakatan serupa ini sebenarnya tidak meningkatkan daya saing melainkan mendapatkan perlakuan khusus dalam akses pasar. Perlakuan khusus ini jelas-jelas merugikan negara lain karena menimbulkan apa yang disebut sebagai *trade diversion*. Perlu kiranya dicatat pula bahwa dalam banyak kesepakatan (FTA) bilateral atau regional terdapat klausul mengenai persaingan dan kebijakan persaingan (Soesastro, 2004).

Konsep daya saing menurut Altenburg et al. (1998) dan Michael E. Porter dalam *Proceedings of Four Expert Meetings*, United Nations Conference on Trade and Development (2005) serta Wyokinska (2003) seperti diperlihatkan pada gambar 4.4.

Salah satu kesepakatan yang dianggap menguntungkan bagi Indonesia dalam JI-EPA adalah *capacity building* dimana pemerintah Jepang akan membantu pengembangan industri lokal Indonesia untuk mampu bersaing di pasar internasional. Selama ini, industri dalam negeri mengalami berbagai persoalan seperti manajemen yang kurang baik, kualitas SDM, dan akses ke pasar internasional. Akses ke pasar internasional menjadi terhambat karena faktor promosi dan kualitas produk (Soesastro, 2004)

Negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, telah melaksanakan globalisasi ekonomi dengan melakukan liberalisasi ekonomi dalam kerangka WTO, APEC, AFTA dan FTA. Sebagai pemrakarsa dan promotor kebijakan globalisasi, pemerintah di kebanyakan negara Asia Tenggara memberikan perhatian pada penyesuaian tahap pertama saja. Penyesuaian tahap pertama ini menyangkut proses dan upaya membuka ekonomi melalui suatu pentahapan dari liberalisasi dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing internasionalnya. Penyesuaian ini melibatkan kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan daya tarik ekonomi yang bersangkutan sebagai tempat produksi bagi pasar global¹² (Soesastro, 2004).

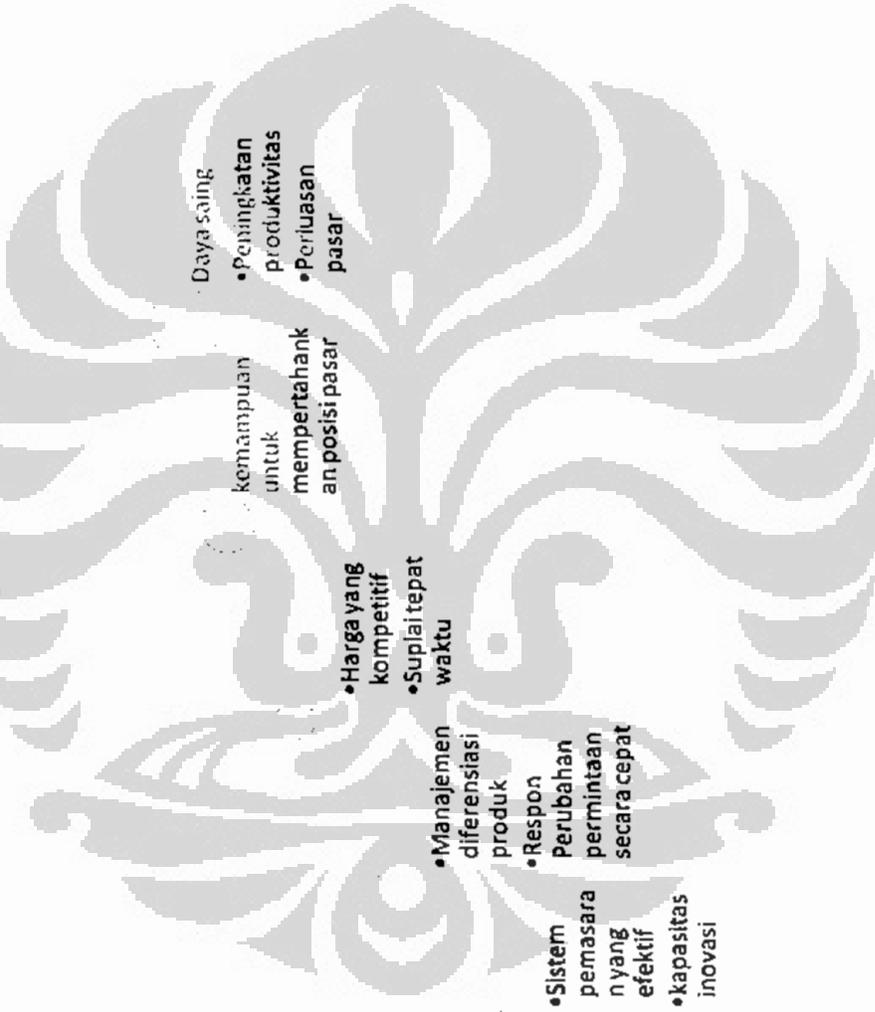
Berbagai kajian menunjukkan bahwa bagi negara berkembang, kunci utama untuk melakukan penetrasi pasar adalah daya saing harga. Hal ini merupakan kenyataan yang sulit dibantah, dan mungkin telah menjadi suatu "kebenaran". Maka upaya nasional maupun internasional untuk meningkatkan daya saing, sesedikitnya pada tahap permulaan hingga kehadiran di suatu pasar menjadi cukup mapan, adalah dengan mempertajam daya saing harga produk (Soesastro, 2004). Negara-negara ASEAN bersepakat untuk membentuk kawasan perdagangan bebas, AFTA (*ASEAN Free Trade Area*), dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing kawasan secara keseluruhan di pasar dunia. Langkah ini merupakan jawaban kawasan terhadap tantangan globalisasi. Selain itu, perkembangan China yang begitu pesat hanya bisa diimbangi oleh ASEAN apabila ASEAN membuka diri. Dengan membuka diri, ASEAN menjadi salah satu pasar dunia dan penyedia bahan mentah terbesar di dunia (JBICI, 2006).

Selain itu, peningkatan daya saing produk. Kita bisa belajar bagaimana Korea Selatan menciptakan produk elektronik yang murah sehingga bisa masuk ke pasar internasional bersama dengan produk elektronik dari Jepang. Selanjutnya,

¹² Hadi Soesastro (2004) dalam working papers dengan judul *Kebijakan persaingan, daya saing, liberalisasi, globalisasi, regionalisasi dan semua itu*, menyatakan bahwa ada dua tahap reaksi suatu Negara atas gobalisasi yaitu Penyesuaian tahap pertama ini menyangkut proses dan upaya membuka ekonomi melalui suatu pentahapan dari liberalisasi dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing internasionalnya; dan penyesuaian tahap kedua yaitu untuk mengatasi dampak perubahan ekonomi, sosial dan politik dari pembukaan ekonomi, yang juga berpengaruh atas persepsi tentang dan keadaan keamanan pada berbagai tingkatan: individual, kelompok masyarakat, bangsa, dan kawasan yang lebih luas.

Gambar 4.4

Konsep Daya Saing Michael E. Porter



Sumber: diolah dari berbagai sumber

produk Korea menjadi produk yang terus meningkatkan kualitas produk sehingga saat ini bisa bersaing dengan produk elektronik dari Jepang.

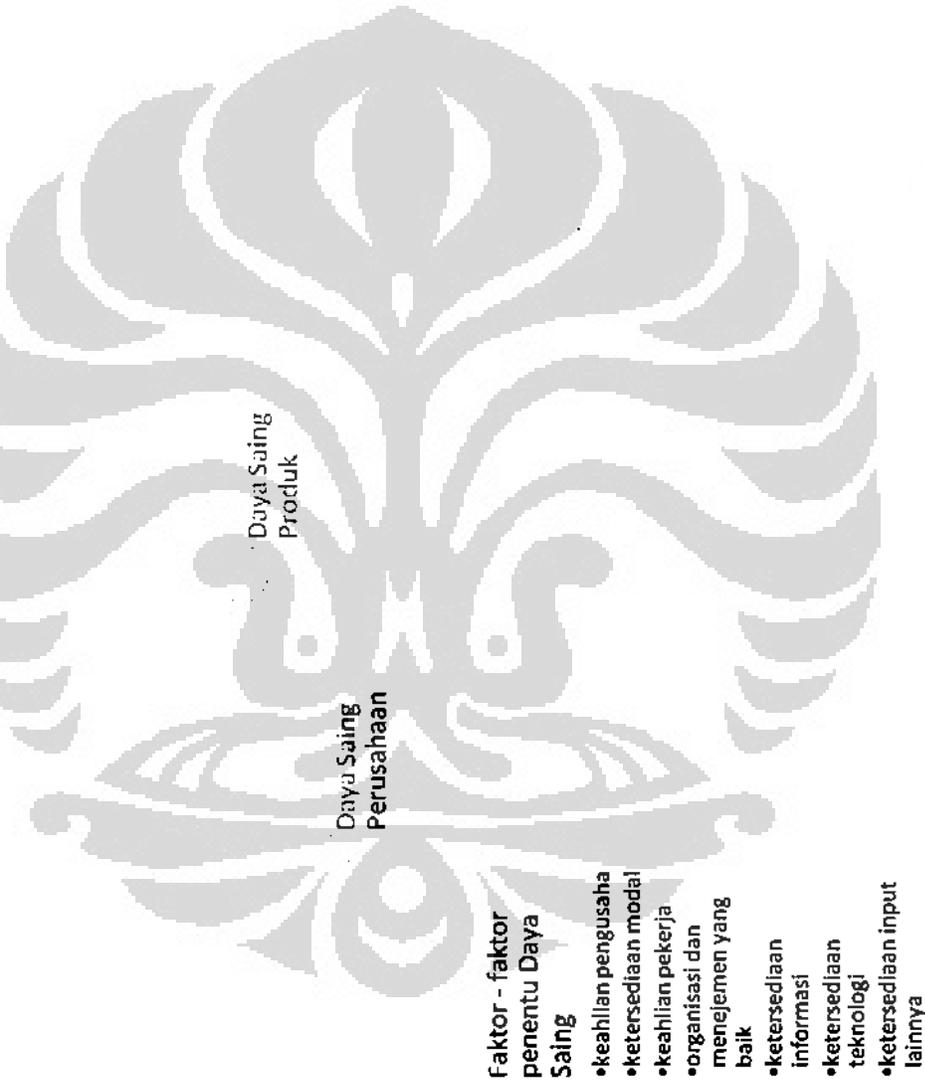
Konsep yang dikembangkan oleh Korea tersebut menjadi model yang dikembangkan oleh negara berkembang dalam membangun industrinya. Saat ini China merupakan salahsatu negara yang memproduksi barang dengan harga murah. Di saat yang sama, pemerintah China juga mendorong peningkatan kualitas produk sehingga di masa yang akan datang produk China menjadi produk dengan kualitas bagus. Selain itu, Malaysia juga mengembangkan produk elektronik sebagaimana yang pernah dikembangkan di Korea.

Namun, konsep tersebut tidaklah mudah untuk ditiru negara lain. Penandatanganan JI-EPA bisa jadi merupakan salah satu upaya Indonesia untuk bisa meningkatkan daya saing industrinya agar setara dengan negara maju seperti Jepang dan Korea. Namun, menurut Syamsul Hadi (2007), Indonesia harus belajar dari pengalaman Malaysia dalam kebijakan Mahathir Muhammad tahun 1980-an yang mengeluarkan kebijakan *Look East*. Kebijakan ini bertujuan agar Malaysia bisa meningkatkan kapasitas ekonominya, diantaranya dengan peningkatan daya saing industri. Namun Mahathir kemudian kecewa karena Jepang karena Jepang tetap bersikukuh dengan prinsip *business is business*.

Yang juga harus diperhatikan oleh pemerintah Indonesia adalah faktor penentu peningkatan daya saing. Faktor penentu daya saing produk ditentukan oleh daya saing perusahaan. Daya saing perusahaan ditentukan oleh banyak faktor seperti keahlian tenaga kerja, keahlian pengusaha, organisasi dan manajemen yang baik, ketersediaan modal, ketersediaan teknologi, ketersediaan informasi, dan berbagai input yang lain. Artinya, pemerintah harus merumuskan kebijakan peningkatan daya saing ini dengan lebih rinci untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari penandatanganan JI-EPA.

Dalam Gambar 4.5 kita bisa melihat faktor penentu daya saing dimana konsep daya saing memiliki banyak variabel yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah Indonesia. Jadi, seharusnya dalam JI-EPA pun harus ada langkah – langkah yang konkrit untuk mewujudkan peningkatan daya saing.

Gambar 4.5
Daya Saing dan Faktor – Faktor Utama Penentu



Sumber: diolah dari Tambunan, 2008

4.3.1. *Manufacturing Industry Development (MIDEC)*

Salah satu program terpenting dalam kerja sama peningkatan kapasitas adalah inisiatif pembentukan Pusat Pengembangan Industri Manufaktur (Manufacturing Industrial Development Center/MIDE). Indonesia dan Jepang menyepakati 13 bidang kerja sama MIDEC.

Program bantuan dan kerja sama peningkatan kapasitas pernah berulang kali diberikan Jepang jauh sebelum ada EPA. Kali ini, Indonesia bukan mendapat bantuan, melainkan mendapat mitra untuk mengembangkan kapasitasnya.

MIDEC merupakan strategi untuk mengatasi kelemahan industri penunjang di Indonesia. Lemahnya industri yang, antara lain, menghasilkan komponen ini menyebabkan Indonesia terlepas dari jaringan produksi regional. Mekanisme kerja jaringan produksi tersebut ditandai dengan besarnya ekspor komponen atau suku cadang.

Ekspor komponen dari Malaysia, misalnya, mencapai sekitar 45 persen dari total ekspor negeri itu, Filipina 65 persen, Thailand 30 persen, dan Singapura 48 persen. Sementara ekspor komponen Indonesia hanya sekitar 17 persen dari total ekspor (Faisal Basri, 2008).

Kelemahan industri penunjang menunjukkan rapuhnya struktur industri di negeri ini. Terkait hal itu, Ekonom Faisal Basri menekankan pentingnya kebijakan industrial yang aktif dan dikerjakan berkesinambungan di negeri ini. Seusai penandatanganan EPA, Nippon Kaidanren bahkan menyampaikan harapan agar Indonesia mempertajam strategi industri karena, tanpa kejelasan strategi dari pihak Indonesia sendiri, kerja sama sulit diharapkan berjalan optimal.

Halida Miljani Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Kerjasama Internasional mengungkapkan tujuan implementasi kerjasama JI-EPA adalah untuk meningkatkan daya saing produk, dalam JI-EPA juga dicantumkan rencana pembentukan Pusat Pengembangan Industri Manufaktur, yang bertujuan mengembangkan 13 industri antara lain pengerjaan logam (metal working), energi, tekstil, elektronik, otomotif. Pusat Pengembangan Industri Manufaktur ini diberi nama *Manufacturing Industry Development* (MIDEC). Ia mencontohkan untuk tekstil dan produk turunannya yang diproduksi di dalam negeri memiliki kualitas yang bagus, namun banyak mesin produksinya yang sudah tua sehingga

harus diganti, diharapkan melalui adanya MIDEK masalah itu akan dapat diatasi sehingga bisa kembali meningkatkan produksi. (Buletin Bisnis, 9/9/2008)

Sedangkan Direktur Jenderal (Dirjen) Industri Logam, Mesin, Tekstil, dan Aneka, Departemen Perindustrian, Ir. Ansari Bukhari, MBA mengatakan program MIDEK mencakup 13 sektor dengan tujuan meningkatkan kemampuan industri menghadapi semakin terbukanya pasar di dalam negeri, sekaligus memasuki pasar global. Tiga belas subsektor yang dimaksud antara lain, otomotif dan komponennya, elektronik dan perlengkapan elektrik, produk baja, tekstil, petrokimia dan oleo kimia, industri logam nonbaja, makanan dan minuman, konservasi energi, usaha kecil menengah (UKM), *welding*, dan *tooling*. (Deperin, bulletin volume I/tahun II/2008)

Menurut Dirjen Industri Alat Transportasi dan Telematika (IATT) Depperin Budi Darmadi, sasaran jangka menengah industri otomotif adalah tercapainya kemampuan pasok industri komponen sebesar 80% untuk industri perakitan kendaraan bermotor roda empat, baik untuk sedan dan truk ringan. Saat ini, di Indonesia terdapat sekitar 20 industri perakitan mobil, namun yang aktif memproduksi sekitar 16-18 perusahaan. Sedangkan total industri komponen mencapai 300 perusahaan yang memproduksi sekitar 250 jenis komponen.

Ia berharap Pemerintah Jepang membantu target pemerintah Indonesia melalui pembentukan Pusat Pengembangan Industri Manufaktur (MIDEK) yang disepakati Jepang dalam kerangka JI-EPA. MIDEK menjadi terobosan baru bagi Indonesia untuk pengembangan industri manufaktur.

Saat ini kandungan lokal otomotif yang dirakit di Indonesia yang tertinggi baru pada kisaran 70%. Presdir Grup Indomobil Gunadi Sindhuwina mengatakan, Suzuki APV misalnya, kandungan lokalnya sudah mencapai sekitar 76%. Hal senada juga dikemukakan Manager Komunikasi Pemasaran PT Toyota Astra Motor (TAM) Achmad Rizal yang mengatakan Toyota Avanza dan Kijang Innova yang menjadi kendaraan dengan penjualan terbesar di Indonesia memiliki kandungan lokal di atas 65%.

Terkait dengan target pemerintah meningkatkan kandungan lokal produk otomotif di Indonesia, Dirjen IATT Budi Darmadi mengatakan, pemerintah secara konsisten telah menerapkan kebijakan dalam rangka pengembangan industri

otomotif secara umum yang tertuang dalam peta jalan pengembangan industri otomotif sampai tahun 2025. (Pikiran Rakyat, 20/06/2008)

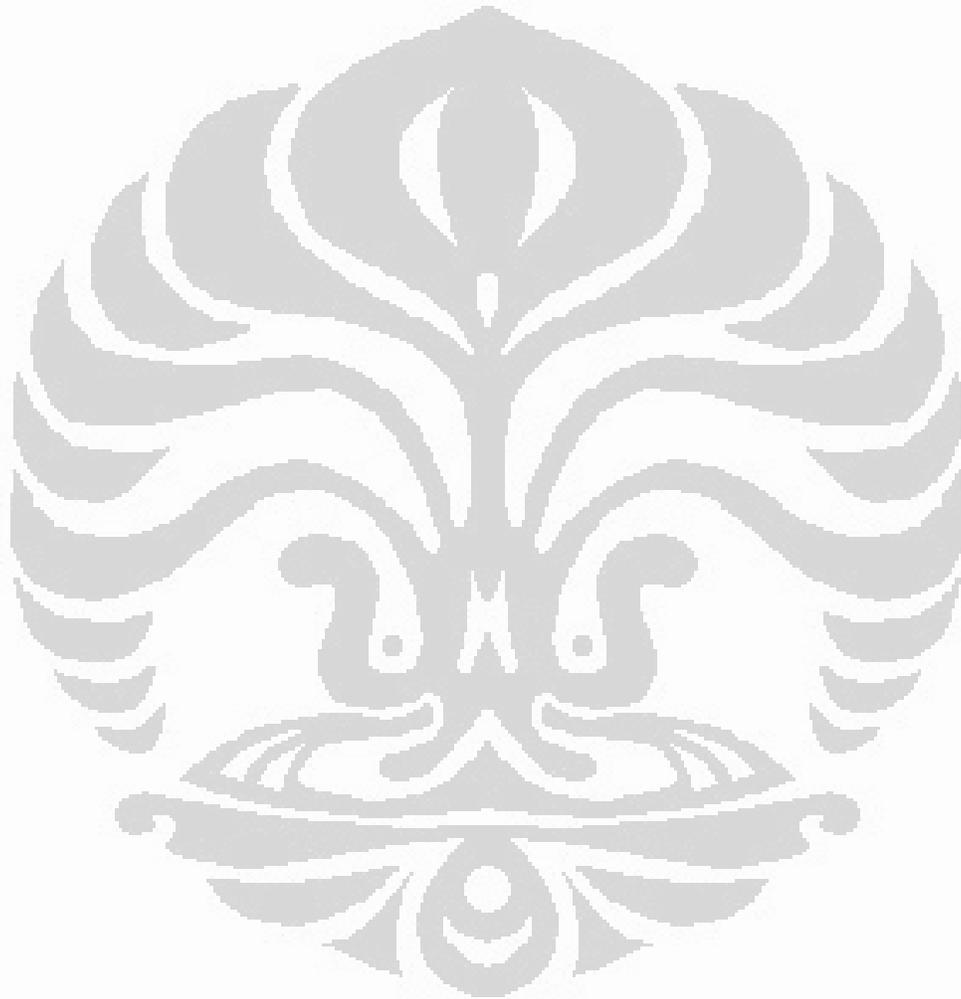
Press Secretary dari Menteri Luar Negeri Jepang Mitsuo Sakaba saat konferensi pers di Hotel Nikko, Jakarta (20/8/2007). "Dalam kerjasama ini salah satu hal yang menjadi fokus adalah mengenai pengembangan industri manufaktur," jelas Mitsuo. Mitsuo mengatakan, untuk pemberdayaan industri manufaktur ini akan fokus kepada beberapa aktivitas seperti pembelajaran dasar bagi para pelaku usaha, mengirim para ahli, pelatihan dan seminar atau workshop. "Dua pemerintah akan bekerja sama untuk memperkuat daya saing industri manufaktur di berbagai sektor, seperti industri besi baja, pemberdayaan UKM, ekspor barang, elektronik, baja, tekstil, kimia serta makanan," jelas Mitsuo (Detik Finance, 20/02/2009).

4.3.2 Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia

Pemerintah Jepang juga berkomitmen untuk memberikan peluang kerja bagi warga negara Indonesia. Jepang melihat Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki persoalan dalam perekonomian, salah satunya adalah banyaknya jumlah pengangguran.

Fenomena masuknya perawat Indonesia ke Jepang dalam payung perjanjian kerjasama EPA menurut Dubes RI untuk Jepang Jusuf Anwar merupakan momentum yang tepat. Apalagi kondisi Jepang yang sedang mengalami persoalan "aging society", yaitu bertambahnya kelompok masyarakat lanjut usia. Selain itu, bertambahnya usia harapan hidup di Jepang (rata-rata mencapai 82 tahun, tertinggi di dunia) ternyata tidak dibarengi oleh bertambahnya angkatan produktif. Jumlah angka kelahiran di Jepang justru menurun. Saat ini populasi Jepang sebanyak 127 juta orang, lebih dari 15 persen adalah kelompok lanjut usia. Jepang memang mencoba mengatasinya dengan menggenjot produksi robot humanoid (yang berfungsi seperti manusia), namun tetap tidak bisa mengatasi ketergantungannya pada tenaga manusia, khususnya di bidang pelayanan kesehatan. Kekurangan tenaga kesehatan bisa membuat sistem pelayanan kesehatan Jepang lumpuh (Kompas, 28/07/2008).

Kenyataan di Jepang tersebut membuat pemerintah Indonesia mengambil kesempatan untuk mengisi posisi perawat dan *caregivers* (perawat lansia). Bagi Indonesia, banyak hal yang bisa diperoleh dari pengiriman perawat dan *caregivers* ke Jepang. Target minimalnya adalah membuat kualitas keperawatan Indonesia semakin diakui secara internasional. Pengaruh lainnya adalah pembenahan dalam masalah kepastian hukum, perlindungan tenaga kerja di luar negeri, dan standar upah yang layak.



BAB 5 KESIMPULAN

Jl-EPA adalah perjanjian yang dibuat Jepang dengan negara patner, termasuk Indonesia. Perjanjian kerjasama ini didesain untuk meningkatkan kerjasama ekonomi antara kedua belah pihak. Oleh karena itu perjanjian bilateral ini diharapkan akan mampu memfasilitasi negara patner untuk meningkatkan kemampuan ekonomi, begitu juga Jepang dapat mengambil keuntungan dalam perjanjian ini.

Dalam konteks hubungan Jepang dengan Indonesia, Jepang memandang Indonesia sebagai salah satu negara yang berpengaruh di Asia Tenggara dan memainkan peranan penting dalam perekonomian Jepang. Jepang juga memandang Indonesia sebagai negara dengan sumber daya alam yang melimpah. Potensi ini bisa sinergis dengan kepentingan Jepang untuk meningkatkan perdagangan internasional dan menanamkan investasinya di negara lain. Selain itu, Indonesia juga memiliki pasar yang sangat besar.

Potensi lain yang dianggap penting oleh Jepang adalah cadangan gas Indonesia. Jepang memiliki tingkat kebutuhan gas yang cukup besar dan selama ini diperoleh dengan impor. Dengan Jl-EPA, Jepang mengharapkan Indonesia memprioritaskan ekspor gas alamnya ke Jepang. Kondisi ini didorong oleh persaingan Jepang dengan Taiwan dan China untuk mendapatkan suplai gas dari Indonesia.

Di sisi yang lain, Indonesia memandang Jepang sebagai negara yang sangat penting dalam hubungan ekonomi. Jepang pernah menjadi investor utama Indonesia selama beberapa dekade, sampai kemudian investasi Jepang menurun seiring dengan krisis ekonomi 1997/1998. Pemerintah Indonesia kemudian berupaya mengembalikan investasi Jepang yang dialihkan ke negara lain dengan berbagai paket kebijakan yang mendukung iklim investasi dalam negeri.

Indonesia juga mengharapkan Jepang menjadi “guru” dalam pengembangan ekonomi. Jepang diharapkan membimbing industri manufaktur dan UKM Indonesia untuk dapat bersaing di pasar global. Oleh karena itulah Indonesia mengajukan paket “*capacity building*” dalam kerjasama Jl-EPA.

DAFTAR REFERENSI

1. Buku

Akrasanee, Narongchai et al. (2003). *ASEAN – Japan Cooperation : A Foundotion East Asian Community*. New York: JCIE.

Acs, Zoltan and Bernard, Yeung. (2002) *Small ond Medium-Sized Enterprises in the Global Economy*, The University of Michigan Press, Michigan.

Austin, Greg and Harris, Stuar. (2001). *Japan ond Greater China: Political economy and Military Power in Asian Century*, London: C. Hurst & Co. Ltd

Curtis, Gerald L. (1999). *The Logic of Japanese Politics*. New York: Columbia University Press.

Dobson, Wendy. (1994). *Japan in East Asia : Troding and Investment Strategies*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies

Hook, Glen D. Et al. (2001). *Japan's International relations: Politics, Economies and Security*. London and New York: Sheffield Centre for Japanese Studies/ Routledge Series.

Fujita, Kuniko and Richard Child Hill, eds. (1993). *Japanese Cities in the World Economy*, Temple University Press, Philadelphia.

Inoguchi, Takashi. (1993). *Japan's Foreign Policy in an Era of Global Change*. London: Pinter Publishers Ltd.

Irsan, Abdul. (2007). *Budaya dan Perilaku : Politik Jepang di Asia*. Jakarta: Grafindo.

Itoh, Motoshige, and Shinjiro Urata. (1994). Small and Medium-Size Enterprise Support Policies in Japan, *Policy Research Working Paper*, 1403 The World Bank.

JETRO. (1999). *JETRO White Paper on International Trade 1999 : Fall in Prices Causes Slowdown in World Trade*. Tokyo : Author.

JETRO. (2000). *JETRO White Paper on International Trade 2000 : World Trade Increasingly Affected by Information Technology*. Tokyo : Author.

JETRO. (2000). *JETRO White Paper on Foreign Direct Investment 2000 : FDI Inflow to Japan Double*. Tokyo : Author.

JETRO. (2001). *JETRO White Paper on Foreign Direct Investment 2001 : Accelerated Corporate Alignment through Mergers and Acquisitions*. Tokyo : Author.

JETRO. (2001). *JETRO White Paper on International Trade : World Trade Expand Broadly And China Rises to Prominence. Fall in Prices Causes Slowdown in World Trade*. Tokyo : Author.

JETRO. (2002). *JETRO White Paper on Foreign Direct Investment 2002 : growth in Global Foreign Investment Slow*. Tokyo : Author.

JETRO. (2002). *2002 JETRO White Paper on International Trade and Investment*. Tokyo : Author.

JETRO. (2003). *2003 JETRO White Paper on International Trade and Investment*. Tokyo : Author.

- JETRO. (2003). *Prospect for Free Trade Agreement in East Asia*. Tokyo : Author.
- JETRO. (2004). *2004 JETRO White Paper on International Trade and Investment*. Tokyo : Author.
- JETRO. (2005). *2005 JETRO White Paper on International Trade and Investment*. Tokyo : Author.
- JETRO. (2006). *2006 JETRO White Paper on International Trade and Investment : Japanese Corporate Activity in New Growth Markets and Emerging East Asian Free Trade Zone*. Tokyo : Author.
- JETRO. (2007). *2007 JETRO White Paper on International Trade and Investment : Increasing Utilization of Asian FTAs and Growth Strategies for Japanese Companies*. Tokyo : Author
- JETRO. (2008). *2008 JETRO White Paper on International Trade and Investment: Japanese Economy Headed for Further Globalization Both Domestically and Abroad*. Tokyo: Author
- Liedholm, Carl and Donald C. Mead. (1999). *Small Enterprises and Economic Development: The Dynamics of Micro and Small Enterprises*, Routledge, London.
- Mas'ood, Mohtar. (2006). *Diktat Ekonomi Politik Internasional dan sejumlah*. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Hubungan Internasional UGM.
- Mas'ood, Mohtar. (1990) *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.

Munakata, Naoko. (2006). *Transforming East Asia : The Evolution of Regional Economic Integration*. Tokyo: Research Institute of Economy, Trade and Industry. Washington: Brookings Institution Press.

Papp, Daniel R., *Contemporary International Relations: Frameworks for Understanding*, Boston: Macmillan: 2001

Strange, Susan. (1992). *States and Market*, London: Pinter.

Swee - Hock, Saw, Et al. (2005). *ASEAN – China Relations : Realities and Prospects*, Singapore: ISEAS

Salvatore, Dominick, dan Diulio, Eugene A. (2004). *Prinsip-prinsip Ekonomi*. Jakarta : Erlangga.

Samuelson, Paul A. dan Nordhaus, William D. (2004). *Ilmu Makro Ekonomi*, Edisi 17. Jakarta : Media Global Edukasi.

Muramatsu, Michio, 1988, *Local Power in the Japanese State*, The University of California Press.

Odaka, Konosuke and Minoru Sawai. (1999). *Small Firms, Large Concerns: The Development of Small Business in Comparative Perspective*, Oxford University Press, Oxford, Tokyo.

Patrick, Hughes and Thomas Rohlen. (1987) "Small-scale Family Enterprises," in Yamamura and Yasuba, *The Political Economy of Japan, Vol. I The Domestic Transformation*, Stanford University Press: Stanford.

Samuels, Richard J. (1983) *The Politics of Regional Policy in Japan*, Princeton H.J : Princeton University Press.

Takeuchi, Eiji, "The Present Significance of Microbusiness," (2006) Research Report, National Life Finance Corporation Research Institute, May.

The 2001 White Paper on Small and Medium Enterprises in Japan: A Wake-Up Call to Small Business—Building a Self-Sustaining Enterprise, Japan Small Business Research Institute.

The 2002 White Paper on Small and Medium Enterprises in Japan: The Age of Local Entrepreneur—Birth, Growth and Revitalization of the National Economy, Japan Small Business Research Institute.

The 2003 White Paper on Small and Medium Enterprises in Japan: The Road to Regeneration and the Creation of an Entrepreneurial Society, Japan Small Business Research Institute.

The 2004 White Paper on Small and Medium Enterprises in Japan: The Limitless Potential of The Diversity of Small and Medium Enterprises, Japan Small Business Research Institute.

Toshiya Kitayama (2001). "Local Government Policy Initiatives in Japan," The World Bank Institute.

Samuel, S. Jones. (1993). *Logiko Hubungan Internasional : Kekuasaan, Ekonomi Politik Internasional, dan Tatahan Dunia*. Jakarta: Gramedia.

Samuel, S. Jones. (1992). *Logiko Hubungan Internasional : Persepsi Nasional*. Jakarta: Gramedia.

Wibowo, Ari Satriyo. (2004). *27 Siasat jitu Menembus Pasar*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

The National Institute for Defense Studies Japan. (2003). *East Asian Strategic Review 2003*. Tokyo: The Japan Times Ltd.

-----, Michio. (2001) *Intergovernmental Relations in Japan: Models and Perspective*, The World Bank.

2. Jurnal

Cires, *Indonesian Perspective :Japan and the Economic Crisis in Indonesia*, volume II: 2005

Araki, Mitsuya (2007), *Japan's Official Development Assistance: The Japan ODA Model That Began Life in Southeast Asia*, Asia Pacific Review vol.14 No.2,2007

Hadi dan Dharmastuti, Santi (2005), *Posisi dan Peran Jepang dalam Mewujudkan Integrasi di Asia Timur*, Jurnal ManabuVol.1 No.1 , Agustus 2005

3. Artikel

Sri Hartati Samhadi (25 Agustus 2007). "Menggantungkan Harapan pada EPA". *Kompas*. www.kompas.co.id

Anggraini, Sondang. (2008, Agustus). *Upaya Departemen Perdagangan untuk meningkatkan kinerja Ekspor Indonesia dalam konteks Implementasi EPA*. Paper dipresentasikan pada saat seminar mengenai *Economic Partnership Agreement* antara Indonesia – Jepang di UI, Depok.

Manurung, Sudung. (2008, Agustus). *Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement*. Paper dipresentasikan pada saat seminar mengenai *Economic Partnership Agreement* antara Indonesia – Jepang di UI, Depok.

Hidayati, Nur (2007a), "ASEAN 2015 Jangan Sampai Jadi Pecundang", *Kompas*,
Bisnis & Keuangan, Sabtu, 2 Juni: 21.

Hidayati, Nur (2007b), "Aturan perdagangan. Kemelut Ritel Vs Pemasok",
Kompas, Bisnis & Keuangan, Kamis, 15 Maret: 21.

Hidayati, Nur (2008), "EPA Jepang-Indonesia Bakal Percuma jika Tanpa
Kejelasan Strategi", *Kompas*, Internasional, Rabu, 23 Januari: 10.

Hidayati, Nur dan Banu Astono (2007), "TPT dan Alas Kaki Pilih Mitranya, Baru
Tembus Pasarnya", *Kompas*, Fokus Kemitraan Indonesia-Jepang, Sabtu, 25
Agustus: 36.

Ratna E. Amiaty, 2006, "Kredit bagi UMKM antara Mitos dan Realitas,"
Kompas,
28 April, hal. 39

Zamroni. (2 Februari 2009). "Investasi di Indonesia: Antara Realita dan
Harapan". [http://www.zamronisalim.com/bahasa/study-research/investasi-
di-indonesia.html](http://www.zamronisalim.com/bahasa/study-research/investasi-di-indonesia.html)

Basri, Faisal. (2 Februari 2009). "Kemitraan Indonesia dan Jepang".
<http://www.pjineews.com/content/view/1/13/>

JETRO. (2007). "EPA Indonesia".
<http://www.jetro.go.jp/indonesia/jiepa/index.html/EPAI.pdf>

Bappenas (3 Februari 2009). "Kepentingan Nasional Indonesia di Dunia"
Internasional". Diambil dari
[http://ditpolkom.bappenas.go.id/hasedir/Politik%20Kepentingan%20Nasiona
%20Indonesia%20di%20Dunia%20Internasional.PDF](http://ditpolkom.bappenas.go.id/hasedir/Politik%20Kepentingan%20Nasiona%20Indonesia%20di%20Dunia%20Internasional.PDF)

Sinar Harapan. (2003). "EPA Indonesia–Jepang Harapan untuk Mendongkrak Investasi Jepang." <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0611/29/eko11.html> yang diakses pada 31 Januari 2009.

Tolliday, Steven and Yasushi Yonemitsu, "Microfirms and Industrial Districts in Japan: The Dynamics of the Arita Ceramic-ware Industry in the Twentieth Century," *Journal of Japanese Studies*, Vol.33:1, 2007, pp.29-66

JBIC Institute. (2002, Juni). "Foreign Direct Investment and Development: Where do We Stand?". *JBICI Research Paper No.15*.

Hadi, Syamsul. (20 Agustus 2007). "Kerjasama Indonesia – Jepang". *Kompas*. <http://www.kompas.com>

4. Berita

Kedutaan Besar Jepang. (2009, 31 Januari). *Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement : Perjanjiaan Kemitraan Indonesia dan Jepang*. 31 Januari 2009. http://www.indonesianembassy.jp/perdagangan/manfaat_epa.pdf

OECD. (2008, April). *Economic Survey of Japan. Policy Brief*. <http://www.oecd.com>

Antara. (5 September 2007). "EPA Indonesia – JEPAng, Siapa Diuntungkan". <http://www.antara.co.id/arc/2007/9/5/epa-indonesia-jepang-siapa-diuntungkan/> yang diakses pada 31 Januari 2009

Antara. (22 April 2007). "EPA Indonesia – Jepang Belum Sepakati Kerjasama". <http://www.antara.co.id> yang diakses pada 31 Januari 2009.

Antara. (20 Agustus 2008). "RI-Jepang Tandatangani Kerjasama Bidang Energi dan Kelistrikan". <http://www.antara.co.id> yang diakses pada 31 Januari 2009.

Inilah.Com (28 Februari 2008). "Temu Kalla-Fukuda Bahas Isu Energi". <http://www.inilah.com> yang diakses pada 31 Januari 2009

METI, *Japan's Policy on FTAs/EPAs*, METI: March 2005

Presiden : Perkuat Kerjasama. (2 November 2008). *Kompas Cetak*. <http://www.kompas.com> yang diakses pada 2 Februari 2009

Indonesia – Jepang Perlu Kembangkan Kerjasama diluar Ekonomi. (24 Juli 2008). *Kompas Online*. <http://kompas.com> yang diakses pada 2 Februari 2008

Allo, Markus Duan. Investasi Vietnam tambah Baik. *Kompas*. <http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0309/30/ln/590517.htm> yang diakses pada 2 Februari 2008

Kawilarang, Renne. (28 Desember 2007). Indonesia, Juru Damai yang Sulit Memasarkan Diri. *Sinar Harapan*. <http://www.sinarharapan.co.id>

Indonesia, Juru Damai yang Sulit Memasarkan Diri. (11 Januari 2009). *Kompas Online*. <http://www.kompas.com> yang diakses pada 2 Februari 2009.

Ekspor LNG ke Jepang maksimal 5 Juta Ton. (19 Oktober 2007). *Kompas Cyber Media*

Jl-EPA: Membangun "Jalan Tol" Menuju Jepang. (29 November 2006). *Kompas Cyber Media*.

Kesepakatan Prinsip JI-EPA disetujui Presiden dan PM Abe. (28 November 2006). *Kompas Cyber Media*.

Perpanjangan Kontrak Gas Ke Jepang Disepakati. (28 Maret 2008). *Kompas.com*.

Wapres: Jepang, China, dan Korsel Bukan Dewa Penolong. (2 Februari 2009). *Kompas.com*.

Negosiasi Gas RI-Jepang Masih Tarik Ulur. (20 Agustus 2007). *Kompas Cyber Media*.

Presiden: Ekspor Gas ke Jepang dilanjutkan. (28 November 2006). *Kompas Cyber Media*.

Komponen Lokal Otomotif Dipatok 80%. (4 Maret 2009). *Pikiran Rakyat Online*.
<http://www.Pikiran-rakyat.co.id>